

Salah satu masalah sosial yang belum banyak berubah adalah pertukaran posisi dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan ini pada gilirannya menjadi budaya. Dalam ritung kehidupan masyarakat tergambar bahwa di berbagai tempat dan ranah, kaum perempuan mengalami perlakuan diskriminatif dalam berbagai bentuknya. Kerimpangan relasi yang bersumber dari budaya patriarkhis seakan melegitimasi beragam bentuk tindak diskriminatif bag perempuan. Bisa diartikan, budaya patriarkhis adalah sumber tantangan terbesar untuk proses pemulihn hak perempuan secara utuh. Dalam kehidupan bermasyarakat tergambar bahwa ketidakeadilan terhadap perempuan seringkali juga berujung pada tindak kekerasan.

Kesetaraan dan keadilan merupakan substansi nilai yang seharusnya melekat dalam sebuah budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana perempuan dan laki-laki sebagai pelaku budaya dan bagian dari komunitas memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan hak-haknya, tanpa ada bentuk diskriminasi berbasis gender. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pemulihn dan pemenuhan hak-hak perempuan merupakan indikator untuk menciptakan sebuah budaya yang berkeadilan gender.

Apa yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang dihadapi perempuan karena relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Hal itu berpengaruh negatif bagi perempuan karena aktifitas mereka sangat dibatasi, cenderung dikuasai dan terpengaruh oleh budaya masyarakat yang diskriminatif.

Buku ini berupaya mengungkap realitas eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial di tengah ranah budaya yang ada. Kiprah perempuan di ruang publik, baik di panggung politik, di bidang pendidikan, serta dalam pembentukan sosial budaya itu sendiri, sering "terlupakan" meskipun apa yang sudah mereka perjuangkan sesungguhnya menjadi peneiri masa depan sebuah komunitas.



## PEREMPUAN DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA

PEREMPUAN DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA



Sofia Hardani  
Wilaela  
Riswani  
Jumli Nelli

# PEREMPUAN DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA

Tim Penulis:

Sofia Hardani  
Wilaela  
Riswani  
Jumni Nelli



KAUKABA DIPANTARA



Pusat Studi Wanita  
UIN Sulthan Syarif Kasim Riau  
2012

## **PEREMPUAN DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA**

Sofia Hardani, Wilaela, Riswani, Jumni Nelli

xii + 190 halaman; 14 x 21 cm

ISBN: 979-978-18863-9-0

Editor: A. Rafiq Zainul Mun'im

Proofreader: Faizah SA

Penata Letak: Gandring Art

Desainer Cover: Ruang Imagi

Sumber Gambar Cover: muslimvillage.com

Cetakan: Pertama, Desember 2012

Diterbitkan oleh:

KAUKABA DIPANTARA

Krapyak Kulon RT 05 No.181

Panggungharjo Sewon Bantul

Yogyakarta 55188

Telp/Fax. 0274-387435

Email: [redaksi@penerbitkaukaba.com](mailto:redaksi@penerbitkaukaba.com)

Bekerjasama dengan:

PUSAT STUDI WANITA

UIN Sulthan Syarif Kasim Riau

Jl. HR. Subranta No. 155 Pekanbaru

Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052

Email: [pswuin-suska@yahoo.co.id](mailto:pswuin-suska@yahoo.co.id)

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmaanirrahim*

**P**uji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat-Nya buku *Perempuan Dalam Realitas Sosial Budaya* ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk Junjungan Alam Rasulullah Muhammad s.a.w. yang telah membawa ajaran *rahmatan lil 'alamin*.

Buku yang ada di tangan pembaca ini diharapkan dapat menambah bahan informasi dan renungan bagi semua pihak untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan bermanfaat dalam kerangka menjalankan amanah dalam kehidupan bernegara dan beragama, yaitu amanah undang-undang dan amanah keadilan yang diserukan dalam ajaran agama (Islam).

Buku ini dapat terbit berkat dukungan dari berbagai pihak, yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu. Bagi mereka dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. HM Nazir, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, Drs. Husni Thamrin, M.Si., yang dengan bantuan moril maupun materil PSW UIN Suska Riau dapat berkarya dalam memberikan kontribusi bagi perjuangan perbaikan sumber daya manusia, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Atas segala bentuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan, Allah SWT jualah yang membalasi.



Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pengurus PSW dan sahabat-sahabat diskusi di Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau yang selalu memberi dukungan dan sumbangan pemikirannya. Kebaikan mereka memberikan kekuatan penggugah (*subversive force*) bagi kerangka berfikir buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat.

Pekanbaru, Oktober 2012  
Tim Penulis

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
MUQADDIMAH .....	vii
I. AKTUALISASI DIRI PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN <i>Sofia Hardani</i> .....	I
II. PERSPEKTIF SEJARAH TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MELAYU <i>Wilaela</i> .....	47
III. KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA MELAYU RIAU <i>Riswani</i> .....	101
IV. PEREMPUAN MUSLIM DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA <i>Jumni Nelli</i> .....	137
DAFTAR INDEX .....	183
TENTANG PENULIS .....	185



## MUQADDIMAH

Dalam realitas sosial budaya, jarang dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal, yaitu kondisi yang menggambarkan kebutuhan dan hak setiap warga masyarakat terpenuhi, perilaku kehidupan sosial ataupun komponen sistem sosialnya selaras dengan tuntutan perubahan. Ini memberi arti bahwa eksistensi budaya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kehidupan sosial itu sendiri. Dalam hal ini, masalah sosial, dalam bahasa sederhana, dipahami sebagai kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap merugikan kehidupan sosial (baik sebagai individu maupun kelompok) serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati.

Salah satu masalah sosial yang belum banyak berubah adalah pemiskinan posisi dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, dan ini pada gilirannya menjadi budaya. Dalam relung kehidupan masyarakat tergambar bahwa di berbagai tempat dan ranah, kaum perempuan mengalami perlakuan diskriminatif dalam beragam bentuknya. Ketimpangan relasi yang bersumber dari budaya patriarkhis seakan melegitimasi beragam bentuk tindak diskriminatif bagi perempuan. Bisa diartikan, budaya patriarkhis adalah sumber tantangan terbesar untuk proses pemulihan hak perempuan secara utuh. Dalam kehidupan bermasyarakat tergambar bahwa ketidakadilan terhadap perempuan seringkali juga berujung pada tindak kekerasan.

Kesetaraan dan keadilan merupakan substansi nilai yang seharusnya melekat dalam sebuah budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana perempuan dan laki-laki sebagai pelaku budaya dan bagian dari komunitas memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan hak-haknya, tanpa ada bentuk diskriminasi berbasis gender. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pemulihan dan pemenuhan hak-hak perempuan merupakan indikator untuk menciptakan sebuah budaya yang berkeadilan gender.

Meskipun demikian, pemikiran ini masih sangat jauh dari jangkauan dan pola pikir masyarakat maupun perempuan sebagai pihak yang selama ini dirugikan. Hal itu tergambar dari ragam persoalan perempuan yang muncul di tengah arus perjuangan yang dilakukan berbagai pihak. Persoalan perempuan bersumber dari berbagai faktor penyebab, tidak saja karena ia adalah personal yang berjenis kelamin perempuan, tetapi juga faktor sosio-kultural yang cenderung subordinatif dan diskriminatif, yang kesemua itu pada akhirnya membuahkan beragam bentuk pelanggaran hak perempuan.

Kondisi di atas memungkinkan perempuan mengalami pemiskinan dalam berbagai bentuknya, seperti; *lack of choice* (miskin secara ekonomi karena pendapatan yang rendah); *lack of voice* (secara politis ditempatkan dalam relung yang jauh dari proses pengambilan keputusan, baik keputusan bagi dirinya sendiri maupun di tengah masyarakat dan negara); *lack of status* (dalam prakteknya masyarakat yang dipengaruhi budaya patriarkhi seringkali memberi perbedaan dalam fungsi-fungsi sosial diantara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan relasi;

perempuan subordinat laki-laki); dan *lack of self-confidence* (runtuhnya kekuatan pada diri sendiri ketika harus berhadapan dengan orang lain, terlebih laki-laki).

Dalam prakteknya, rancang bangun budaya patriarkhi dengan berbagai asesorisnya juga menjadi sumber pembenaran atas beragam sistem dan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan. Implikasinya akan menghasilkan struktur dan sistem pemerintahan yang hirarkhis dan meminggirkan peran politik perempuan secara sistematis melalui kebijakan, program ataupun lembaga yang diciptakannya. Lebih lanjut, dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan keputusan politik adalah terjadinya pelanggaran hak bagi perempuan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Apa yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang dihadapi perempuan karena relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Hal itu berpengaruh negatif bagi perempuan karena aktifitas mereka sangat dibatasi, cenderung dikuasai dan terhegemoni oleh budaya masyarakat yang diskriminatif.

Masalah sosial yang muncul ke ruang publik yang menghambat perwujudan kesejahteraan sosial, pada gilirannya mendorong tumbuhnya inisiasi tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam mendiagnosis masalah sosial pada dasarnya memerlukan pendekatan sebagai perangkat untuk membaca masalah sosial secara mendasar, terpadu dan komprehensif. Hal itu dapat menggunakan pendekatan personal maupun sistem sosial. Pendekatan personal adalah upaya memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah dilakukan

dengan menempatkan individu atau personal sebagai unit analisisnya. Dalam hal ini, sumber masalah sosial dilihat pada persoalan yang dihadapi setiap individu penyandang masalah. Melalui diagnosis ini akan ditemukan faktor penyebab persoalannya, dengan demikian bisa ditentukan bentuk atau upaya penanganan yang akan dilakukan, baik yang bersifat perbaikan personal (perilaku, pemikiran dsb), atau upaya pemecahan sosial sebagai muara penanganan sosial yang dilakukan bersama masyarakat. Dengan demikian akan terwujud suatu perubahan yang sesuai yang diharapkan (mengorganisir tindakan kolektif).

Sementara itu, pendekatan sistem sosial merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah melalui sistem sosial. Pendekatan kedua ini memandang bahwa sistem dan struktur sosial sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai bagian dari masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Dengan demikian, masalah sosial terjadi karena sistem sosial kurang mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri. Salah satu rumusan tindakan untuk memecahkan masalah sosial adalah melalui perubahan kebijakan sosial. Suatu kebijakan bila dirumuskan dengan baik dan didasarkan pada data dan informasi sosial yang akurat, diyakini akan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah sosial.

Dari gambaran tersebut bisa dimaknai bahwa mengintegrasikan kedua pendekatan (personal dan sistem sosial) akan sangat berguna dalam rangka melacak akar masalah untuk kemudian dicarikan pemecahannya. Sebagai

contoh, untuk mendiagnosis masalah yang dihadapi perempuan, sangat tidak mungkin hanya dilihat pada faktor yang melekat pada diri perempuan, tetapi juga perlu dilihat sumber masalah yang ada pada sistem sosialnya; perilaku budaya, sistem pendidikan, sistem sosial politik dan lain sebagainya.

Buku ini berupaya mengungkap realitas eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial di tengah ragam budaya yang ada. Kiprah perempuan di ruang publik, baik di panggung politik, di bidang pendidikan, serta dalam pembentukan sosial budaya itu sendiri, sering “terlupakan” meskipun apa yang sudah mereka perjuangkan sesungguhnya menjadi penentu masa depan sebuah komunitas.

Pekanbaru, November 2012  
Kepala PSW UIN Suska Riau

Dra. Sofia Hardani, M.Ag.  
NIP. 196305301993032001





**AKTUALISASI DIRI PEREMPUAN  
DI RUANG PUBLIK  
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

*Sofia Hardani*



# AKTUALISASI DIRI PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

*Sofia Hardani*

## A. Pendahuluan

**P**erbincangan tentang perempuan sepertinya tidak bisa disudahi selama terdapat pandangan yang dijadikan dogma bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang kurang akal dan agamanya. Pandangan pembodohan tersebut agaknya tidak terlepas dari permasalahan kodrat reproduksi perempuan sebagai pemberian Tuhan yang tentunya tidak bisa diubah oleh manusia, seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Ketika perempuan menjalani masa-masa reproduksi yang demikian mereka membutuhkan energi yang lebih besar dari keadaan biasa. Karena itu, ruang domestik yang “aman” sangat dibutuhkan untuk melewati proses tersebut. Dari sinilah muncul pandangan bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang bertugas mengurus rumah tangga tanpa harus bersosialisasi, meningkatkan pendidikan, mencari nafkah, apalagi ambil bagian di bidang politik.

Kenyataan yang tidak bisa ditampik, bahwa pada masa sekarang keberadaan perempuan di ruang publik sudah menjadi kebutuhan oleh ruang publik itu sendiri. Banyak sektor pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki

dengan baik, tetapi dapat dilakoni oleh perempuan dengan sukses. Bahkan banyak bangsa dan negara di dunia yang mengakui kredibilitas dan kapabilitas perempuan dalam bidang politik, dan bahkan dipilih sebagai pucuk pimpinan di negaranya. Umpamanya Yingluck Shinawatra, Perdana Menteri Thailand; Angela Merkel, Kanselir Jerman; Cristina Fernandez de Kirchner, Presiden Argentina; Dilma Rousseff, Presiden Brasil; Julia Gillard, Perdana Menteri Australia; Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia; Sheik Hasina Wajed, Perdana Menteri Bangladesh; Tarja Halonen, Presiden Finlandia; Dalia Grybauskaitė, Presiden Lithuania; dan beberapa orang lainnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sejak Pembangunan Lima Tahun ke-3, boleh dikatakan bahwa upaya meningkatkan kualitas perempuan telah membuahkan hasil yang baik. Ini dibuktikan dengan telah banyaknya perempuan berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, apalagi yang berpendidikan menengah. Telah banyak perempuan yang memiliki kecerdasan dan ketrampilan, dan telah cukup banyak pula perempuan yang bekerja di berbagai sektor. Akan tetapi, perempuan yang mendapatkan peluang di lembaga politik formal, yaitu bidang pekerjaan yang tergolong cukup strategis untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, boleh dikatakan masih sangat sedikit. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat bahwa perempuan yang duduk di lembaga politik formal di Indonesia terdiri dari: 9,2% duduk di MPR, 8,8% duduk di DPR, 14,8% di MA, 0% di BPK, 4,4% di DPA, 18,1% di KPU, 0% gubernur, 1,5% walikota/bupati,

---

<sup>1</sup><http://news.detik.com/read/2011/08/27/082858/1712297/1148/12-pemimpin-perempuan-paling-berpengaruh-di-dunia-saat-ini>, diunduh 4 Juli 2012

7,0% menduduki eselon IV dan III, 16,2% hakim, dan 23,4% di PTUN.<sup>2</sup>

Hasil Pemilu 2009, dari sejumlah 560 anggota legislatif, 99 diantaranya adalah perempuan (17,7%). Di Riau, dari 55 orang anggota legislatif, 10 orang diantaranya adalah perempuan.<sup>3</sup> Di jajaran Pemerintah Provinsi Riau, dari 38 dinas/instansi yang ada, 3 diantaranya dikepalai oleh perempuan, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan RSUD Arifin Ahmad.

Meski perempuan yang menduduki lembaga politik formal masih sedikit jumlahnya, sesungguhnya mereka dapat memberi inspirasi bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di ranah publik, semisal dunia politik formal diatas. Memang, secara kultural, perempuan yang mengaktualisasikan dirinya di lembaga politik formal mengalami kendala-kendala kultural atau beragam hambatan dalam ranah publik dan pribadi, yang secara politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, menomorduakan perempuan. Begitu juga secara individu, mereka juga menghadapi berbagai kendala, antara lain: peranan alamiah perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam sudut pandang budaya yang sempit menyebabkan prospek kerja perempuan belum memperoleh dukungan masyarakat; rasa bersalah karena adanya perasaan telah menelantarkan keluarga; dan

---

<sup>2</sup>Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2007, hal. 33

<sup>3</sup>Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Prov. Riau 2009-2014

sikap konvensional dari suami yang beranggapan bahwa tugas perempuan adalah dalam rumah tangga sebagai istri dan ibu.<sup>4</sup>

Pandangan-pandangan yang mendomestikasi perempuan seperti diatas sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang terkandung di dalam ajaran agama (Islam), karena dalam ajaran Islam sesungguhnya tidak ada halangan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri di ruang publik. Allah SWT tidak membedakan perlakuan bagi manusia yang berlainan jenis kelamin, kecuali kualitas ketakwaan. Allah menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan tidak membedakan pemberian ganjaran dan pahala diantara keduanya; *“Barangsiapa melakukan kebaikan, laki-laki dan perempuan, dan ia beriman, Kami pasti memberikan kehidupan yang menyenangkan, dan Kami akan memberikan pahala sesuai dengan kebaikan yang mereka lakukan.”*(QS An-Nahl, 16: 97).

Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman:

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, yang sabar, yang khusyu’, menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”*(QS. Al-Ahzab, 33: 35)

Realitas sejarah tentang seorang perempuan yang berhasil mengaktualisasikan dirinya di ruang publik sebagai pemimpin bangsanya yang adil bijaksana, yaitu Ratu Balqis,

---

<sup>4</sup>Nurmi Chatim, “Kiat Sukses perempuan Karier Tanpa Meninggalkan Peran Ibu Sebagai Ibu Rumah Tngga,” di kutip dari H. M. Autho Muzhar dkk (ed.) *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 301

terukir sempurna di dalam kitab suci Al-Qur'an. Perempuan ini mampu membawa negara yang dipimpinnya menjadi negara yang makmur, mempunyai peradaban yang maju, dan disegani. Realitas sejarah yang termaktub dalam Kitab Suci ini mampu kiranya membuka hati dan pikiran siapapun tentang paradigma domestikasi perempuan yang tidak berdasar.

## **B. Konsep Aktualisasi Diri**

Rogers dalam Schultz (1991) menyebutkan bahwa aktualisasi adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar, khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu (adulensi) seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis.<sup>5</sup>

Menurut konsep Hirarki Kebutuhan Individu Abraham Maslow (dalam Schultz, 1991), manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan universal dan dibawa sejak lahir. Kebutuhan ini tersusun dalam tingkatan-tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi. Kebutuhan paling rendah dan paling kuat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum muncul kebutuhan tingkat selanjutnya. Kebutuhan paling tinggi dalam hirarki kebutuhan individu menurut Maslow adalah Aktualisasi Diri.

---

<sup>5</sup> Dikutip dari Oktavianus Ken M. <http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=13.0>



Dengan demikian, prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah memuaskan empat kebutuhan yang berada dalam tingkat yang lebih rendah,<sup>6</sup> yaitu:

- a. kebutuhan-kebutuhan fisiologis,
- b. kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman,
- c. kebutuhan-kebutuhan akan memiliki dan cinta, dan
- d. kebutuhan-kebutuhan penghargaan.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut, paling tidak sebagian-nya, dipuaskan dalam urutan ini, sebelum timbul kebutuhan akan aktualisasi diri.

Kebutuhan aktualisasi diri seperti diungkapkan di atas jelas merupakan suatu kondisi puncak dari perkembangan individu. Pada awalnya Maslow menyatakan bahwa orang-orang yang teraktualisasi diri hanya terdapat pada orang-orang berusia lanjut, cenderung dipandang sebagai suatu keadaan puncak atau keadaan akhir suatu tujuan jangka panjang, bukan sebagai suatu proses dinamis yang terus-menerus. Namun Maslow juga menyatakan bahwa orang-orang muda tidak dapat mengaktualisasikan diri sepenuhnya, tetapi memiliki kemungkinan untuk memperlihatkan pertumbuhan baik ke arah aktualisasi diri.

Aktualisasi diri tentunya dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kesuksesan. Ada beberapa kiat sukses yang perlu dicermati dan diaplikasikan yang menyertai upaya aktualisasi diri sbb.;<sup>7</sup> a) Beribadah dengan cara yang benar, b) berakhlak baik, c) belajar tiada henti, d) bekerja

---

<sup>6</sup> <http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=13.0>

<sup>7</sup> Arnie, <http://kwsbam.com/?p=213>, April 2009

dengan 5 AS (kerja kerAS, kerja cerdAS, kerja kualitAS, kerja tuntAS, kerja ikhlAS), e) bersahaja dalam hidup, f) bantu sesama, dan g) selalu membersihkan hati.

Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan prasyarat yang harus dipertimbangkan dalam upaya aktualisasi diri agar tidak kehilangan nilai-nilai yang semestinya dipelihara.

### **C. Aktualisasi Diri Perempuan Perspektif Perundang-undangan di Indonesia**

Dalam tata hukum kenegaraan di Indonesia, kebijakan pembangunan seringkali sarat dengan maskulinisme. Akibatnya, di era otonomi yang ingin menyukkseskan pembangunan di segala bidang ini, pembangunan sumber daya manusia, khususnya perempuan, menjadi terhambat, bahkan boleh jadi perempuan menjadi beban pembangunan. Hal ini jelas akan merugikan semua pihak. Marginalisasi perempuan dalam dunia publik, seperti dalam proses politik dan tata pemerintahan, secara langsung akan berpengaruh terhadap penyelesaian berbagai isu sentral perempuan, seperti masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan serta rendahnya kemampuan sumber daya perempuan karena akses yang terbatas pada pendidikan dan pelatihan.

Sejak tahun 1984, melalui Undang-Undang No.7, Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ternyata hingga kini jumlah perempuan yang berada di lembaga legislatif dan yudikatif serta eksekutif masih minim, tidak mencapai 15 persen. Kemudian pada tahun 1994, saat Konferensi Perempuan Sedunia di Beijeing, dunia kembali

mendukung upaya-upaya menjamin hak reproduksi dan keadilan serta kesetaraan gender, Indonesia pun ikut menyaksikan konferensi tersebut.

Pada tahun 1998, pemerintah RI membentuk Komisi Preproduksi melalui Keputusan Menteri (Meneg. PP) Nomor 433/1998, kemudian juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Kepres Nomor 181 tahun 1998. Langkah pemerintah yang paling menonjol dalam mengupayakan kesetaraan gender adalah ketika merumuskan GBHN pada 1998 (Tap MPR/II/MPR/1998) maupun merumuskan GBHN 1999-2004 (Tap MPR/IV/MPR/1999). Pada GBHN 1998 disebutkan bahwa perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang dan tingkatan.

Semangat itu lebih dikuatkan pada 1999 lewat GBHN 1999-2004 yang meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi ternyata, semua hal tersebut baru rencana “muluk” di atas kertas. Hingga kini perempuan Indonesia masih jauh tertinggal dibanding laki-laki, khususnya di bidang politik.

Memperhatikan kondisi objektif rendahnya peran perempuan di sektor publik saat ini, bukan semata-mata mereka tidak mendapatkan kesempatan, tetapi lebih disebabkan oleh kekuarangan pemahaman mereka tentang posisi dan haknya sebagai makhluk sosial, anggota masyarakat. Penyebab hal ini, adalah faktor budaya yang

sejak lama menanamkan persepsi bahwa dunia politik adalah dunia kekuasaan yang identik dengan laki-laki. Akan tetapi, dengan adanya sebagian perempuan yang mempunyai kesempatan berada di lembaga politik formal, mestilah dapat memberikan inspirasi bagi kaumnya tentang perlunya upaya aktualisasi diri melalui pengasahan bakat, minat, pengembangan pendidikan, mengasah kemampuan, dan sebagainya, agar menjadi orang yang dapat dijadikan mitra kerja bagi laki-laki, khususnya di sektor publik.

Menurut Lely Zailani, agar perempuan dapat meningkatkan partisipasinya dalam kehidupan publik serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di wilayah formal maupun informal, mereka harus mempunyai cita-cita agar terjadi perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Cita-cita ini akan tercapai apabila ada perubahan pola pikir dan keyakinan bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan sama tinggi dan terhormatnya dengan martabat kemanusiaan laki-laki. Perjuangan untuk mengakhiri berbagai bentuk perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan terus-menerus dan dipimpin, terutama oleh kaum perempuan itu sendiri, dan menjadi bagian dari perjuangan bersama (perempuan dan laki-laki) untuk keadilan sosial.<sup>8</sup>

Dengan demikian, keikutsertaan perempuan di sektor politik merupakan keharusan demi terwujudnya kesetaraan dan keseimbangan dalam kehidupan. Karena perempuan juga merupakan sumber daya manusia yang patut diper-

---

<sup>8</sup>Lely Zailani, <http://www.berpolitik.com>

hitungkan, ditambah dengan kondisi jumlah mereka yang lebih banyak dari laki-laki.

#### **D. Perempuan dalam Sejarah Budaya Kuno: Pemasangan Aktualisasi Diri ?**

Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, kaum perempuan tidak berdaya dalam menghadapi budaya patriarkhi dan androsentris yang ada. Meskipun, pada masanya, ada beberapa perempuan yang berhasil memegang tampuk kekuasaan politik bangsanya dan berjuang membela hak-hak kaum perempuan dengan caranya. Misalnya:

##### **1. Hatshepsut (1508-1458 SM)**

Hatshepsut adalah *pharaoh* yang kelima dari dinasti ke-18 Mesir Kuno. Ia salah seorang perempuan yang paling berpengaruh pada masa Sebelum Masehi. Kepemimpinannya paling lama di antara pemimpin perempuan yang pernah berkuasa dalam sejarah Mesir kuno. Ia dinikahi saudara tirinya yang sakit-sakitan, Thutmose II. Thutmose II meninggal dan Hatshepsut terus berkuasa sendiri sampai kematiannya pada 1458 SM. Ia digambarkan sebagai penguasa Mesir kuno yang berhasil membangun negaranya, dan juga sukses di bidang militer.<sup>9</sup>

##### **2. Ratu Theodora (500 M-548 M)**

Theodora adalah istri Kaisar Justinian, penguasa imperium Byzantium. Ia adalah salah satu perempuan yang paling berpengaruh pada abad pertengahan. Sebelum menjadi istri Kaisar Justinian I, ia adalah seorang aktris dan

---

<sup>9</sup> <http://anjarlinux.staff.uns.ac.id/2008/12/04/10-perempuan-paling-berpengaruh-dalam-sejarah/>

menjadi simpanan para bangsawan. Kemudian dia bertobat dan meninggalkan gaya hidupnya. Meskipun seorang ratu, namun dia boleh dibilang lebih tangguh daripada suaminya. Ketika pecah pemberontakan di Nika, Constantinopel, karena korupsi dan pajak yang tinggi, justru Theodora lah yang menahan kaisar agar tidak melarikan diri. Ia mengatur strategi sehingga pemberontakan berhasil dipadamkan. Berkat Theodora pula pembangunan Constantinople digalakkan dan menjadi kota terancang pada masa itu. “Hagia Sophia” yang dibangun antara 532 M dan 537 M dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur Byzantine yang luar biasa.

Theodora juga mewujudkan tegaknya hak-hak kaum perempuan. Ia membuat undang-undang yang melarang pelacuran paksa, dan ia menutup rumah-rumah bordil. Theodora tampil sebagai ‘pendekar pembela hak para perempuan’. Melalui undang-undang, ia memberi perempuan hak kepemilikan harta gono-gini lebih banyak saat bercerai, memberi hak asuh anak, memberlakukan hukuman mati pada pemerkosa, serta melarang pembunuhan seorang istri yang melakukan perzinaan. Kehidupan kaum perempuan seolah dijamin keamanannya selama Theodora berkuasa. Ia meninggal karena kanker pada 28 Juni, 548 M.<sup>10</sup>

### 3. Ratu Wu Zetian (625 M–705 M)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Baca a.l.: <http://anjarlinux.staff.uns.ac.id/2008/12/04/10-perempuan-paling-berpengaruh-dalam-sejarah/>

<sup>11</sup><http://memantau.blogspot.com/2012/07/perempuan-perempuan-paling-berkuasa-dalam.html>

Wu Zetian adalah salah satu perempuan yang paling kuat dalam sejarah Cina. Wu Zetian hidup pada masa Dinasti Tang. Ia lahir dari keluarga kaya dan terhormat dan juga sangat berpendidikan. Suatu hal yang lumrah pada waktu itu, di usianya yang ke-13 Wu Zetian dijadikan salah satu selir Kaisar Taizong. Namun pada tahun 649 M, Kaisar Taizong meninggal dan digantikan oleh Kaisar Gaozong. Gaozong mengusir Wu Zetian untuk menjadi seorang biarawati Buddha. Namun, dalam pernikahan Gaozong dengan istrinya, terjadi suatu masalah sehingga memberi kesempatan bagi Wu Zetian untuk kembali ke istana. Setelah Wu Zetian kembali ke istana, Gaozong mulai jatuh cinta padanya. Akhirnya Gaozong mengusir istrinya dan menikahi Wu Zetian. Istri Gaozong tidak bisa menerima kenyataan tersebut sehingga memberontak, namun Wu Zetian memerintahkan agar mantan istri Gaozong dieksekusi dengan membuat tuduhan palsu.

Sebagai permaisuri, Ratu Wu Zetian menjadi sangat kuat dan bahkan sangat mempengaruhi Gaozong dalam membuat segala keputusan. Kaisar Gaozong akhirnya meninggal pada tahun 683 M.

Pada tahun 690 M, Wu Zetian menobatkan dirinya menjadi Kaisar Cina dan menciptakan Dinasti Zhou. Wu Zetian adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Cina yang pernah memerintah sebagai seorang Kaisar. Meskipun jalan hidupnya penuh dengan kekejaman dan kecurangan untuk mendapatkan kekuasaan, namun, masa pemerintahannya membawa kesuksesan yang besar.

Wu Zetian adalah salah satu tokoh berpengaruh dalam penyebaran agama Buddha di Cina. Wu Zetian membuat

agama Buddha menjadi agama resmi Cina, menggantikan ajaran Taoisme. Wu Zetian juga berhasil menurunkan pajak yang tinggi dan meningkatkan produksi pertanian. Wu Zetian meninggal pada tahun 705 M di usianya yang ke-80.

Selain perempuan-perempuan yang disebutkan di atas, ada beberapa perempuan lain pada abad-abad setelahnya yang berhasil dalam kehidupan publiknya, misalnya saja Ratu Eleanor dari Aquitaine (1122-1204),<sup>12</sup> Maria Theresa dari Austria (1717-1780),<sup>13</sup> dan beberapa yang lainnya. Artinya

---

<sup>12</sup>Eleanor adalah salah satu wanita terkaya dan terkuat di Eropa pada abad pertengahan. Ayahnya adalah raja dari Aquitaine yang merupakan provinsi terbesar dan terkaya di Prancis pada abad ke-12. Ketika berusia 15 tahun, Eleanor telah mewarisi tahta dari ayahnya ketika ayahnya meninggal. Eleanor lahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Di bawah pemerintahan Eleanor, Aquitaine menjadi salah satu pusat intelektual dan kebudayaan terbesar di Eropa Barat. Pada tahun 1137, Eleanor menjadi Permaisuri Louis VII dari Prancis. Setelah menjadi istri Louis VII, Eleanor ikut berpartisipasi dalam Perang Salib Kedua (1147) dan ikut bepergian ke Kekaisaran Byzantium. Ia juga merupakan tokoh utama dalam perjanjian dagang antara Eropa Barat, Constantinople, dan Tanah Suci. Eleanor menceraikan Louis VII (tahun 1152) dan 2 tahun kemudian menikah dengan Henry II dari Inggris. Namun pada tahun 1170, Thomas Becket, Uskup Agung Canterbury, dibunuh karena melawan Raja Henry II. Eleanor sangat menentang pembunuhan itu. Sehingga meletuslah sebuah Revolusi pada tahun 1173-1174. Dalam revolusi ini, Eleanor bersekutu dengan ketiga putranya beserta para pemberontak melawan Raja Henry. Pemberontakan mengalami kegagalan, dan Eleanor dipenjara selama 16 tahun. <http://memantau.blogspot.com/2012/07/wanita-wanita-paling-berkuasa-dalam.html>.

<sup>13</sup>Maria Theresa mewarisi takhta sebagai permaisuri di Habsburg, Eropa, pada tahun 1740. Ia menggantikan ayahnya, Kaisar Romawi, Charles VI. Ketika Maria berkuasa, Frederick II dari Brandenburg (Prussia) menyerang provinsi Habsburg karena Frederick menolak mengakuinya sebagai pewaris sah takhta. Frederick mempengaruhi negara-negara lain seperti Bavaria, Prancis, dan Spanyol untuk menyerang Habsburg, sedangkan Maria bersekutu dengan Hungaria untuk bertahan dari serangan Frederick. Dengan dukungan Hungaria, Maria dapat memukul mundur pasukan yang menyerang Habsburg. Perang ini berakhir pada



adalah bahwa pada setiap dekade terdapat perempuan-perempuan yang berhasil dalam kehidupan publiknya, di tengah budaya pemarjinalan, pelecehan hak, dan upaya pendiskreditan lainnya.

Dalam kebudayaan Yunani kuno, misalnya, salah satu negara yang dianggap maju kebudayaannya pada waktu itu, perempuan tidak mempunyai hak apapun selain sebagai objek nafsu laki-laki. Bahkan, Aristoteles pernah mengutuk bangsa Asbarata karena dianggap terlalu banyak memberi kemudahan bagi perempuan yang digauli dan memberikan hak kepada mereka melebihi ukuran yang lazim. Dalam Undang-Undang Yunani Kuno, kaum laki-laki dibolehkan menikahi atau memiliki perempuan tanpa batasan jumlah, dan mereka dibagi kepada tiga kelompok: istri-istri sah, istri setengah sah, dan perempuan yang hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu. Perempuan benar-benar dihalangi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi untuk mengadakan aktifitas sosial.<sup>14</sup>

Dalam budaya Romawi, kaum perempuan mengalami nasib yang sama buruknya. Poligami bagi mereka merupakan

---

tahun 1748 dengan penandatanganan Perjanjian *Aix-la-Chapelle*. Diantara kesuksesan yang dibawa Maria adalah dalam bidang ekonomi dan politik kerajaan Hapsburg. Maria memperbanyak jumlah tentaranya hingga 200 persen. Ia menetapkan kenaikan pajak untuk menjamin penghasilan tetap bagi pemerintah, khususnya dalam bidang militer. Maria juga pelopor dari Revolusi Diplomasi pada tahun 1756. Melalui Revolusi Diplomasi ini, Maria mengajak Prancis untuk bersekutu membantunya melawan Prusia dan Inggris. Ia juga merupakan salah satu tokoh dalam era Pencerahan. Maria sangat fokus dalam hal pendidikan dan politik liberal. Ia mendirikan Akademi Sains Imperial dan Royal dan juga fakultas Sastra di Brussel, serta pengembangan medis di Universitas Wina. Lihat, *Ibid*.

<sup>14</sup>Lihat Sayed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, (London: University Paperbacks, tth.) hal. 222-223

kebiasaan yang turun temurun dan dibanggakan. Perkawinan bukanlah hal penting, tetapi hanya suatu rutinitas yang tak berarti. Ungkapan mereka bagi perempuan: “ikatannya tak akan putus dan belenggunya tak akan lepas”. Poligami tanpa batas juga dilegalisasi pada masyarakat Hindu, Madiyyin, Babilonia, Asyuwariyyin, dan Parsi. Dalam masyarakat India, seorang perempuan tidak mempunyai hak apapun juga, bahkan hak untuk hidup. Jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ia harus rela dibakar hidup-hidup, menceburkan dirinya kedalam api yang membakar mayat suaminya.

Ahmad Ajaif, seorang penulis Turkistan, mengatakan bahwa dalam masyarakat Parsi, yang dianggap berkebudayaan tinggi, kedudukan perempuan tak ada beda dengan budak. Selama hidup mereka terkurung dalam tembok rumahnya atau rumah suaminya. Mereka dapat keluar rumah jika diperjualbelikan di pasar. Bangsa Parsi memberikan kekuasaan penuh kepada laki-laki untuk mengawini siapa saja yang ia sukai, bahkan ibu, bibi, dan saudara-saudaranya sendiri. Seorang perempuan akan terusir dari rumahnya ketika sedang haid. Mereka ditempatkan di tenda-tenda yang disebut *dakhimi* di luar kota, dan baru boleh kembali jika sudah suci. Jika suami merasa perlu melihat istrinya, maka mereka menyumbat lubang telinga dan hidung, melapisi tangan dengan kain.<sup>15</sup>

Masyarakat Rumania, menjelang keruntuhan kerajaan besar yang menganut ajaran Masehi ini, mempunyai

---

<sup>15</sup>Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, terjem. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 74-75

kecendrungan hidup mewah dan menganut seks bebas. Perempuan pada waktu itu bebas keluar rumah untuk bersenang-senang dan bergaul dengan lelaki manapun yang ia sukai. Keadaan demikian akhirnya memunculkan paham zuhud dan membenci keturunan, karena jasad dan keturunan dianggap najis. Mereka mengutuk kaum perempuan, dan beranggapan bahwa menjauhi perempuan adalah kebaikan dan mendapat pahala. Sebagian berpendapat bahwa kaum perempuan adalah jasad dan ruh yang mengajak kepada kehancuran, dan sebagian lagi berpendapat bahwa perempuan menjauhkan dari keuntungan dan keselamatan. Mereka mencela semua perempuan keturunan Hawa, kecuali Maryam.<sup>16</sup>

Demikian pula dalam kebudayaan Arab pra-Islam, penguburan bayi perempuan hidup-hidup dipandang sebagai perbuatan yang paling keji dalam sejarah moralitas dan kemanusiaan. Padahal sebagian bangsa Arab menganggap hal itu sebagai suatu kebanggaan.

Setelah datang syari'at Islam, sebagian sahabat Nabi masih ada yang sulit meninggalkan kebiasaan membenci anak perempuan. Amru bin Ash pernah berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Muawiyah sedang menggendong bayi perempuannya: *"Jauhkan ia dari tanganmu, demi Allah, sesungguhnya anak perempuan hanya akan melahirkan banyak musuh, mendekatkan orang-orang yang asing bagi kita, dan selalu menyebabkan permusuhan dan perselisihan."* Akan tetapi Muawiyah mengingatkan Amru bin

---

<sup>16</sup> Al-'Aqad, Ustadz Abbas Mahmud, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, (Kairo: ttp., tth) hal. 54-56

Ash: “Demi Allah, tidak ada orang yang merawat orang sakit, tidak ada orang yang meratapi keluarga yang kematian, dan tidak ada orang yang mau menolong dan menemani orang yang sedang sedih seperti perempuan. Betapa banyak kemenakan perempuan yang memberikan manfaat bagi pamannya.”<sup>17</sup>

Kehidupan terus berjalan, dan perkembangan peradaban dan intelektualitas manusia sedikit-demi sedikit mengubah tatanan yang ada menjadi spirit bagi kebangkitan dan kemajuan perempuan.

Gerakan perempuan (*women movement*) yang telah berkembang menjadi banyak aliran (seperti: *Liberal Feminisme*, *Radikal Feminisme*, *Marxisme Feminisme*, dan *Feminisme Sosialis*) sesungguhnya berasal dari suatu asumsi, yaitu ketidakadilan, adanya proses penindasan dan eksploitasi. Meskipun pada proses berikutnya terjadi perbedaan paham mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun sesungguhnya ada kesamaan paham bahwa hakikat perjuangan perempuan adalah demi kesamaan, *equality*, *dignity*, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan.

Dengan keyakinan tersebut, dalam rangka mewujudkan struktur masyarakat yang lebih adil dan makmur, maka perempuan dan laki-laki harus bergerak dan berjuang bersama menuju pemerdekaan-pemerdekaan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang *differensiasi* antara manusia dengan manusia.

---

<sup>17</sup>Lihat, *Ibid.* hal. 56

#### 4. Strategi Aktualisasi Diri Perspektif Islam

Secara spesifik, ada beberapa strategi aktualisasi diri yang perlu digali menurut pandangan Islam, sebagai berikut.

##### a. Pengembangan Potensi Diri melalui Belajar

Islam menganjurkan untuk mengembangkan potensi diri melalui belajar. Dalam surat ar-Rahman, Allah SWT menjelaskan bahwa diri-Nya adalah pengajar (*'Allamahu al-Bayan*) bagi umat Islam. Ayat pertama yang diturunkan Allah SWT adalah surat al-'Alaq. Di dalam ayat itu Allah SWT memerintahkan umatnya untuk membaca dan belajar. Allah mengajar manusia dengan *qalam* – yang sering diartikan dengan pena. Akan tetapi sebenarnya kata *qalam* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Kata *qalam* tidak diletakkan dalam pengertian yang sempit. Sehingga pada setiap zaman kata *qalam* dapat memiliki arti yang lebih banyak.<sup>18</sup> Seperti pada zaman sekarang, komputer dan segala perangkatnya, termasuk internet, bisa diartikan sebagai penafsiran kata *qalam*.

Dalam surat al-'Alaq tersebut Allah SWT memerintahkan manusia agar menerangkan ilmu. Setelah itu kewajiban kedua adalah mentransfer ilmu tersebut kepada generasi berikutnya. Dalam hal pendidikan, ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari firman Allah Swt tersebut; yaitu *pertama*, bahwa manusia harus belajar dan mendapatkan ilmu yang

---

<sup>18</sup>Ayatullah Sayyid Hasan Sadat Mustafawi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Keberadapan Islam*, <http://jumiartiagus.multiply.com/journal/item/138>

sebanyak-banyaknya. *Kedua*, berkenaan dengan penelitian yang dalam ayat tersebut digunakan kata *qalam* yang dapat diartikan sebagai alat untuk mencatat dan meneliti yang nantinya akan menjadi warisan kepada generasi berikutnya.

Dalam ajaran Islam, baik dalam ayat al-Qur'an maupun hadits, disebutkan bahwa ilmu pengetahuan paling tinggi nilainya melebihi hal-hal lain. Bahkan salah satu sifat Allah SWT adalah Maha Mengetahui, dan orang yang tinggi nilainya di hadapan Allah SWT adalah mereka yang berilmu.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Maka bukan hal yang asing jika pada masa itu disebutkan bahwa Islam memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para ilmuwan Islam pada zaman itu. Berawal dari kota Madinah, Spanyol, Cordova dan negara-negara lainnya. Itulah zaman yang dikenal dengan zaman keemasan Islam, walaupun setelah itu Islam mengalami kemunduran. Di zaman itu, negara-negara di Eropa belum membangun perguruan tinggi, akan tetapi negara-negara Islam telah membangun pusat-pusat studi ilmu pengetahuan.

Dalam menuntut ilmu tidak mengenal waktu, dan juga tidak mengenal gender. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, bisa mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah SWT sehingga potensi itu berkembang dan sampai kepada kesempurnaan yang diharapkan. Karena itulah, agama menganggap bahwa menuntut ilmu itu termasuk bagian dari ibadah. Ibadah

tidak terbatas kepada masalah shalat, puasa, haji, dan zakat. Bahkan menuntut ilmu itu dianggap sebagai ibadah yang utama, karena dengan ilmulah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan benar.

#### b. Pengendalian Diri

Islam menghendaki umatnya mampu mengendalikan diri dari sifat pemaarah, kikir, egois, yang diejawantahkan dalam kewajiban shalat dan puasa. Shalat disebut sebagai penjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga kewajiban puasa. Banyak sekali ayat yang tegas dan *muhkam* (*Qathi*) dalam Kitabullah memberikan anjuran untuk berpuasa sebagai sarana untuk *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dan menjelaskan keutamaan-keutamaan, seperti firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat kaum mukminin dan mukminat kaum pria yang patuh dan kaum perempuan yang patuh dan kaum pria serta perempuan yang benar (imannya) dan kaum pria serta perempuan yang sabar (ketaatannya) dan kaum pria serta perempuan yang khusyu dan kaum pria serta perempuan yang bersedeekah dan kaum pria serta perempuan yang berpuasa dan kaum pria dan perempuan yang menjaga kehormatan (syahwat birahinya) dan kaum pria serta kaum perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah

*menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.”*  
(QS. Al-Ahzab: 35)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>ص</sup>

Artinya: “Dan kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 184)

Rasulullah saw telah menjelaskan bahwa puasa adalah benteng dari syahwat dan perisai dari neraka. Allah SWT telah mengkhususkan satu pintu surga untuk orang yang puasa yang bisa memutuskan jiwa dari syahwat menahan dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek hingga menjadi jiwa yang tenang.

Kewajiban pengendalian diri tersebut tidak membedakan gender, tetapi ditujukan kepada semua jenis manusia.

#### c. Etos Kerja

Islam juga menganjurkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja keras dan disiplin dalam pekerjaan. Etos kerja dalam arti luas menyangkut akhlak/etika dalam pekerjaan. Untuk bisa menimbang bagaimana akhlak seseorang dalam bekerja sangat tergantung dari cara melihat arti kerja dalam kehidupan, cara bekerja dan hakikat bekerja. Dalam Islam, iman banyak dikaitkan dengan amal. Dengan kata lain, kerja yang merupakan bagian dari amal tak lepas dari kaitan iman seseorang.

Idealnya, semakin tinggi iman itu maka semangat kerjanya juga tidak rendah. Ungkapan “iman” itu sendiri berkaitan tidak hanya dengan hal-hal spiritual tetapi juga program aksi.



Dalam khasanah Islam, etos kerja dapat dikaitkan dengan padanan kata *ihsan*. Setiap manusia, seperti diungkapkan dalam al-Qur'an, diperintahkan untuk berbuat *ihsan* agar dicintai Allah. Kata *Ihsan* sendiri merupakan salah satu pilar disamping kata Iman dan Islam. Dalam pengertian yang sederhana, *ihsan* berarti ibadah kepada Allah seolah-olah Ia melihat kita meski umatnya tidak melihat-Nya. Ihsan adalah perbuatan baik dalam pengertian sebaik mungkin atau secara optimal. Hal itu tercermin dalam hadis riwayat Muslim yang menuturkan sabda Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Karena itu jika kamu membunuh, maka berihsanlah dalam membunuh itu dan jika kamu menyembelih, maka berihsanlah dalam menyembelih itu dan hendaknya seseorang menajamkan pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya itu.*” (HR.Muslim)

Menurut Nurcholis Madjid, dari konteks hadis itu dapat disimpulkan bahwa *ihsan* berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, bahkan sesempurna mungkin. “Penajaman pisau” itu merupakan isyarat efisiensi dan daya guna yang setinggi-tingginya. Allah sendiri mewajibkan *ihsan* atas segala sesuatu, seperti tercermin dalam al-Qur'an:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۖ

Artinya: Yang membuat baik, sebaik-baiknya, segala sesuatu yang diciptakan-Nya. (QS. As-Sajadah, 32:7).

Selanjutnya Allah SWT juga menyatakan telah melakukan *ihsan* kepada manusia, agar manusia pun melakukan *ihsan*.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia, dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. 28:77).

Dari keterangan hadis dan uraian al-Qur'an jelaslah bahwa setiap muslim harus menjadi seorang pekerja yang profesional. Dengan demikian, ia melaksanakan salah satu perintah Allah untuk berbuat *ihsan* dan juga mensyukuri karunia Allah berupa kekuatan akal dan fisik yang diberikan sebagai bekal dalam bekerja. Mengabaikan potensi akal dan fisik ini atau tidak “menajamkannya” bisa bermakna tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya.

Semua hal yang dikemukakan diatas, baik pengembangan potensi diri, pengendalian diri, dan etos kerja, sekali lagi, tidak dibedakan terhadap jenis kelamin tertentu. Jika terdapat perbedaan dalam kenyataan dan praktek, maka hal tersebut adalah akibat pengaruh pola pikir struktur masyarakat yang berlaku.

Jika disimak ajaran Islam, baik melalui al-Qur'an, Hadits, dan kehidupan sahabat di awal Islam, tidak ada permasalahan ketika perempuan mengaktualisasikan diri di ranah publik, bahkan di lembaga politik, karena seruan untuk berdakwah, melaksanakan *amar ma'ruf nahiyy munkar*, memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan nilai-nilai yang positif adalah sama bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi pemimpin sebagian yang lain. Mereka mengajak berbuat yang makruf dan mencegah yang munkar. Mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk mengakui sikap politik perempuan, antara lain disebutkan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Allah meridhai perempuan ber-*amar ma'ruf nahiyy al-munkar* dan bagi mereka dijanjikan balasan rahmat dan surge (at-Taubah ayat 71 dan 72). Dalam hal berproduksi di bidang ekonomi, perempuan boleh memiliki hasil kerjanya (An-Nisa' ayat 32). Bahkan sosok pribadi Ratu Balqis, penguasa Negeri Saba' yang baik,

dibanggakan Allah SWT, seperti tersirat dalam Surat Al-Naml ayat 23, 32, dan 44.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾  
قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْاَلَمَلُؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾  
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ  
صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

Pada masa kenabian, aktifitas yang dilakukan perempuan di sektor publik dibenarkan Rasulullah. Tidak sedikit para sahabat perempuan ikut berpartisipasi dalam peran-peran politik yang cukup penting. Keluarga dekat Nabi banyak yang ambil bagian dalam urusan publik dan politik. 'Aisyah r.a., istri Nabi, adalah ahli agama dan tempat bertanya bagi sahabat laki-laki maupun perempuan. Ia seorang politikus, sekaligus seorang pekerja sosial di masyarakatnya.

Hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk turut sertanya perempuan dalam mengambil peranan di ranah publik.

Paparan diatas menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri di ruang publik, karena negara maupun ketentuan agama sesungguhnya membuka peluang untuk itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa melaksanakan kewajiban di satu pihak, dan menggunakan hak di pihak lain, dalam kehidupan sosial yang maskulin, membutuhkan strategi yang matang dan

terencana, agar aktualisasi diri menjadi bermakna dan bermanfaat bagi semua pihak.

## 5. Realitas Kisah Ratu Balqis: Pembeneran Al-Qur'an terhadap Aktualisasi Diri Perempuan di Ruang Publik

Fakta sejarah mengungkapkan bahwa kaum perempuan belum pernah mendapatkan penghormatan dan kemuliaan seperti yang mereka dapatkan dari ajaran Islam. Kaum perempuan telah mendapatkan penghinaan dari ajaran-ajaran di luar Islam. Abbas Mahmud Aqqad dalam bukunya *al-Mar-ah fi al-Qur'an*<sup>19</sup> mengatakan bahwa al-Qur'an datang membawa aturan, memberikan hak azasi bagi kaum perempuan yang belum pernah diberikan oleh ajaran ataupun undang-undang apapun sebelumnya. Lebih dari itu, Islam mengangkat derajat dan kedudukan kaum perempuan dari kehinaan menuju keadilan sebagaimana layaknya manusia yang dianggap sebagai anak cucu Adam dan Hawa, suci dari kekejian amalan syaitan dan perilaku kebinatangan.

Salah satu bentuk perhatian al-Qur'an terhadap perempuan adalah pengabdian realitas pentingnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, bahkan politik. Al-Qur'an mencontohkan dengan satu kasus, yaitu Ratu Balqis.

Melalui kisah dalam al-Qur'an, Ratu Balqis adalah seorang penguasa negeri Saba' yang aman sentosa, semasa dengan kerasulan Sulaiman. Ia adalah seorang ratu yang adil dan bijaksana memimpin rakyatnya, begitu pintar dan tajam dalam pemikiran, dan ahli strategi yang ulung dalam

---

<sup>19</sup>Lihat Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, terjem. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 73

mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyatnya. Ini terbukti ketika ia diminta untuk tunduk pada naabi Sulaiman.

Sebagai penguasa kaum pagan (dalam hal ini penyembah mata hari), Ratu Balqis cakap bernegosiasi dengan Nabi Sulaiman. Ketika ia mengakui kekuasaan Nabi Sulaiman, ia tidak serta merta tunduk begitu saja, tetapi secara diplomatis menyatakan bersama Sulaiman tunduk kepada Allah.

Kisah tentang Ratu Balqis<sup>20</sup> sebagai penguasa negeri Saba', dalam al-Qur'an diceritakan dalam surat an-Naml,<sup>21</sup> dan tentang negeri Saba' diuraikan secara panjang lebar pada surat Saba', 34:15 berikut:

*“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan*

---

<sup>20</sup>Ibnu Katsir dalam tasirnya, sebagaimana dikutip Barbara Freyer Stowasser, menyatakan, Balqis adalah anak seorang wazir kerajaan Himyariyah yang ada di Ma'rib Yaman. Ayahnya bernama Dzu Syarahh (sebagian yang menyebutnya Syurahil) ibn Hudad dan ibunya bernama Umairah, anak seorang raja Jin. Lihat. Barbara, *op.cit*, h.158. Kata Saba' dapat berarti wilyah atau negeri sebagai yang ditunjuk oleh al-Qur'an dalam surat an-Naml, dan dapat juga berarti kaum, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Saba'. M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume II, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Cet.ke-2, h. 362

<sup>21</sup>Dalam surat an-Naml (yang berarti semut) dikisahkan tentang semut yang takut melihat kehadiran Sulaiman dan bala tentaranya di lembah mereka. “Wahai semut-semut masuklah ke dalam sarang sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.” Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut, dan ia berdoa, “Wahai Tuhanku berlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.” QS An-Naml/27: 18-19

*di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari nezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya (negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun.*"(QS Saba':15).

Dalam ayat di atas diceritakan tentang negeri Saba' yang aman dan makmur (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) di masa pemerintahan Ratu Balqis. Kerajaan Saba' berdiri pada abad VIII SM, pengaruh kekuasaannya mencakup Ethiopia dan salah satu negeri yang sangat terkenal ketika itu, yaitu Ma'rib dengan bendungan yang sangat besar.<sup>22</sup>

Akan tetapi, meskipun Allah SWT telah melimpahkan begitu banyak anugerah-Nya kepada penduduk Saba', namun mereka tetap ingkar kepada-Nya. Oleh karena itu, Allah mengirimkan banjir yang besar sebagai balasan Allah atas kekufuran mereka. Firman Allah:

*"Lalu mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pepohonan) yang berbuah pahit, pohon Atsal, dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi mereka balasan karena kekafiran mereka, dan kami tidak membalas melainkan kepada orang-orang yang sangat kafir."*(QS. Saba'/34:16-17).

Menurut Ibnu 'Asyur, sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab,<sup>23</sup> terjadinya peristiwa banjir tersebut adalah setelah masa Ratu Balqis yang telah menganut ajaran agama yang diajarkan Nabi Sulaiman. Sepeninggal ratunya yang adil itu, kaum Saba' kembali menjadi kaum yang ingkar. Lalu Allah menghancurkan mereka melalui bencana banjir besar setelah runtuhnya bendungan Ma'rib.

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, *Op.cit*, hal. 363

<sup>23</sup>*Ibid.*

### *Berita dari Seekor Burung*

Kisah tentang Ratu Balqis dalam al-Qur'an terkait dengan kisah kerasulan Nabi Sulaiman a.s.<sup>24</sup> Informasi tentang Ratu Balqis yang berkuasa di negeri Saba' ini diterima Nabi Sulaiman secara tidak diduga dari burung Hud-hud,<sup>25</sup> yang merupakan bagian dari bala tentara kerajaan Nabi Sulaiman. Dikisahkan, ketika Nabi Sulaiman mengadakan inspeksi terhadap pasukannya dalam suatu perjalanan, dan memeriksa barisan burung-burung, Sulaiman tidak mendapati burung Hud-hud. Lalu ia bertitah, "Sesungguhnya aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksa yang pedih atau aku benar-benar akan menyembelihnya kecuali

---

<sup>24</sup>Nabi Sulaiman adalah seorang Raja Bani Israil yang kekuasaannya berpusat di Palestina. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan atas Bani Israil dari ayahnya nabi Daud. Ia dikaruniai oleh Allah mukjizat dapat berkomunikasi dengan burung, serangga, dan binatang-binatang lain. Bala tentara kerajaannya terdiri dari manusia, jin, dan burung. Lebih lanjut lihat al-Qur'an surat an-Naml:27 ayat 15-19

<sup>25</sup>Burung Hud-hud adalah sejenis merpati yang dapat dilatih untuk membawa surat atau barang-barang ringan dengan cara menjepitnya dengan paruh (untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh) atau mengikatkan pada kaki atau bagian tubuhnya. Sayyid Quthub menguraikan perihal burung Hud-hud sebagaimana dikutip oleh M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah; Hud-hud merupakan salah satu anggota bala tentara Nabi Sulaiman. Ia memiliki kemampuan dan keistimewaan yang melebihi jenis burung yang lain. Ini terlihat dengan jelas dalam kisah di atas bahwa ia dapat mengetahui situasi kerajaan Saba', serta keadaan masyarakatnya, pengetahuan yang hanya dapat dijangkau oleh manusia yang berakal, suci dan bertakwa. Hud-hud terbut merupakan suatu karunia dan mukjizat dari Allah. Begitu istimewanya burung Hud-hud ini sehingga Nabi Sulaiman ketika menginspeksi pasukannya yang sangat besar, dengan begitu jeli tidak menemukan keberadaannya. Tentu saja si burung Hud-hud ini merupakan sosok yang penting dalam bala tentara tersebut. Ini dibuktikan dengan laporannya yang begitu pintar tentang negeri Saba' yang ia jumpai. *Ibid*, 214—215 dan 217-218



jika benar-benar dia datang kepadaku dengan bukti yang jelas,<sup>26</sup> yakni alasan yang jelas yang dapat diterima.<sup>27</sup>

Tak lama setelah itu, burung Hud-hud datang, membawa berita yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman sebelumnya, yaitu tentang negeri Saba' yang diperintah oleh seorang perempuan, yang konon bernama Balqis binti Syurahil. Sang ratu dianugerahi segala sesuatu yang dapat menjadikan kekuasaannya langgeng, kuat, dan besar, antara lain tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil. Sang Ratu mempunyai singgasana yang besar sebagai cerminan kehebatan kerajaannya,<sup>28</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah:

*"Maka tidak lama kemudian burung Hud-hud berkata "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari Saba' suatu berita yang meyakinkan. Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar."(QS an-Naml, 27: 22-23)*

Setelah menjelaskan keunggulan kerajaan Saba' secara material, burung Hud-hud kemudian menguraikan kelemahannya secara spiritual, bahwa Sang Ratu dan kaumnya beribadah dengan cara menyembah mata hari:

---

<sup>26</sup>Hal ini sebagaimana yang disitir dalam al-Qur'an: *"Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata,"Mengapa aku tidak melihat Hud-hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sesungguhnya aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksa yang pedih atau aku benar-benar akan menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan bukti yang terang." (QS an-Naml, 27: 21)*

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 10, Jakarta: Lentera hati, 2004, Cet.ke-2, h. 209

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 211-212

*“Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah: dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Agar mereka tidak menyembah Allah. Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar.” (QS an-Naml, 27: 24-26)*

Setelah mendengarkan laporan dari burung Hud-hud tentang keyakinan bangsa Saba', bangsa sebuah kerajaan besar dan kuat, yang berada tidak jauh dari pusat kekuasaan Nabi Sulaiman di Palestina, Sulaiman selaku nabi dan rasul yang bijaksana tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Untuk mengklarifikasi berita yang dibawa oleh burung Hud-hud, serta guna memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang masyarakat yang diceritakan oleh burung Hud-hud tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan burung Hud-hud untuk membawa suratnya kepada bangsa Saba', lalu mencari tahu apa yang mereka diskusikan menyangkut isi surat itu (QS an-Naml, 27: 27-28).

### *Strategi Ratu Balqis*

Burung Hud-hud berangkat ke negeri Saba' membawa surat dari Nabi Sulaiman, dan menjatuhkan surat itu kepada sang ratu, yang langsung membuka dan membacanya. Menyikapi surat tersebut, Ratu Balqis mengumpulkan para pejabat istana dan para penasehatnya untuk bermusyawarah tentang ajakan Nabi Sulaiman untuk berserah diri, memeluk

agama tauhid.<sup>29</sup> Ratu Balqis berdiskusi dengan pembesar istana tentang bagaimana sebaiknya menanggapi surat tersebut:

*“Berkata Balqis: “Hai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam urusan ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku).” Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada ditanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan.” Dia (Balqis) berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan ini.” (QS an-Naml, 32-35)*

Ayat diatas menunjukkan betapa besar usaha Ratu Balqis untuk mengungkap apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman sehingga ia mengadakan musyawarah dengan para petinggi kerajaannya untuk meminta pendapat dan pandangan mereka. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya serta mengingat kehancuran dan penderitaan rakyat yang akan terjadi akibat peperangan melawan Sulaiman -- karena lumrahnya, apabila raja-raja memasuki suatu negeri, negeri itu akan dibinasakan dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, maka Ratu Balqis terlebih dahulu mencoba jalan damai berupa

---

<sup>29</sup>Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an: *“Berkata Balqis: “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” (QS an-Naml, 27: 29-31)*

mengirim utusan kepada Sulaiman dengan membawa hadiah, dan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan tersebut.

Balqis terlebih dahulu menguji kebenaran Sulaiman. Apabila Sulaiman seorang nabi tentulah ia akan menolak hadiah tersebut. Sebaliknya, jika Sulaiman mengambil hadiah tersebut tentulah ia bukan seorang nabi<sup>30</sup>. Dengan demikian, Ratu Balqis mengulur waktu untuk melihat tanggapan Sulaiman dan memikirkan lebih lanjut tentang langkah yang akan diambil, antara berperang atau damai.

Firasat Ratu Balqis tentang kenabian Sulaiman begitu kuat, karena Sulaiman menolak hadiah-hadiah yang dibawa oleh utusannya. Penolakan Nabi Sulaiman tersebut diceritakan Allah sebagai berikut:

*“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah patut kamu menolong aku dengan harta?, maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari pada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba’ dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina.” (QS an-Naml, 36-37)*

Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pimpinan rombongan kerajaan Saba’ untuk kembali kepada masyarakat mereka dan ratu mereka serta orang-orang yang taat kepadanya. “Sungguh kami bersumpah bahwa kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka

---

<sup>30</sup>Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001, Cet. Ke-1, h. 80

dari negeri Saba' dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina, menjadi tawanan-tawanan perang. Ini tentu saja bila mereka tidak datang dan patuh pada kami.”<sup>31</sup>

Al-Qur'an tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah penolakan hadiah Ratu Balqis tersebut. Namun dapat diasumsikan bahwa utusan kerajaan Saba' tersebut menyampaikan hasil pertemuannya dengan Sulaiman kepada sang ratu. Sebagian riwayat menyatakan bahwa menyadari bahaya yang akan mengancam kelangsungan kerajaannya, maka Ratu Balqis menyurati Sulaiman bahwa ia akan mendatangi kerajaan Sulaiman.

Cerita selanjutnya, Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana Ratu Balqis diangkut ke kerajaannya di Palestina sebelum rombongan mereka sampai:

*“Berkata Sulaiman: ”Hai para pembesar, siapakah diantara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: ”Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.” Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab: ”Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata: ”Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.” (QS an-Naml, 38-40)*

---

<sup>31</sup>Quraish Shihab, Vol 10, *op.cit*, h. 222

Ayat diatas menceritakan bahwa perintah Nabi Sulaiman disanggupi oleh Ifrit<sup>32</sup> dan “seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab.”<sup>33</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa permintaan Nabi Sulaiman itu bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis betapa besar kekuasaan dan anugerah Allah SWT yang telah dikaruniakan-Nya kepada Nabi Sulaiman agar mereka sadar akan kelemahan serta ketidakberdayaannya, untuk kemudian tunduk menyembah Allah.

Tatkala singgasana Balqis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman, ia memerintahkan untuk memberikan sedikit perubahan pada singgasana tersebut. Sulaiman berkata: *”Ubahlah baginya singgasana, maka kita akan melihat apakah dia mengenalnya atautkah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya.”* Dan ketika ratu itu datang, Nabi Sulaiman bertanya: *”Serupakah ini dengan singgasanamu?”* Balqis menjawab, *”Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.”*

---

<sup>32</sup>Ifrit adalah bangsa Jin yang kuat dan cerdik. Kata Ifrit menurut Quraish Shihab berarti yang sangat kuat lagi sangat cerdas dan tidak dapat dcederai, juga tidak dapat dikalahkan. Jika digunakan untuk manusia berarti mempersamakannya dengan makhluk halus tersebut. *Ibid*, h. 224

<sup>33</sup>Para ulama berbeda pendapat tentang seorang tokoh “yang mempunyai ilmu dari al-Kitab” tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah Ashif ibn Barkhiya yang merupakan seorang ulama bani Israil yang juga adalah salah seorang menteri Nabi Sulaiman. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia adalah nabi Khidir atau bahkan malaikat Jibril. *Ibid*, h. 226. Namun dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kemampuannya yang luar biasa tersebut berdasarkan ilmu dan hikmah yang diperolehnya bersumber dari Kitab Allah.

Kelihatannya, apa yang disembah Ratu Balqis selama ini selain Allah mencegahnya untuk segera menunjukkan ketauhidannya. Ketika melihat lantai istana yang terbuat dari kaca yang bening, dan konon di bawahnya mengalir air, yang di dalamnya terdapat sejenis aquarium yang dihiasi oleh ikan-ikan, Balqis mengira lantai tersebut adalah kolam yang besar, karna itu ia menyingsingkan kedua betisnya. Berkata Nabi Sulaiman: *"Sesungguhnya ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca."* Menyaksikan kemuliaan, keagungan, serta karunia Allah yang dilimpahkan kepada Nabi Sulaiman, maka Balqis berkata: *"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam."* QS an-Naml/41-44.

Sedikit perubahan yang dilakukan terhadap singgasana sang ratu bertujuan lebih lanjut untuk mengetahui ketelitian dan kejelian Ratu Balqis. Pertanyaan Nabi Sulaiman: Serupakah ini dengan singgasanamu? dijawab dengan sangat taktis oleh Balqis, *"Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku."* Jawaban ini menunjukkan ketelitian dan kekuatan mental sang ratu. Jawaban yang tepat pada situasi seperti yang dialaminya.<sup>34</sup>

Mencermati keberadaan "singgasana"nya dan pertanyaan Nabi Sulaiman yang diajukan kepadanya, menyadarkan Balqis akan bukti berita dan pengetahuan tentang kehebatan Nabi Sulaiman yang telah mereka dengar sebelumnya. Hal itu telah terbukti dan mereka saksikan sendiri. Balqis mengatakan "kami adalah orang-orang yang berserah diri,"

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 228-229

dengan pengertian bahwa ia dan pengikutnya berserah diri masuk ke dalam agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, dan meninggalkan kepercayaan mereka sebelumnya yang menyembah mata hari.

Jawaban ini adalah jawaban yang cerdas yang keluar dari pemikiran yang cemerlang. Di saat ia harus mengakui kekuatan dan kekuasaan lawannya, sang Ratu tidak langsung mengakui kebesaran lawannya, tetapi ia mengakuinya dan menundukkan diri kepada Zat yang lebih tinggi dari pada Sulaiman, yaitu Allah Subhanahu waTa'ala.<sup>35</sup>

Strategi Ratu Balqis diatas, menunjukkan kebijaksanaan, kecerdasan akal dan sikap, serta ketinggian budi seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya.

## **6. Ratu Balqis: Potret Kemandirian Perempuan di Ruang Publik**

Al-Qur'an telah bercerita tentang aktualisasi diri seorang perempuan di ruang publik, dengan memberikan contoh ketokohan Ratu Balqis; seorang perempuan cerdas, bijaksana, dan penguasa negeri Saba' yang makmur. Kisah ini menggambarkan tentang perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan, dan seorang politikus ulung. Ketika ia menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia musyawarahkan dengan para pembesar kerajaannya. Walau-

---

<sup>35</sup>Lihat Huzaemah, *Op.cit*, h. 83. Mengenai kelanjutan hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, sebagian mufassir menyatakan bahwa hubungan cinta antara keduanya berakhir dengan perkawinan. Akan tetapi, menurut M. Quraish Shihab pembahasan tersebut sebaiknya disingkirkan dari pembahasan tafsir. Quraish, Vol 10, h. 232 dan Barbara, *op.cit*, h.17-158



pun merasa kuat dan siap untuk berperang dengan Sulaiman, namun ia mempunyai sebuah pandangan yang jauh ke depan. Ia tak ingin kerajaannya hancur dan rakyatnya menderita akibat peperangan. Karena ia punya intuisi bahwa Sulaiman adalah seorang nabi. Melawan seorang nabi, adalah perbuatan yang sia-sia. Seorang nabi adalah utusan Allah yang tak mungkin dapat dikalahkan karena mendapat pertolongan dari-Nya. Tidaklah bijaksana menghalangi rakyatnya untuk menikmati kebenaran dengan berperang melawan Sulaiman untuk mempertahankan kebatilan.<sup>36</sup>

Barbara Freyer Stowasser<sup>37</sup> menyatakan bahwa dalam tafsir tradisional, kisah tentang Ratu Balqis ini masih tetap membingungkan. Hal ini terkait belum diterimanya wacana perempuan sebagai kepala negara. Ditambah lagi pengisahan Ratu Balqis dalam al-Qur'an lebih didominasi oleh kisah supranatural Nabi Sulaiman dibanding mengungkapkan berbagai hal yang bermanfaat bagi tafsir ilmiah.

Profil Ratu Balqis sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana sebagaimana yang diceritakan dalam al-Qur'an di atas kemudian dijadikan patron/kriteria perempuan yang ideal dalam Islam. Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur'an figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 83-84 dan lihat juga Chatibul Umam, et. Al, *Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Perempuan*, Jakarta: P2M IAIN Syarif Hidayatullah, 1996, h. 73-74

<sup>37</sup>Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Perempuan dalam al-Qur'an, Hadis dan Tafsir*, (terj), Bandung: Putaka Hidayah, 2001, Cet. ke-1, h. 153-154

memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal as-siyasah*) (QS. al-Mumtahanah, 60:12), seperti figur Ratu Balqis yang memimpin kerajaan super power (*'arsyun 'azhim*) (QS. an-Naml, 27:23); memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) (QS. an-Nahl, 16:97), seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa dengan putri Nabi Syu'aib di Madyan (QS. al-Qashash/28:23), kemandirian di dalam menentukan pilihan pribadi (*al-istiqlal asy-syakhshi*) yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah, (QS. at-Tahrim, 66:11) atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum menikah (QS. at-Tahrim, 66:12), al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan, dan menyampaikan kebenaran (QS. at-Taubah, 9:71).<sup>38</sup>

Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi Muhammad saw ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih oleh kaum laki-laki, seperti para istri Rasul. Dalam jaminan al-Qur'an, perempuan dengan leluasa dapat mengaktualisasikan diri memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan berbagai sektor publik lainnya.

---

<sup>38</sup>Siti Musdah Mulia (ed), *Keadilan dan Kestaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003, Cet. Ke-2, h. XIII dan lihat juga Stiti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007, Cet.ke-2, h. 17-18

Pembicaraan al-Qur'an tentang Ratu Balqis juga dijadikan para ulama yang mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan untuk menjustifikasi pendapat mereka bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama menjadi kepala negara. Tentu saja selama mereka memenuhi kriteria-kriteria yang telah digariskan.

## 7. Penutup

Dalam ajaran Islam, seruan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan nilai-nilai yang positif adalah sama bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi pemimpin sebagian yang lain. Mereka mengajak berbuat yang makruf dan mencegah yang munkar. Mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengakui sikap politik perempuan (QS. al-Mumtahanah: 12); Allah meridhai perempuan ber-*amar ma'ruf nahi al-munkar* dan bagi mereka dijanjikan balasan rahmat dan surge-Nya (QS. at-Taubah: 71-72). Dalam hal berproduksi di bidang

ekonomi, perempuan boleh memiliki hasil kerjanya (QS. an-Nisa':32); bahkan sosok pribadi Ratu Balqis, penguasa Negeri Saba' yang baik, dibanggakan Allah (QS. an-Naml: 23, 32, dan 44).

Pada masa kenabian, aktifitas yang dilakukan perempuan di sektor publik dibenarkan Rasulullah saw. Tidak sedikit para sahabat perempuan ikut berpartisipasi dalam peran-peran politik yang cukup penting. Keluarga dekat Nabi banyak yang mengambil bagian dalam urusan publik dan politik. 'Aisyah r.a., istri Nabi, adalah ahli agama dan tempat bertanya bagi sahabat laki-laki maupun perempuan. Ia adalah seorang politikus, sekaligus seorang pekerja sosial di dalam masyarakatnya. Hal tersebut sesungguhnya dapat dijadikan acuan tentang turut sertanya perempuan dalam mengambil kebijakan di ranah publik.

Akan tetapi, pemahaman keagamaan yang pada masa selanjutnya kental dengan kultur patriarkhi, telah menjustifikasi kaum perempuan untuk tetap hanya mengabdikan diri di ranah domestik. Pemahaman seperti ini telah menghambat langkah dan selalu menjadi sandungan bagi perempuan ketika hendak mengaktualisasikan kemampuannya di ranah publik. Padahal banyak isu-isu sentral dalam dinamika masyarakat, khususnya yang terkait dengan permasalahan perempuan, membutuhkan pemikiran dari perempuan pula.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengembangkan potensi diri dengan belajar dalam upaya peningkatan kualitas intelektualnya, mampu mengendalikan diri dengan menghayati dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam perintah shalat dan puasa, memiliki kepri-

badian yang baik dalam rangka aplikasi konsep *ihsan*. Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang baik, dalam rangka menjalankan tugas dan amanah kerja yang dibebankan kepadanya. Islam tidak membedakan jenis kelamin tertentu dalam hal taklif, maupun permasalahan dosa dan pahala.

Dengan memahami ajaran agama seperti diatas, tidak ada alasan lagi bagi upaya pamarjinalan perempuan sehingga kaum perempuan dapat mengaktualisasikan kemampuannya di ranah publik, karena hal tersebut sesungguhnya dibutuhkan.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aqad, Ustadz Abbas Mahmud. tth. *al-Mar'ah fi al-Qur'ān*, Kairo: ttp.
- Ameer Ali, Sayed. tth. *The Spirit of Islam*, London: University Paperbacks
- Andriani S. Soemantri Sebagai Gender Specialist BAPPENAS, *Pedoman Pengurusutamaan Gender Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, 2004
- Arnie. 2009. <http://kwsuam.com/?p=213>, April 2009
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad. 1994. *Islam Tidak Bermazhab*, terjem. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press

- Ayatullah Sayyid Hasan Sadat Mustafawi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Keberadapan Islam*, <http://jumiartiagus.multiply.com/journal/item/138>
- BPS, 2000. *Jumlah Keterwakilan Perempuan Pengambil Keputusan Politik di Indonesia*, Jakarta: BPS, 2000
- Divisi Perempuan. 2004. *Peningkah Perempuan Duduk Dalam Lembaga Politik*, Centre For Electoral Reform
- <http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=13.0>
- <http://pmiitlungagung.wordpress.com/2010/09/05/strategi-pmii-dalam-upaya-penguatan-kader/>
- <http://www.scribd.com/doc/20486012/strategi:strategi-peningkatan-motivasi-kerja-aparatur-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan>, bab iv
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2007
- Lely Zailani, *Perempuan dan Politik*, <http://www.berpolitik.com>
- Mansour Fakih. 1997. *Analisis Gender dan Transpormasi Soisal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Michael Rush dan Philip Althoff. 1993. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Grafindo Persada
- Miriam Budiarjo. 1992. *Dasar-dasar Jiwa Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhajir M. Darwin. 2005. *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Guru

Nurmi Chatim. 2001. *Kiat Sukses perempuan Karier Tanpa Meninggalkan Peran Ibu Sebagai Ibu Rumah Tangga*, dikutip dari H. M Autho Muzhar dkk (ed.) *Perempuan Dalam Masyarakat Indonesi*. Yogyakarta: Suan Kalijaga Press

Oktavianus Ken M.  
<http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=13.0>

Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*, t.tp: Rineka Cipta

Saptari Ratna, Birgitte. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Kalyanamitra

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan, Suatu Tinjauan Bewawasan Gender*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

[www.Riauprov.go.id](http://www.Riauprov.go.id)

Yayasan Bunga Bangsa. 2004. Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan Riau, Data dalam Angka Tahun 2004

**PERSPEKTIF SEJARAH TENTANG  
PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM  
BUDAYA MELAYU**

***Wilaela***





# PERSPEKTIF SEJARAH TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MELAYU

*Wilaela*

## A. Pendahuluan

Tulisan ini membahas tentang perempuan dalam lingkup budaya Melayu di Riau pada paroh pertama abad ke-20. Pada masa tersebut, perempuan Melayu diliputi oleh berbagai masalah pendidikan dan adat seperti pemingitan anak gadis; dan masalah perkawinan seperti pernikahan anak-anak, kawin paksa, kawin lari, permaduan, dan perceraian. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh perempuan Melayu di Riau dan daerah Sumatera Timur semata, tetapi juga dialami oleh perempuan Indonesia di berbagai tempat. Tidak mengherankan, persoalan-persoalan tersebut menjadi agenda dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dan Kongres Perikatan Perempuan Indonesia tahun 1929 di Jakarta.

Perempuan Melayu sesungguhnya melek baca tulis Arab Melayu. Mereka tidak hanya belajar pendidikan agama Islam di rumah atau di rumah seorang guru, tetapi mereka juga menerima nilai-nilai pendidikan melalui pembacaan hikayat, bersyair dan bersenandung. Mereka juga mendapatkan pendidikan keterampilan untuk menyiapkan peran mereka dalam kehidupan berumah tangga kelak. Pendidikan

tradisional ini telah mengakar sehingga ketika pendidikan modern diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, masyarakat hanya bersepakat bahwa anak perempuan bisa mengenyam pendidikan rendah saja, sekedar bisa baca tulis. Untuk jenjang selanjutnya masyarakat berbeda pendapat sehingga sekolah khusus perempuan menjadi jalan tengah.

## **B. Pembatasan Kebebasan**

### ***I. Berkurung***

Salah satu batasan yang ditetapkan oleh masyarakat dan adat terhadap kaum perempuan muda adalah *berkurung* atau *mencengkam* dalam bahasa orang-orang tua di Siak, atau *pingit* dalam Bahasa Jawa. Berkurung adalah adat kebiasaan yang mengharuskan anak perempuan sejak mulai menginjak *akil baligh* tetap tinggal di rumah hingga mendapatkan jodohnya. Di Jawa, pingitan terutama terjadi di kalangan gadis priyayi, sebagaimana dialami oleh Kartini pada akhir abad ke-19. Berkurung atau pingitan terhadap anak gadis terjadi di berbagai tempat di tanah air dan menjadi perhatian berbagai organisasi perempuan terutama di Pulau Jawa dan daerah Minangkabau.

Adat *berkurung* dialami perempuan Melayu di daerah Sumatera Timur (*Oostkust van Sumatra*) bahkan telah berlangsung sebelum dan awal abad ke-19. Dikisahkan di dalam *Hikayat Siak* bahwa kaum perempuan tidak diperbolehkan pergi ke hilir, walaupun dengan menggunakan alasan khawatir akan perlakuan tentara-tentara Belanda (Barnard, 2006: 138). Menurut sumber lisan dari orang-orang tua di Riau yang pernah menikmati kehidupan masa kecil dan remaja pada masa kolonial hingga menjelang Jepang masuk,

di Kerajaan Siak misalnya, anak perempuan biasa tinggal di rumah mengurus rumah dan mengasuh adik-adiknya. Gadis-gadis dilarang keluar rumah ke sembarang tempat pada sembarang waktu, kecuali mungkin ke ladang bersama orang tuanya. Mereka berjalan mesti berkawan, keluar pada hari gelap, mandi di sungai misalnya, dilakukan pada subuh atau petang hari.

Dalam novel *Kasih Tak Terlarai* karya Soeman Hasibuan (1931: 22-23) dikisahkan tentang keadaan anak gadis di Riau:

*“Menurut adat dalam kampung, anak-anak gadis terlarang keras bercampur gaul dengan anak-anak muda. Jangankan seiring di jalan, bertemu mukapun tidak boleh. Acapkali anak-anak gadis itu meringis karena dicubit dan dikatai oleh ibunya, sebab ia telah berani keluar rumah ketika seorang laki-laki lalu di situ, biarpun laki-laki itu sudah setengah umur, sedang gadis itu keluar karena sesuatu hal yang perlu pula.”*

Kalau anak perempuan bersekolah, maka cukup sekolah rendah saja yang dapat dilakukan sebelum *akil baligh* dan sebelum menjalani adat berkurung. Jadi, anak perempuan cukup bisa membaca, menulis, dan berhitung sederhana saja. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi seorang anak perempuan berarti sama halnya dengan melanggar kebiasaan berkurung. Kebiasaan berkurung telah membatasi perempuan untuk mengenyam pendidikan. Hal ini juga dibicarakan di dalam rapat-rapat terbuka Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 (*Bintang Hindia*, 5 dan 12 Januari 1929; Pringgodigdo, 1991:112-113).

Di dalam wilayah Sumatera Timur, gadis-gadis sebagian besar berkurung dalam rumah dan sedikit sekali yang pergi ke sekolah. Dunia gadis pingit dikelilingi dinding kayu biliknya. Biasanya pada salah satu dinding itu ada tingkap

kecil tempat gadis tersebut mengintip orang yang lalu-lintas di depan rumahnya. Karena jarang keluar, muka si gadis menjadi pucat, bertubuh lemah karena kurang gerak, dan terbiasa suka mengintai. Perempuan Melayu awal abad ke-20 juga digambarkan lemah gemulai, rapuh, dan dikesankan lembek. Semakin lembek semakin terpuji seperti kata sanjungan Melayu, “*berjalan seperti mau mati, melihat laksana mau buta*”. Agaknya karena selalu saja dikurung dan tidak pernah keluar bahkan di pekarangan, seorang gadis menjadi sulit dilihat atau diketahui keberadaannya.

Kebebasan kaum perempuan Melayu erat kaitannya dengan adat berkurung. Persoalan kebebasan dari berkurung ini sejak masa pergerakan nasional telah dipertanyakan. Hal ini menjadi kompleks karena menyangkut persoalan kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebebasan dimunculkan dalam surat kabar seperti *Tjaja Soematra* pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1928 dan tulisan-tulisan dalam *Bintang Hindia* (1928). Salah satunya, dalam *Tjaja Soematra* (18 April 1918), terdapat tulisan yang berjudul “Kemerdekaan Perempoean Kaoem Moeda Boemiputeran” dengan penulis S. Mansoer. Tulisan itu mempertanyakan tentang kebebasan perempuan saat itu apakah telah kebablasan dan melanggar tata adat kesopanan. Persoalan lain dalam tulisan itu adalah tentang kebebasan perempuan bekerja di ranah publik, seperti menjadi klerk dan guru, adakah melawan kodrat mengingat perempuan yang bekerja produktif menjadi enggan bersuami atau menunda untuk berumahtangga.

Di satu pihak, keberatan atas kebebasan kaum perempuan karena kekhawatiran hal itu akan melanggar ketentuan

adat dan norma agama. Kesadaran mulai tumbuh tentang perlunya perempuan bersekolah, asalkan pengetahuan yang diperolehnya tidaklah mesti mengubah adat kesopanan dan tata pergaulan laki-laki dan perempuan seperti adat Bangsa Belanda. Sementara itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh *gouvernement* bagi anak-anak bumiputera, HIS misalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Brugmans (1987:185), menyebabkan mereka merasa dapat disamakan dengan orang-orang Belanda. Sebaliknya, perasaan tidak suka terhadap Belanda, membuat sebagian orangtua berpendapat bahwa pendidikan perempuan cukup pendidikan dasar saja dan yang terkait dengan ketrampilan kerumahtanggaan dan pekerjaan tangan sehingga mereka tidak canggung memasuki kehidupan berumahtangga.

Di pihak lain, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kebebasan bagi kaum perempuan itu perlu, namun kebebasan yang dipandang wajar atau masih dalam alur adat dan agama. Seandainya sikap dan perilaku kaum perempuan berubah karena kebebasan yang mereka peroleh, maka perubahan itu dianggap alamiah saja dan karena perubahan zaman. Adat itu untuk manusia bukan manusia untuk adat, sehingga adat dapat berubah mengikuti zaman. Perempuan bekerja di ranah publik pun adalah untuk mencari penghidupan, bukan untuk menghabiskan waktu dan menghindari jodoh, karena datangnya jodoh itu ditentukan oleh Tuhan.

Sekalipun kebiasaan berkurung tetap berlanjut di tengah masyarakat, tetapi ada juga gadis-gadis di Riau yang mendapat dukungan dari ayah mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar daerah.

Mereka diantar oleh ayah atau orang yang ditunjuk untuk mendampingi perjalanan mereka untuk memasuki sekolah berasrama. Salah seorang di antara anak gadis yang beruntung tersebut adalah Misbah Thaib (Puanri, 2007: 124-125) yang melanjutkan ke Diniyah Putri Padang Panjang dengan diantar oleh ayahnya pada tahun 1938. Dia kembali ke Siak Sri Indrapura tatkala masa pendudukan Jepang.

Setelah perang kemerdekaan dan pemulihan kedaulatan tahun 1950, tradisi berkurung masih tetap berlangsung. Namun sejumlah anak gadis dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah gadis berasrama misalnya ke Diniyah Putri Padang Panjang karena dukungan kuat ayah mereka. Tidak ada anak gadis yang melakukan perjalanan sendiri atau berkelompok dengan sesama temannya tanpa didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh para orang tua untuk mengantar anak-anak mereka.

## **2. *Tudung Lingkup***

Persoalan kebebasan perempuan di ranah publik seperti memasuki sekolah pemerintah dan perempuan yang bekerja di luar rumah sering menjadi kontroversial karena terkait dengan masalah cara perempuan berpakaian dan berperilaku yang dipandang melanggar adat dan agama; sementara penilaian tentang cara berpakaian dan pergaulan kaum laki-laki tidak seinstens terhadap kaum perempuan. Sudah menjadi kebiasaan, kaum perempuan Melayu setiap keluar rumah mengenakan tudung lingkup, kain sarung yang ditutupkan dari kepala dan separuh badan bagian atas. Gadis-gadis juga mengenakan selendang yang ditutupkan ke wajah, hanya menyisakan sebagian wajah dan kedua mata.

Penggunaan penutup kepala dan wajah seperti ini, belakangan ada yang menyebutnya sebagai bercadar. Gambar tentang perempuan Melayu yang menggunakan tudung lingkup yang menutupi kepala dan separuh wajah ini dapat dilihat di dalam surat kabar bergambar *Bintang Hindia* (12 Desember 1925).



Gambar perempuan Melayu di Sumatera Timur  
mengenakan tudung lingkup  
(Sumber: *Bintang Hindia*, 12 Desember 1925).

Adat berpakaian perempuan Melayu pada prinsipnya untuk memelihara marwahnya, sehingga perlu mengikuti aturan agama. Ada perbedaan pakaian yang dikenakan kaum perempuan tatkala sedang berada di dalam rumah dengan pakaian untuk di luar rumah. Umumnya pakaian tersebut terdiri dari setelan baju kurung tulang belut, atau baju kurung labuh, atau baju kebaya pendek dengan kain sarung



batik dan tutup kepala berupa selendang atau kain tudung lingkup yang dipakai kalau keluar rumah. Sebagai manifestasi ajaran Islam, menurut Lutfi dkk. (1999: 275) dalam pola berpakaian dalam kehidupan masyarakat, pakaian yang dikenakan kaum perempuan harus menutup aurat dan tidak menyolok dalam batas-batas kesusilaan. Jika mereka pergi ke ladang, sawah atau ke pantai mengambil ikan, kepala ditutup dengan selendang atau kain belacu yang disebut tengkuluk. Di daerah Kampar, anak perempuan memakai cadar di wajah supaya terhindar dari panas cahaya matahari sewaktu sedang bekerja di ladang atau di sawah. Sementara di daerah Siak, perempuan yang sudah *akil baligh* harus memakai dua kain yaitu, satu sebagai kain sarung dan yang lainnya sebagai tudung lingkup. Selendang juga digunakan oleh anak gadis yang dikenakan seperti cadar yang menutupi sebagian wajah dan hanya memperlihatkan kedua mata saja (Harahap, 1926; Jamil *et al.*, 2005: 17-19, 25-26). Jadi, baik adat berkurung maupun adat berpakaian anak perempuan Melayu bertujuan agar ia tidak mudah dilihat oleh orang yang bukan mahramnya.

Akan tetapi, Snouck Hurgronje (1973:28) tidak melihat adanya kebiasaan berkurung dan pemakaian kain tudung lingkup dan selendang yang menutupi wajah, seperti yang biasa dikenakan gadis-gadis di Kerajaan Siak, sebagai pemakaian cadar. Menurutnya, tidak ada hambatan dalam relasi laki-laki dan perempuan Muslim di Hindia Belanda dan tidak dirintangi oleh aturan-aturan yang mengharapka agar kaum perempuan berkurung dan memakai cadar seperti di kebanyakan negara Islam. Pandangan ini dikutip dan didukung oleh Vreede-de Stuers (2008: 52) yang menganggap

bahwa kaum perempuan Muslim Indonesia pada sekitar tahun 1900 tidak menggunakan kerudung dan purdah. Keadaan ini sekalipun secara kasat mata menunjukkan rendahnya pengetahuan mereka tentang Islam, namun ia yakin bahwa ada keinginan kaum perempuan Muslim untuk meningkatkan taraf hidup dengan memperbaiki nasib mereka.

### **C. Masalah Perkawinan**

Kongres PPI diselenggarakan pada Desember 1929 di Jakarta dengan agenda yang kurang lebih sama dengan kongres pertama tahun 1928. Dibicarakan tentang kedudukan dan kewajiban perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, perkawinan, dan kehidupan keluarga. Dalam kongres ini peserta menentang praktek poligami, kawin paksa, dan perkawinan anak-anak (*Bintang Hindia*, 11 Januari 1930).

#### **1. Kawin Paksa**

Persoalan kerumahtanggaan yang banyak menimpa kaum perempuan pada paroh pertama abad ke-20 adalah kawin paksa atau kawin yang diatur oleh orang tua tanpa memperdulikan keinginan anak gadisnya. Melalui tutur lisan dari orang-orang tua di Riau yang mendapat kisah dari pengalaman orang tua mereka dapat diketahui tentang kebiasaan tersebut. Selain itu, kawin paksa yang kerap dialami anak gadis juga terdapat dalam majalah atau surat kabar lokal sezaman. Beritanya biasanya terkait dengan pernikahan anak-anak atau kawin lari.

Kisah kawin paksa atau orang tua yang memaksakan kehendak dalam jodoh anaknya juga dijumpai dalam karya sastra sezaman yang disusun di daerah Riau pada separoh pertama abad ke-20. Salah satunya adalah roman detektif *Mencari Pencuri Anak Perawan* karya Soeman Hasibuan (1932) yang untuk pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1929. Dikisahkan tentang si Nona, gadis peranakan Cina yang dipungut oleh tukang ransum di Bengkalis. Ia telah bertunangan dengan Sir Djoon, seorang anak kapal. Mereka dipandang sepadan. Sayangnya, si tukang ransum terpengaruh oleh uang 600 dolar yang disuapkan oleh Tarro untuk membatalkan pertunangan anaknya, dan Tarro sendiri segera mengambil alih posisi Sir Djoon sebagai tunangan si Nona.

Kisah serupa masih karangan Soeman Hasibuan adalah *Kasih Ta' Terlarai* (1931). Malah di dalam novel yang mengambil lokasi di Bengkalis dan Singapura pada masa kolonial ini, status sosial ekonomi calon menantu menjadi motif dalam tarik-ulur jodoh anak gadis. Encik Abas menolak setiap lamaran terhadap anak gadisnya, Siti Nurhaida, termasuk lamaran si Taram. Orang tua itu hanya bersedia bermenentukan Syekh Wahab, seorang guru agama dan saudagar Arab-Singapura. Setelah pernikahan, baru terbongkar bahwa Syekh Wahab adalah si Taram yang telah naik derajat dan saat itu sedang menyaru.

Berbeda dengan kisah roman tersebut, dalam *Sejarah Riau* (Lutfi, 1999: 274) disebutkan bahwa orang tua dalam budaya Melayu di Riau tidak dapat mengawinkan anak gadisnya secara paksa. Perkawinan sebagaimana di dalam Islam baru dapat dilangsungkan jika sudah mendapat

persetujuan dari pihak perempuan. Pendapat tersebut selaras dengan suatu ilustrasi didalam *Hikayat Hang Tuah*, karya sastra yang mulai disusun pada abad ke-16 dan mencerminkan cita-cita dan kebesaran bangsa Melayu. Dikisahkan bahwa tatkala raja bertitah kepada Bendahara Seri Buana agar Tun Teja bersedia bersuami dengan salah seorang dari calon raja Malaka, Bendahara menyatakan kegembiraannya. Akan tetapi, karena anaknya, Tun Teja sudah besar, ia bermaksud menanyakan kesediaannya dahulu (Ahmad, 1994: 112-113).

Karya sastra sebagai simbol verbal, menurut Kuntowijoyo (2006: 171) dapat menjadi sarana pengarang menyampaikan pikiran dan tanggapannya mengenai suatu peristiwa sejarah. Sekalipun ada perbedaan kisah tentang ada tidaknya gadis Melayu dimintai pendapatnya dalam masalah perjodohan, tetapi dapat dikatakan bahwa penghargaan kepada perempuan menjadi idaman masyarakat Melayu. Gambaran yang disajikan dalam kisah yang ditulis oleh Soeman Hasibuandi Bengkalis pada zaman kolonial pada seperempat pertama abad ke-20 itu juga tidak dapat diabaikan sebagai bagian dari realitas. Keadaan Bengkalis dan Singapura yang menjadi lokasi kedua karya sastra tersebut didukung oleh gambaran yang diberikan oleh sumber sejarah pada masa kolonial. Bengkalis adalah sebuah kota yang ramai dan berkembang di Riau sejak abad ke-19. Pada awal abad ke-20, banyak orang Bengkalis yang pelesir sambil berbelanja ke Singapura. Hubungan antara Kerajaan Siak dengan Singapura, terutama daerah-daerah yang berdekatan telah terjalin jauh sebelumnya, antara lain karena perdagangan dan pekerjaan (Netscher, 1862: 358-361;

Gramberg, 1864: 506; Anrooij, 1885: 273). Bagaimanapun, kisah roman tersebut rekaan, tetapi unsur realitasnya justru terletak pada *setting* sosial dan budaya di mana pengarang berada. Karya tersebut mencerminkan bagaimana cara Soeman Hasibuan memahami masyarakatnya dan mencoba melakukan kritik terhadap adat yang dipandang tidak memberi kedudukan yang sepatutnya kepada perempuan sebagaimana diidamkan. Diakui oleh Soeman Hasibuan, kesadarannya terhadap kondisi kaum perempuan ia tumpahkan lewat karya *Kasih Tak Terlerai* dan *Mencari Pencuri Anak Perawan* (Kasiri, 1993: 72; Muhammad, 2003: 202; Tasman, 2007).

Kuatnya kekuasaan orang tua dalam perjodohan anak gadis tidak saja terjadi dalam budaya Melayu di daerah Riau. Di daerah lain di tanah air juga mengalami hal yang sama sehingga kisah kawin paksa atau kawin yang diatur mewarnai tema karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Contohnya, kawin paksa di Minangkabau tersirat dalam kisah “Asmara Djaya” karya Adinegoro (1928) dan dalam “Anak dan Kemenakan” karya Marah Rusli (1956). Selain itu, kuatnya kawin paksa di Minangkabau dilaporkan dalam Rubrik Dunia Perempuan *Bintang Hindia*, antara bulan Januari-Februari 1930. Persoalan kawin paksa menjadi salah satu pembicaraan dalam Kongres Perikatan Perempuan Indonesia pada 28-31 Desember 1929.

## **2. Perkawinan Anak-Anak**

Dikeluhkan oleh seorang ibu yang menulis untuk *Tjaja Soematra* (18 April 1918) bahwa di Taluk Kuantan, Riau, ada seorang anak perempuan tetangganya berumur duabelas

tahun telah dinikahkan oleh orangtuanya. Sementara si anak sendiri masih sangat belia sehingga belum mengetahui apa arti sesungguhnya dan konsekuensi dari sebuah pernikahan, selain dari keramaian resepsi dan ia adalah sentrumnya. Oleh karena masih kanak-kanak dalam pikiran dan tingkah laku (*kinderentig*), si suami menceraikan istri belianya. Oleh orangtuanya, si anak yang menjanda kembali dinikahkan dengan orang lain. Si anak menjadi sakit, dan dua tahun dalam perkawinan anak perempuan itupun meninggal. Perkawinan anak-anak memang erat kaitannya dengan kawin paksa.

### **3. Kawin Lari**

Karena siapa jodoh anak gadis ditentukan oleh orang tuanya, maka kadang-kadang seorang gadis dan lelaki pujaan hatinya melakukan perlawanan dengan cara kawin lari. Perlawanan anak gadis terhadap otoritas orang tuanya dalam perjodohan ini di daerah Riau dikisahkan dalam *Kasih Ta' Terlarai* karya Soeman Hasibuan (1930). Cerita ini menggambarkan bahwa di Bengkalis, seorang bujang dan dara memilih kawin lari karena orang tua si gadis menolak lamaran si bujang terhadap anak gadisnya. Mereka menyeberang ke Singapura sebagai salah satu tujuan pelarian yang aman. Sampai orang tua dan famili kedua belah pihak dan penduduk kampung lupa barulah mereka kembali pulang atau sekedar berkunjung. Gadis dan bujang memilih kawin lari sebagai salah satu cara bagaimana mereka yang terlanjur saling menyukai dapat melangsungkan perkawinan tanpa hambatan di antaranya karena menghindari penolakan dari orang tua si gadis. Pada akhirnya, menurut Vreede-de Stuers

(2008:51), setelah kawin lari, rekonsiliasi dengan keluarga akan disetujui oleh adat dan tercapainya perdamaian adalah jawaban akhir dari “pembangkangan individual” itu.

#### **4. Permaduan dan Perceraian**

Perkara permaduan atau poligami juga merupakan perkara yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, termasuk di Riau pada separoh pertama abad ke-20. Menurut adat, seorang laki-laki boleh memadukan istrinya, bahkan sekalipun ditempatkan dalam satu rumah. Seorang suami jika memiliki beberapa orang istri, maka aturan Islam mewajibkannya untuk berlaku adil kepada semua istrinya dan tidak boleh memukul mereka. Persoalan permaduan ini cukup krusial dan menjadi agenda pembahasan yang penting dalam rapat atau pertemuan perkumpulan-perkumpulan perempuan, antara lain Perkumpulan Sarikat Kaum Ibu Sumatera yang diadakan di Fort de Kock (Bukittinggi) pada tanggal 7 September 1929.

Secara garis besar, dalam sistem hukum adat tertentu di Indonesia, perceraian cenderung sebagai fenomena sosial daripada individu. Bukan suami sendiri yang memutuskan ia akan menceraikan istrinya atau tidak. Seluruh keluarga dan kerabat turut campur karena merekalah yang akan kehilangan salah satu anggota keluarga jika ikatan perkawinan putus. Adat dan fiqh mempunyai kesamaan, keduanya memberikan hak untuk bercerai dan poligami (Vreede-deStuers, 2008:34). Di Kerajaan Siak, sultan dengan persetujuan mufti atau qadhi menentukan bahwa sebuah rumah yang ditinggalkan suami, baik karena bercerai hidup atau mati, ditetapkan menjadi milik istri. Kecuali rumah,

harta lain dibagi menurut ketentuan hukum waris (*faraidh*). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum perempuan (Lutfi, *et al.*, 1999: 275).

Kebanyakan perempuan berani mengajukan perkara yang terkait dengan kehidupan perkawinan mereka. Di antaranya karena mereka merasa dirugikan oleh suami. Ada juga yang mengharapkan supaya penghulu atau hakim yang mengadili di serambi mesjid menegur sang suami untuk lebih menepati kewajibannya secara lebih baik dalam keperluan perumahan dan sandang-pangan mereka atau menunjukkan jalan untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan. Pemisahan harta suami-istri sesudah bercerai bisa menjadi sebab timbulnya kesukaran yang penyelesaiannya harus dibantu oleh pengadilan agama. Di Sumatera dan pulau-pulau lainnya kerap kali seluruh tugas pengawasan diserahkan kepada petugas desa (Hurgronje, 1973:22-25).

Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 memberikan usulan antara lain tentang perlunya kaum perempuan berusaha meningkatkan kepandaian dan mengetahui tentang diri sendiri, percaya pada diri sendiri, dan dapat dipercaya, mengetahui betapa berharganya mereka, agar perempuan menjadi berharga dan dihargai. Dengan demikian kaum perempuan dapat menunjukkan eksistensi mereka, dibutuhkan, dan tidak gampang dijodohkan kepada sembarang orang sekaligus tidak gampang diceraikan.



#### **D. Keunggulan Perempuan Melayu**

Tidak semua elemen dalam adat Melayu yang memperlakukan perempuan Melayu hingga paroh pertama abad ke-20 menjadi tidak berdaya secara sosial-budaya. Perempuan Melayu mendapat tempat dan kedudukan utama dalam hal ihwal adat istiadat, seperti mengepalai kelengkapan adat dalam perkawinan, menentukan alat kelengkapan dalam penobatan, pengukuhan kepala adat, menentukan alat kelengkapan upacara tradisional, dan lain-lain. Tidak hanya itu, perempuan juga memiliki peran dalam urusan pendidikan dan sosial, pengaturan rumah tangga dan keluarga.

Banyak kisah, baik bersifat mitos maupun sejarah, menempatkan perempuan menjadi titik sentrum. Di dalam cerita rakyat daerah Riau, banyak sekali dijumpai kisah yang mengekalkan keutamaan kaum perempuan, yang menempatkan mereka pada kedudukan tinggi dan mulia. Gelar “Cik Puan”, gelar “Puan” bahkan “Tun” (yang lazim diberikan kepada kaum laki-laki) diberikan pula kepada kaum perempuan yang memiliki keutamaan.

Dalam epik Melayu *Hikayat Hang Tuah*, yang diperkirakan keseluruhannya ditulis setelah tahun 1641 dan sebelum tahun 1726, terdapat karakter-karakter yang diemban oleh dua orang perempuan yang berperan dalam kehidupan tokoh utama Hang Tuah. Mereka adalah Dang Merdu, ibu Hang Tuah yang berasal dari rakyat biasa dan Tun Teja, kekasih Hang Tuah berasal dari kalangan bangsawan (Ahmad, 1994). Nama Dang Merdu diabadikan sebagai nama gedung pertemuan yang termasuk paling awal dibangun di Pekanbaru pasca pengakuan kedaulatan.

Di dalam *Hikayat Siak* terdapat beberapa petunjuk mengenai kuatnya kedudukan perempuan di Siak pada tahun 1780-an, yang diduga merupakan warisan dari garis keturunan Minangkabau. Perempuan kemudian menjadi anasir penting dalam menentukan adat di Kerajaan Siak. Contoh yang paling jelas dari kekuasaan ini adalah Tengku Embung Besar, yang memberikan nasihat kepada para raja, karena peran pentingnya sebagai penafsir adat. Tengku Embung Besar adalah seorang putri tertua dari kalangan istana Siak yang dipengaruhi oleh Minangkabau (Barnard, 2006: 132, 190, 200).

Selain terdapat di dalam hikayat dengan peristiwa yang diragukan antara fiksi dan fakta, penghargaan budaya Melayu terhadap kaum perempuan juga terdapat dalam karya sejarah, seperti *Sejarah Riau* (Lutfi, 1999: 274). Ada dua nama sebagai contoh di dalamnya dan memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menyusun sejarahnya, yaitu Tun Fatimah dan Cik Puan. Tun Fatimah, permaisuri Sultan Mahmud Syah I, pernah menjabat sebagai pembesar dalam Kerajaan Melayu yang berpusat di Kampar pada abad ke-16 setelah terhalau dari Malaka. Tun Fatimah memberikan dorongan semangat juang kepada suaminya untuk terus melawan Portugis sampai ke akhir hayat dikandung badan. Bahkan kemudian diteruskan oleh puteranya, Sultan Alauddin Riayat Syah II yang membangun Kerajaan Johor sebagai pewaris Melaka. Tun Fatimah kemudian digelar “Cik Puan Sri Kampar”.

Demikian pula dengan kisah Cik Puan yang turut serta dalam penyerangan Kerajaan Siak ke Kerajaan Sambas pada masa pemerintahan Sultan Al-Syaid Al-Syarif Ali Abdul Jalil

Syaifuddin Baalawi (1784-1810). Sultan Siak ketujuh ini dikenal menjalani kekuasaannya dengan perluasan wilayah, seperti Kota Pinang, Pagarawan, Batubara, Badagai, Kualu, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Deli dan Temiang. Mulai dari dirinyalah, dinasti baru keturunan Melayu-Arab memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Siak. Sultan-sultan sebelumnya adalah keturunan Melayu-Johor (Yusuf, 1992: 58-59; Ahimsa-Putra, 2007:528). Latar belakang kisah Cik Puan tidak diketahui, tidak ada bukti yang mendukung keberadaannya, dan oleh karena itu tidak harus diterima kebenarannya. Akan tetapi, di Sambas terdapat suatu perkampungan bernama Siak. Sebaliknya di Siak ditemukan piring dan alat senjata yang dibawa dari Sambas sebagai bukti tanda takluk Sambas kepada Siak.

Salah seorang perempuan yang turut berperan dalam pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga yang berkedudukan di Pulau Penyengat adalah Engku Putri Raja Hamidah (w. 1843), putri pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Engku Putri adalah permaisuri dari Sultan Mahmud Syah III dan mahar perkawinan mereka adalah Pulau Penyengat Indera Sakti. Dengan demikian, Pulau Penyengat adalah milik Engku Putri. Menurut tradisi lisan masyarakat Kepulauan Riau, oleh sebab itulah Pulau Penyengat disebut juga dengan Pulau Mahar. Engku Putri diamanatkan menjadi pemegang “cokan kerajaan” atau alat-alat kebesaran (regalia) Kerajaan Riau-Lingga. Alat-alat kerajaan tersebut melambangkan kebesaran, kekuasaan, dan magis. Penabalan seorang sultan dianggap tidak memenuhi syarat adat jika tidak disertai dengan alat-alat kebesaran tersebut.

## **1. Pendidikan Agama Islam**

Memang perempuan Melayu memiliki banyak pantang larang dan keterbatasan, karena pingitan atau pembatasan keluar rumah. Akan tetapi, pada umumnya mereka menerima pendidikan agama sejak kecil. Mereka pergi mengaji ke rumah guru atau belajar mengaji dengan ibunya. Menurut Steenbrink (1984: 12), guru mengaji perempuan biasa mengajar anak-anak perempuan atau anak laki-laki kecil. Tugas guru perempuan terutama memberikan pengajian pada para gadis. Kegiatan belajar agama anak-anak perempuan ini dijalani sampai menginjak dewasa atau *akil baligh*. Sekalipun anak gadis kurang mahir menulis dengan huruf Latin karena adat berkurung dan tidak sempat masuk sekolah modern, tetapi mereka umumnya pandai baca-tulis aksara Arab Melayu sama seperti kaum laki-laki.

Biasanya berlangsung pada sore atau malam hari, bertempat di rumah, dan menjadi tanggung jawab para orangtua untuk mengajarkan anak-anak mereka. Pendidikan seperti ini biasanya disebut belajar mengaji al-Qur'an. Ada juga pendidikan yang diselenggarakan di rumah seorang guru dalam bentuk pengajian. Pada usia sekitar 6 atau 7 tahun, anak laki-laki dibawa ayahnya dan anak perempuan diajak ibunya untuk belajar mengaji. Murid-murid duduk bersila melingkar mengelilingi guru. Mereka diajarkan al-Qur'an secara individual, satu per satu menghadap guru. Sementara seorang anak tengah menghadap gurunya, murid-murid lainnya tetap berlatih membaca dan guru selalu dapat mengoreksi bacaan murid-muridnya.

Selain diajarkan mengaji, baca tulis Arab Melayu, dan bersyair, anak-anak Melayu sejak kecil sudah diajarkan

sopan santun dan adat istiadat serta tingkah laku yang baik terhadap orang tua, datuk dan neneknya, serta saudara-saudaranya. Anak perempuan yang belum *akil baligh* dapat bebas bermain setelah mereka selesai mengaji pada pagi dan petang hari. Setelah *akil baligh*, harus mengenal adat istiadat Melayu. Sebagai orang Melayu yang bermukim di pulau-pulau pesisir, di sungai maupun di daratan yang dulunya pernah menjadi wilayah kerajaan, seperti Kerajaan Siak, Riau Lingga, Inderagiri, Rambah, Rokan, Pelalawan, Gunung Sahilan, dan Kampar mempunyai tiga identitas kemelayuan yaitu, beradat istiadat Melayu, beragama Islam, dan berbahasa melayu (Hamidi, 1999:5; Thamrin, 2009:121).

## **2. Bersyair dan Bersenandung**

Selain belajar agama, perempuan Melayu juga belajar bersyair atau menyampaikan hikayat. Kegiatan bersyair menurut U.U. Hamidi (2002: 134) adalah membacakan berbagai syair dan hikayat dengan lagu yang merdu. Pola lagu syair biasanya sederhana, sehingga mudah diulang-ulang untuk garis atau bait syair selanjutnya. Syait dan hikayat yang dibacakan biasanya banyak mengandung nilai-nilai agama Islam dan memiliki manfaat bagi pendidikan. Di kampung-kampung di Riau, masyarakat biasa mendengar sayup-sayup sampai suara gadis bersyair untuk pelipur lara.

Sambil menenun atau menyulam, gadis-gadis biasanya bersenandung. Dalam *Atlas Kebudayaan Melayu Riau* (al-Azhar *et al.*, 2005: 69), bersenandung adalah menyanyi lagu pelipur lara yang biasa dilakukan oleh anak muda dengan perkataan yang berisi kerinduan atau perasaan yang sedih karena berpisah dengan kekasih atau oleh karena perasaan

yang lagi bersedih. Dalam hal ini kesedihan dan kerinduan telah menjadi salah satu sebab terwujudnya karya seni orang Melayu. Kegiatan bersenandung ini banyak dijumpai di daerah Bengkalis. Selain untuk pelipur lara, bersenandung juga dilakukan untuk menidurkan dan membuai anak.

### **3. Keterampilan Produktif & Ekonomis**

Gadis-gadis Melayu juga dikenal pandai merenda, menyulam, atau menenun. Kepandaian tersebut terkait dengan kebiasaan berkurung. Kegiatan menenun di rumah menjadi suatu cara agar anak gadis tidak berkeliaran ke mana-mana, jatuh ke dalam pergaulan yang bisa mendatangkan aib. Dengan menenun di rumah, mereka mempunyai waktu yang bernilai produktif dan ekonomis. Di Kerajaan Siak, bahan baku seperti benang didatangkan dari Singapura dan pihak istana sengaja mendatangkan peralatan menenun yang dapat dimanfaatkan untuk industri rumah tangga. Karena rumit pengerjaannya dan mahal benangnya, tenun Siak mahal harganya dan membuatnya sulit dipasarkan. Selain menenun, perempuan Melayu di Siak juga dikenal pada menekat. Tekat merupakan ketrampilan menyulam dengan benang emas timbul. Kain sulaman tersebut dipakai dalam upacara nikah-kawin dan kegiatan adat lainnya.

Perempuan Melayu di Siak dan di daerah-daerah Sumatera Timur dikenal pandai menenun. Kain tenun Siak sama terkenalnya dengan kain tenun Batubara. Menurut O.K. Nizami Jamil (lahir 1936), jenis tenun Batubara itu aslinya berasal dari Kerajaan Siak yang dibawa ke Batubara dalam masa penyebaran kekuasaan Sultan Siak VII pada abad

ke-18 dan awal abad ke-19. Sementara menurut *Atlas Kebudayaan Melayu II* (al-Azhar, 2005), kerajinan tenun Siak itu berasal dari Trengganu yang diperkenalkan oleh putri-putri penguasa negeri tersebut ke dalam Istana Siak. Tradisi menenun yang diperkenalkan di lingkungan istana ini lambat laun meluas ke luar dinding istana. Penduduk di sekitar Istana Siak juga menjadi pandai bertenun. Kegiatan bertenun ini sekalipun merupakan usaha mandiri penduduk, namun Sultan-Sultan Siak memberikan cukup perhatian dengan mendatangkan peralatan tenun dan membeli hasil tenun terbaik yang dibuat oleh kaum perempuan.

#### **E. Dari Tradisional ke Modern**

Sebelum penduduk bumiputera mengenal sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, di Indonesia telah ada pendidikan agama Islam. Pendidikan ini disebut pendidikan tradisional karena sistem pelaksanaannya yang berbeda dengan pendidikan cara Barat yang disebut dengan pendidikan modern. Pendidikan tradisional adalah pendidikan agama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan belum bersentuhan dengan sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sementara pendidikan modern adalah pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, seperti pembagian kelas, lama pendidikan ditentukan, dan program pembelajarannya lebih terkoordinasi serta sistematis (Mestoko, 1986:84; Sjamsuddin, 1993:4).

Selain pendidikan agama yang dilangsungkan di sebuah rumah atau di rumah seorang guru (orang Belanda biasa

menyebut pendidikan agama informal yang berlangsung di rumah seperti ini dengan istilah “*huiz scholen*”), di Riau pendidikan agama juga dilangsungkan di surau. Surau sebagai lembaga pendidikan agama tempat belajar al-Qur’an di Riau, menurut Hamidi (1989: 4-6) kadang-kadang terpisah; ada surau untuk anak-anak, ada juga surau untuk orang dewasa. Bangunan surau biasanya merupakan rumah panggung. Surau disamping digunakan untuk tempat mengaji dan shalat Maghrib berjamaah, juga digunakan sebagai tempat tidur anak bujang pada malam hari, termasuk para duda yang bercerai dari istri mereka (Hamka, 1984: 25). Di daerah Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar, selain istilah surau, sampai saat ini masih ada orang yang menyebutkan istilah *manosah* atau *nosah* untuk tempat pengajaran agama, seperti mengaji al-Qur’an dan suluk.

Selain pelajaran agama, pendidikan tradisional di Riau juga menyinggung tentang sastra karena banyak hikayat atau syair yang beredar (Lutfi, 1999: 388-389). Kegiatan membaca hikayat atau syair ini biasanya berlangsung pada malam hari setelah anak usai mengaji. Kaum perempuan biasa membaca atau menceritakan hikayat pada malam hari dalam kerangka memberikan kisah teladan bagi anak-anak mereka.

Pada umumnya, pengajian agama diberikan oleh guru laki-laki, namun ada juga guru perempuan yang memberikan pengajian terutama kepada anak-anak perempuan atau gadis dan anak laki-laki yang belum menginjak usia dewasa (Hurgronje, 1973: 33-36; Pijper, 1987:16; Azra, 1999: vii, 108, 117-122). Dalam prakteknya di langgar dan surau, anak-anak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan ini merupakan peraturan. Hanya di dalam lokal sederhana, anak laki-laki



dan perempuan belum *akil baligh* secara bersamaan di lokal yang sama belajar membaca al-Qur'an, duduk dalam kelompok-kelompok terpisah. Hamka (1988: 313) pernah menceritakan bahwa pada tahun 1918, baru Rahmah el-Yunusiyahlah perempuan yang belajar di surau. Ini senada dengan pandangan Azra, Afrianty, and Hefner (2007: 180) bahwa sampai tahun 1910-an, lembaga pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah merupakan lembaga hanya untuk kaum laki-laki. Beberapa anak perempuan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga saleh, menerima pengajaran agama, tetapi itu biasanya diselenggarakan oleh guru-guru yang diundang ke rumah. Fakta tersebut disimpulkan Lekkerkerker (1914: 871-876) bahwa Islam saat itu tidak simpatik terhadap pendidikan gadis. Akan tetapi, ia mengakui bahwa orang Muslim tidak keberatan anak perempuan yang masih kecil belajar hingga usia mereka berumur 11 tahun, usia mana diperkirakan mereka telah selesai bersekolah di Sekolah Kelas Dua.

Penerimaan murid di sekolah modern dipengaruhi oleh tujuan sekolah. Sekolah-sekolah pertama di Jawa dimaksudkan untuk mendidik pegawai pemerintah. Konsekuensinya ada dua, pertama hanya anak laki-laki yang diterima dan kedua, hanya anak priyayi yang diberikan prioritas utama. Pemerintah Belanda tak pernah mengeluarkan suatu peraturan yang merintangi penerimaan anak-anak perempuan di sekolah. Akan tetapi, sebaliknya juga sangat hati-hati untuk menyuruh mereka bersekolah takut kalau-kalau menyinggung adat kebiasaan setempat (Stibbe, 1919: 109; Nasution, 1987:46-47). Pendidikan perempuan di Indonesia baru benar-benar berkembang pada awal abad ke-20, setelah

ide-ide R.A. Kartini disebarluaskan. Sejak saat itu, perempuan mulai memasuki sekolah ko-edukasi seperti di *Volksscholen* dan *Inlandsch Tweede Klasse Scholen* atau sekolah khusus perempuan (*Meisjesscholen*). Di sekolah-sekolah tersebut, menurut laporan Creutzberg en Hardeman (1916: 80-81), pada tahun 1914, terdapat 12,5% laki-laki dan 7,5% perempuan.

Jumlah anak putus sekolah senantiasa melampaui jumlah yang menamatkan sekolah dengan memperoleh ijazah. Hanya 8-10 persen dari anak perempuan dan sekitar 30 persen dari anak laki-laki berhasil menamatkan pelajarannya (Stibbe, 1919: 109). Alasan-alasan putus sekolah antara lain kematian, sakit, pindah tempat tinggal, pindah sekolah, kelakuan tidak baik, tidak teratur bersekolah, bekerja, melampaui batas usia 17 tahun, dan sebab-sebab lain yang tidak diketahui. *Drop out* yang relatif tinggi antara lain disebabkan kurikulum sekolah yang tidak memikat perhatian murid dengan memperhitungkan minat dan kebutuhan anak. Rumah sekolah Melayu atau pribumi, sebagaimana dilaporkan oleh Brugmans (1987:186) biasanya menempati bangunan mirip gudang dan tidak menarik. Padahal eksklusivitas pendidikan Belanda terlihat pada gedung-gedung yang bagus sehingga menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Berdasarkan berita surat kabar *Pewarta Deli* (24 November 1924: 1) berjudul “Kepentingan Sekolah-Sekolah bagi Bumiputera,” disebutkan antara lain pengajaran, baik yang diselenggarakan oleh *gouvernement* maupun oleh bumi putera, hakikatnya sama saja, yakni kurang memberi hasil bagi keutamaan anak-anak Indonesia.

Sebenarnya bukan hanya karena sikap pemerintah kolonial yang memilih tidak memihak kepada pendidikan perempuan, ada banyak alasan mengapa pendidikan perempuan tidak menjadi perhatian, antara lain karena pemerintah Belanda tidak ingin bertentangan dengan adat dan pandangan penduduk pribumi. Bahkan sikap kurang peduli kepada pendidikan juga datang dari penduduk pribumi. Mereka tidak kompak menuntut hak pengajaran dan malahan tidak cukup memanfaatkan kesempatan pengajaran yang telah disediakan. Apalagi pendidikan untuk kaum perempuan. Bukan saja karena kurangnya rumah-rumah sekolah, juga karena orang tua tidak mengizinkan anak-anak gadis pergi ke sekolah dengan alasan adat-istiadat dan agama (Brugmans, 1987: 180). Statistik pengajaran dapat menunjukkan bahwa dalam tahun 1928, hanya terdapat 20 persen murid perempuan di sekolah-sekolah rendah.

Setelah didahului oleh R.A. Kartini (1879-1904) dengan membuka “sekolah kecil” pada tahun 1904, kaum perempuan baik secara individu maupun melalui organisasi pergerakan perempuan membuka sekolah. Mereka membuka sekolah, salah satunya karena pemerintah belum dapat mewujudkan sistem pendidikan modern bagi kaum perempuan sejak awal tahun 1900. Muhammadiyah dengan Aisyiah (1917) adalah salah satu organisasi Islam yang turut memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Jika sebelumnya pendidikan bagi perempuan masih dianggap tidak perlu, maka Muhammadiyah sengaja menyediakan sekolah-sekolah khusus untuk kaum perempuan. Di sekolah tersebut selain diajarkan pengetahuan tentang perempuan, juga diajarkan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum

(Ali, 1971: 19). Sejak sebelum resmi berdiri, Aisyiah telah menyelenggarakan pendidikan berbentuk pengajian bagi kaum perempuan di Kauman, Jogya dan menyantuni anak yatim (Abdullah, 1993: 77).

Sistem pendidikan Barat pada awal abad ke-20 mulai dibuka dan menjangkau pribumi secara lebih luas. Hal ini terutama didorong oleh Politik Etis pemerintah kolonial. Tipe sekolah-sekolah pemerintah kolonial ini kian lama kian banyak menarik murid. Namun demikian, tidak berarti bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional seperti surau, mesjid, atau pesantren menjadi surut. Para orang tua di Sumatera Timur lebih tertarik memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan agama yang disebut lembaga *kuttab* yang kian tumbuh subur.

Dapat dikatakan terdapat dua bentuk pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20 dan jurang di antara keduanya cukup tajam. Ada pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Belanda, dikelola secara teratur atau modern, tidak memberikan pelajaran agama, dan menghasilkan golongan yang mendapat pendidikan sekuler. Lainnya adalah pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan Islam, yang diselenggarakan di surau atau lembaga *kuttab*, mengajarkan ajaran agama saja dan bersifat tradisional.

Pendidikan tradisional kian lama kian mundur terdesak oleh pendidikan Barat (Yunus, 1960:199). Organisasi-organisasi yang dipandang modernis atau pembaharu seperti, Jami'at al-Khair, al-Irsyad, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah berusaha mengurangi perbedaan antara golongan terpelajar dari sekolah-sekolah Belanda dan

golongan terpelajar dari pesantren-pesantren (Ali, 1971:16; Azra, 1999: 36-37). Dalam tataran ini terjadi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia menuju pendidikan modern, baik dengan mengadopsi sebagian saja dan menerapkannya kepada institusi pendidikan Islam tradisional maupun dengan meniru sebagian besar sistem pendidikan Barat.

Pendidikan modern pemerintah yang ada di Riau pada awal abad ke-20 sangatlah terbatas. Sampai tahun 1915, di Riau hanya ada dua sekolah Melayu berbahasa Belanda atau yang disebut *Hollandsch Inlandsche School*; sekolah-sekolah desa (*Volksscholen*) tiga tahun; dan sekolah-sekolah Melayu (*Inlandsch Scholen*) lima tahun sebagai Sekolah Kelas Dua (*tweede klasse*) di tempat-tempat yang dipandang kota di Riau (Plas, 1917:122). Namun pada tahun 1920-an dan 1930-an, lembaga pendidikan modern mulai didirikan di berbagai tempat oleh pemuka-pemuka masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada, yang disebut dengan pendidikan partikelir. Sejauh menyangkut pendidikan untuk laki-laki, masyarakat bisa menerima sistem pendidikan modern yang diperkenalkan Pemerintah Hindia Belanda, sekalipun sebagian penduduk di Riau tetap tidak menyukai Belanda karena penjajah dan *kafir*.

Apalagi politik pendidikan Hindia Belanda yang terkait dengan politik asosiasi (*associatiepolitiek*) adalah upaya menggalakkan pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda atau Barat (Dekker, 1913: 439-446; Brugmans, 1938: 289-290; Hurgronje, 1977: 157). Belum lagi keengganan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia membuat kalangan bumi putera, dari kalangan nasionalisme dan terutama kalangan

Islam, menyelenggarakan pendidikan modern partikelir. Aneka amal usaha pendidikan Muhammadiyah dan Taman Siswa berkeras menunjukkan persetujuan mereka dengan sistem pendidikan modern yang diperkenalkan Barat, tetapi mereka menolak sistem pendidikan *gouvernement* (yang mahal biayanya, sulit pelajarannya, dan tidak tepat untuk sosial-budaya Indonesia) dan menolak subsidi pemerintah kolonial (*Bintang Timur*, 7 Januari 1936:1; Suminto, 1985: 47-8, 57; Brugmans, 1987: 181). Sekalipun demikian, menurut van Niel (2009: 310), keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah umumnya diakui oleh pemerintah Belanda, tidak dipandang sebagai “sekolah liar”, dan diberikan subsidi.

Pendidikan di Riau dari masa kolonial hingga kemerdekaan memang lebih banyak diselenggarakan oleh masyarakat dan yang lebih belakangan oleh organisasi non pemerintah, seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa. Model pendidikan yang ditawarkan sama dengan sekolah Barat. Di antaranya *Schakelschool* di Rengat, *Hollandsch Chinese School* (HCS) dan HIS Muhammadiyah di Bagansiapi-api, HIS Taman Siswa di Selatpanjang, Sekolah Muhammadiyah di Bengkalis dan HIS di Pekanbaru. Selain *Volksschool* dan *Inlandsch School*, sekolah yang terdapat di daerah Riau ini hanyalah sekolah HIS, HCS, atau *Schakelschool* saja. Jadi, sekolah-sekolah yang ada di Riau hanyalah setingkat *lagere scholen* atau sekolah rendah. Jika anak-anak dari daerah Riau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka mereka harus merantau ke luar Riau.

## F. Jalan Tengah

Tuntutan terkuat yang diajukan oleh kalangan bumiputera pada awal abad ke-20 adalah pendidikan (*onderwijs*) bagi anak-anak bumiputera, laki-laki dan perempuan. Lambat laun pendidikan untuk perempuan (*meisjesonderwijs*) dapat diterima di tengah masyarakat, namun tetap menuai kontroversi. Setidaknya reaksi masyarakat itu berkisar pada perlu tidaknya perempuan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari Sekolah Desa atau sekolah Melayu Kelas Dua.

Pertama, mereka yang menginginkan dan menyetujui perempuan masuk sekolah yang terkait dengan fungsi femininitas dan peran perempuan di ranah domestik. Sebab, pendidikan bagi perempuan akan mengarahkannya untuk menjadi ibu sehati. Mereka beranggapan perempuan harus bersekolah, karena ia akan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Perempuan tidak hanya perlu mengetahui cara mengurus rumah tangga (*huishouden*) seperti pekerjaan dapur, mengurus orang sakit, mengasuh dan mendidik anak (*opvoeden*), ilmu kesehatan (*hygiene*), tetapi juga pekerjaan tangan (*handwerken*) seperti jahit-sulam, menenun, atau membatik. Bahkan, anak perempuan perlu memiliki kemampuan berbahasa Belanda standard karena kemampuan tersebut bermanfaat untuk dapat membaca buku-buku terbaik dan berfaedah untuk mendidik anak-anak dan keluarganya yang memang hanya tersedia dalam bahasa tersebut. Suami-suami pada masa ini juga cenderung menyukai istri yang pintar, karena istri adalah kawan bermufakat dan bersepakat, dalam susah dan senang.

Lekkerkerker (1914: 871-876) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah alasan kebutuhan melanjutkan pendidikan bagi gadis pribumi. Di antaranya untuk membuka jalan bagi pendidikan yang lebih tinggi; untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga karena dapat bekerja; karena sibuk bekerja, seorang gadis akan terhindar dari persoalan perkawinan yang tidak diinginkan, seperti poligami atau pernikahan dini; mengurangi kematian, karena melalui pendidikan, perempuan mengakses tentang konsep kebersihan; dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup rumah tangga. Lekkerkerker juga menyebutkan perlunya pendidikan lanjutan terpisah bagi perempuan yang telah memasuki *akil baligh* yaitu sekolah yang menghubungkan sekolah-sekolah Kelas Dua dan berasrama.

Kedua, mereka yang beranggapan bahwa anak perempuan cukup bersekolah rendah setingkat *Volkschool* atau *Gouvernement Inlandsch School* saja. Pendidikan yang lebih tinggi bagi anak perempuan dipandang tidak berguna. Hal ini dapat menjelaskan mengapa jumlah murid laki-laki jauh melebihi murid perempuan di jenjang pendidikan rendah. Menurut Zaenal Abidin Ahmad (1939: 304-306), jumlah anak perempuan bersekolah di Indonesia berdasarkan statistik tahun 1933/1934 belum setengah juta (yaitu 546.809 orang ) dari 17 juta lebih anak yang harus bersekolah.

Adat kurang menyetujui pendidikan untuk kaum perempuan. Halangan sosial masih terlampau kuat untuk mengizinkan anak perempuan menikmati kesempatan belajar yang sama seperti anak laki-laki. Banyak alasan mengapa anak perempuan cukup bersekolah rendah, antara



lain: 1) anggapan bahwa perempuan bersekolah tinggi itu percuma saja. Tidak ada manfaat gadis-gadis dididik dengan cara yang sama dengan anak laki-laki; 2) perempuan lepasan HIS tujuh tahun tidak bisa serta merta bisa menjadi guru, kerani atau klerk. Di samping itu, adat belum menerima kaum perempuan bekerja makan gaji sebagai pegawai kantor dan bekerja bercampur-baur dengan laki-laki; 3) banyak anak gadis yang tidak dapat bekerja kemudian hanya berkurung diri di kamar menunggu datangnya jodoh. Waktu dan biaya yang telah dipakai selama ini untuk bersekolah menjadi sia-sia; 4) Muncul stereotipe tentang gadis lepasan sekolah *gouvernement* seperti HIS atau yang lebih tinggi. Sebagian mereka dibayangkan berubah perilaku menjadi kebarat-baratan dan menjadi gadis tidak baik yang menjadi fenomena kota besar, antara lain kota Medan pada masa itu.

Di antara perubahan perilaku yang dipandang bertentangan dengan adat dan agama tersebut adalah cara berpakaian yang meniru barat dan tidak mau lagi berkerudung. Kontroversi tentang cara berpakaian kaum perempuan terkait dengan keberadaan mereka di ruang publik, misalnya untuk berbicara dalam suatu pertemuan terbuka yang dihadiri kaum laki-laki. Tata cara berpakaian murid perempuan di sekolah *gouvernement* yang dipandang bertentangan dengan adat dan agama memang menjadi bahan pertimbangan para orangtua untuk menyekolahkan anak perempuan mereka, terutama ke sekolah *gouvernement*. Selain perubahan di dalam berpakaian, anak-anak gadis juga mulai enggan sekaligus canggung mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saban hari hanya mau membaca, berlaku kurang sopan, dan lengah menjaga kehormatan. Masih

kental pandangan bahwa perempuan adalah makhluk domestik, anak perempuan baik-baik tinggal di rumah, tidak berkeliaran di luar rumah bahkan jika hal itu dilakukan untuk menunaikan shalat di mesjid misalnya, apalagi untuk melakukan hal tidak berguna dan tidak pantas seperti mengunjungi bioskop.

Selain itu, gadis-gadis khususnya di desa, sangat diperlukan tenaganya di rumah maupun di sawah. Terkadang, begitu mencapai pubertas, mereka dipingit dan cepat-cepat dinikahkan. Selain karena dinikahkan dini, jaranganya anak gadis yang bersekolah setelah mencapai pubertas, juga karena pertimbangan finansial yang mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jika pendidikan sebuah investasi, maka para orang tua lebih senang menyekolahkan anak laki-laki mereka daripada anak perempuan yang dipandang akan menjadi bagian keluarga suaminya.

Sikap defensif terhadap pendidikan barat dan keyakinan teguh terhadap apa yang pantang dan apa yang dibolehkan menurut adat membuat tokoh perempuan mengupayakan bentuk dan tujuan pendidikan yang berbeda. Bentuk pendidikan sebagai jalan tengah antara pendapat yang membolehkan anak gadis mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan pendapat yang menyatakan bahwa anak gadis cukup mengenyam pendidikan rendah yang terkait dengan ketrampilan yang mereka perlukan sebagai istri dan ibu kelak. Pendidikan jalan tengah dimaksud haruslah pendidikan khusus untuk anak perempuan saja dan menyiapkan mereka sebagai calon pendidik bagi keluarganya, masyarakat, dan guru di sekolah. Untuk itulah sekolah-sekolah yang didirikan adalah sekolah yang mengajarkan

kaum perempuan membaca dan menulis, mengajarkan cara mengurus rumah tangga, melatih ketrampilan, dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan ketrampilan atau pekerjaan tangan (*handwerken*) diutamakan kepada ketrampilan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan, seperti menjahit, menyulam, menenun, membatik, dan lain-lain yang dapat bernilai produktif dan mendukung kemandirian bagi kaum perempuan. Dengan demikian, seorang istri tidak bergantung penuh kepada suami dari segi ekonomi. Dengan cara demikian seorang istri memiliki posisi tawar di hadapan suaminya dan masyarakat sehingga tidak mengalami berbagai hal yang merendahkan harkat dan martabatnya.

Sejarah pendidikan perempuan di Indonesia biasanya dimulai dari pandangan-pandangan Kartini (1879-1904) dan upaya kecil dan singkat yang dilakukannya untuk memulai pendidikan modern \_ dalam jenis mata pelajaran \_ khusus untuk perempuan. Kartini menginginkan pendidikan untuk kaum perempuan, tidak hanya pengetahuan dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Melayu, serta berhitung, melainkan juga keterampilan tangan, menjahit dan memasak yang dapat dipergunakan untuk mencari nafkah sendiri (Kartini, 2006: 191-192). Berikutnya, Dewi Sartika (1884-1947) dari Jawa Barat pada tahun 1904 mendirikan sekolah bernama *Sakola Istri* atau *Sakolah Kautamaan Istri*. Di sini diajarkan pelajaran dasar baca, tulis, dan berhitung, pengetahuan agama dan semua kepandaian untuk menjadikan kaum perempuan sebagai “*istri binangkit*”, ibu teladan, pendidik utama para generasi penerus (Lubis, 2008). Rohana Kudus (1884-1974) menggagas berdirinya perkumpulan Keradjinan Amai Setia (KAS) di Kota Gadang (1914) dan Rohana School di

Bukittinggi. Kegiatannya merupakan pionir dalam mengangkat kerajinan masyarakat. Rahmah el-Yunusiyah (1900-1969) mendirikan pendidikan khusus untuk kaum perempuan Islam (1923) dan dikenal dengan Diniyah Putri. Mata pelajaran terdiri dari pelajaran agama dan ilmu alat. Keberadaan dan peran Diniyah Putri dalam pendidikan perempuan Indonesia tidak diragukan lagi. Lembaga ini unggul dalam hal keperintisan, peran, dan popularitasnya sebagai lembaga pendidikan khusus perempuan di tanah air (Noer, 1994); sebagai salah satu lembaga pendidikan perempuan yang pertama dan terkenal di Indonesia (Azra, 1999); dan meskipun merupakan organisasi lokal, tetapi Diniyah Putri memiliki dampak sosial yang luas dan besar serta menentukan dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia (Abdullah, 1993: 80; Vreede-de Stuers, 2008).

Jadi pendidikan perempuan yang diidamkan oleh para tokoh tersebut bertujuan menjadi kaum perempuan terampil dan mandiri. Untuk itu, kurikulumnya meliputi pendidikan kejuruan atau ketrampilan, seperti mengatur rumah tangga, memasak, dan pekerjaan tangan. Kaum perempuan harus dididik sesuai dengan perannya sebagai ibu pendidik. Peran ibu pendidik yang utama pada mulanya hanya pendidik di dalam rumah, tetapi kemudian meningkat di masyarakat dan di sekolah.

Lembaga pendidikan modern khusus perempuan Riau, tepatnya dalam wilayah Kerajaan Siak didirikan pada tahun 1927 dengan nama Sultanah Latifah School. Gagasannya datang dari Tengku Agung (1896-1929) dan Sultan Syarif Kasim II mendukung sepenuhnya ide permaisurinya tersebut. Di sini diajarkan kursus mengurus rumah tangga

(*huishouden*) dan keterampilan pekerjaan tangan (*handwerken*). Sultanah Latifah School sendiri merupakan sekolah yang mengikuti sistem sekolah Barat: berkelas, memiliki kurikulum dengan mata pelajaran dasar membaca, menulis, berhitung, serta mata pelajaran utama seperti memasak dan pekerjaan tangan. Selain itu, di sana juga diajarkan Bahasa Belanda. Letak rumah sekolah Sultanah Latifah School di sebelah Istana Asseraya di Siak Sri Indrapura.

Guru-guru, sesuai kebutuhan ada yang sengaja didatangkan dari luar kerajaan, Tengku Agung turut mengajarkan keterampilan menenun kepada dayang-dayang dan perempuan-perempuan di lingkungan Istana Siak yang merupakan murid-murid Sultanah Latifah School. Pada tahun 1928, setahun setelah Sultanah Latifah School didirikan, guru yang mengajar di sana 1 orang untuk 50 orang murid (Leyds, 1929). Kemudian antara tahun 1929-1931 terdapat tiga orang guru, salah satu di antaranya menjadi kepala sekolah. Ketiga guru tersebut mengajar 66 orang murid (Valk, 1931: 10). Guru-guru tersebut diberi gaji dari pendapatan kerajaan, termasuk dari *bait al-mal*. Sultanah Latifah School berkembang ditandai dengan peningkatan jumlah guru dan muridnya yang pernah mencapai seratus orang.

Murid-murid Sultanah Latifah School adalah anak perempuan dari dalam istana, yaitu dayang-dayang dan anak-anak yatim dan dari luar istana seperti dari kampung-kampung di sekitar Siak Sri Indrapura, bahkan dari tempat-tempat yang memerlukan jasa penyeberangan melalui Sungai Siak. Dayang-dayang dan anak-anak yatim

diasramakan di Istana Limas di bawah pengawasan Tengku Maharatu. Karena sebagian besar murid diasramakan, maka mereka dapat pemeraktekkan ilmu atau pelajaran langsung dalam kehidupan istana.



Sebagian murid Sultanah Latifah School bergambar bersama saat mengikuti acara khatam al-Qur'an di bawah pimpinan Lebai Abdul Muthalib (Sumber: foto dokumen Istana Asseraya).

Pendidikan perempuan (*meisjesonderwijs*) memang mendapat simpati dari Sultan Syarif Kasim II selaku penguasa kerajaan. Tidak mengherankan jika semua fasilitas dan biaya penyelenggaraannya ditanggung sepenuhnya oleh sultan. Tengku Agung yang bertanggung jawab mengelola sekolah tersebut. Kurikulumnya ditentukan sendiri, yaitu keterampilan yang dibutuhkan para gadis istana atau dayang-dayang yang berada di lingkungan Istana Asseraya. Mereka diajarkan perihal menjaga kebersihan, mengatur dan mengurus rumah, memasak, dan keterampilan atau kepandaian tangan, seperti menjahit, menyulam atau menerawang, dan lain-lain. Setelah mengikuti pendidikan, diharapkan mereka memiliki

kompetensi keterampilan sesuai dengan peran jender mereka pada waktu itu. Pendidikan perempuan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perempuan yang berperan penting dalam ranah domestik.

Keterampilan pekerjaan tangan yang diajarkan di Sultanah Latifah School diistilahkan oleh Abdul Ghaban sebagai keterampilan anak negeri yang asli (*Bintang Hindia*, 4 Mei 1929: 262). Menurut Azis (2007), di Sultanah Latifah School diajarkan menenun, sehingga murid-muridnya dikenal pandai menenun. Dalam biografi Masajo (Yusuf, 2007), seorang murid Sultanah Latifah School, dikisahkan pernah belajar menenun dari Tengku Agung. Hal senada dituturkan oleh Encik Hasnah (71 tahun) yang mendapatkan keterampilan menenun dari neneknya, Hajah Aminah, dan neneknya belajar menenun dari Tengku Agung. Sultanah Latifah School masih berdiri hingga bala tentara Jepang memasuki Siak Sri Indrapura pada tahun 1942. Sejak saat itu, sekolah tersebut dialihkan sebagai Sekolah Rakyat. Sekalipun keberadaannya terhitung singkat, tetapi sekolah ini telah berperan dalam diseminasi kerajinan tenun siak.

Madrasah Annisa didirikan pada tahun 1929 sebagai sekolah agama khusus perempuan terkait dengan Tengku Maharatu (lahir 1913), permaisuri Sultan Syarif Kasim II sepeninggal Tengku Agung. Letak madrasah yang terdiri dari tingkat ibtidaiah 4 tahun dan tsanawiyah 3 tahun ini berada di depan alun-alun sejajar dengan tampak muka Istana Asseraya (Yusuf *et al.*, 1992; Muthalib, 83 tahun). Latar belakang didirikan lembaga ini terungkap di dalam wawancara sultan dengan jurnalis independen Abdul

Ghaban (*Bintang Hindia*, 4 Mei 1929: 262) dinyatakan sebagai berikut.

*"Tentang kemadjoean kaoem iboe, beliau setoedjoe, asal sadja agama djangan ditinggalkan. Begitoe telah didirikan di Siak satoe sekolah bagi kaoem iboe, seboeah meisjesschool, dimana anak-anak perempoean tidak sadja diadjarkan membatja menoelis, tetapi djoega keradjinan anak negeri jang asli. Kalau sekiranya nanti perloe, maka sekolah itoe akan ditoekar menoeroet keboetoeahan zaman. Itu akan dilihat dikemoedian hari poela.... Memang beliaoe rasa perloe djoega sekolah bagi kaoem iboe, jang ada poenya hak boeat menoentoet ilmoe."*



Bangunan peninggalan Madrasah Annisa, berada di  
samping Istana Asseraya Hasyimiah, di Siak Sri  
Indrapura  
(Foto doc. pribadi)

Pembukaan Madrasah Annisa dapat juga dilihat dalam perspektif simbol perlawanan Sultan Syarif Kasim II kepada penguasa Belanda. Hanya dalam bidang pendidikan sultan dapat lebih banyak menunjukkan sikap anti Belandanya. Sultan mengadakan kerja sama dengan Diniyah School Putri di Padang Panjang. Alumni sekolah ini juga ada yang mengajar di Siak, terutama di Madrasah Annisa yang dikelola



oleh Tengku Maharatu. Hal ini berlangsung sejak tahun 1934 hingga antara tahun 1941 dan menjelang Jepang masuk ke Siak. Berdasarkan data pada ulang tahun ke-15 Diniyah Putri, di antara pelajar Diniyah School Putri yang telah tamat sampai tahun 1938 saat buku peringatan 15 tahun Perguruan Diniyah Putri disusun, terdapat alumninya yang pernah dan sedang mengajar di Siak (DP, 1939; Arsyad, 1978: 127, 379-381). Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan sekolah agama terkenal tersebut, Sultan Syarif Kasim II beserta permaisurinya, Tengku Maharatu berkunjung ke Diniyah Putri pada tahun 1941. Sebaliknya, menurut penuturan Rugayyah binti Lebai Abdul Muthalib (84 tahun) Encik Rahmah el-Yunusiyah datang ke Madrasah Annisa untuk meninjau perkembangan sekolah tersebut.

Para guru Madrasah Annisa tinggal di lingkungan istana. Kesejahteraannya termasuk pembayaran gaji langsung di bawah pengawasan sultan dan permaisuri. Jumlah murid Madrasah Annisa 35 orang per kelas. Jumlah tersebut hanya di kelas-kelas rendah atau Madrasah Ibtidaiyah. Sementara, untuk murid di tingkat Tsanawiyah jumlah muridnya sedikit dibandingkan dengan tingkat Ibtidaiyah sebagaimana dituturkan oleh Rugayyah (84 tahun). Sultan dan Tengku Maharatu menerapkan pendidikan gratis bagi murid-murid Madrasah Annisa. Murid-murid tersebut ada yang memang sejak semula sengaja masuk ke Madrasah Annisa untuk belajar agama dan pengetahuan lainnya di tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Ada juga di antara mereka yang merupakan pelajar di sekolah pemerintah, seperti HIS atau Sekolah Melayu Kelas Dua (*Inlandsch School*) di pagi hari dan mengikuti pendidikan di Madrasah

Annisa, terutama di tingkat Ibtidaiyah pada sore hari. Menurut Tennas Effendi yang juga dikutip Yusuf *et al.* (1992: 172), umumnya, alumni kedua madrasah itu menjadi muballighat.

Kurikulum Madrasah Annisa memiliki kekhasan sebagai lembaga pendidikan agama dan berbeda dengan kurikulum Sultanah Latifah School sebagai sekolah keterampilan. Di Madrasah Annisa diajarkan pelajaran agama meliputi membaca al-Qur'an, ibadah shalat, Rukun Islam, Rukun Iman, Tauhid, Fiqh, Hadis, dan Kesenian Arab. Sedangkan pengetahuan umum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, menulis Bahasa Arab, Bahasa Melayu, dan keterampilan perempuan. Murid-murid diajarkan menyulam, menerawang, menjahit, membuat perlengkapan anak-anak seperti topi dan kaos kaki, dan lain-lain. Pada tingkat Tsanawiyah, ditambah mata pelajaran baru, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, ilmu ukur, beberapa keterampilan, dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya guru dan murid-murid, terutama murid tingkat Tsanawiyah yang berpeluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diberikan bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke Diniyah Putri Padang Panjang. Selain telah menerapkan sistem kelas dan mata pelajaran tertentu yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum, Madrasah Annisa juga memberikan ijazah atau surat keterangan tamat belajar bagi murid-murid yang telah menamatkan pendidikannya di sana. Madrasah Annisa ditutup dan sekolahnya bersama dengan Madrasah Taufikiyah dijadikan MTsN Siak Sri Indrapura.



Surat Keterangan Tamat Belajar (Sumber: Dok. pribadi)

Salah seorang alumni Diniyah Putri Padang Panjang, Aisyah Umar yang berasal dari Pasir Pangaraian, daerah Kabupaten Rokan Hulu sekarang mendirikan sekolah khusus perempuan di daerah Pasir Pangaraian pada tahun 1938 dan diberi nama Diniyah Putri. Menurut Roslaini Djadin (lahir 1938), Aisyah Umar mendapat dukungan neneknya yang bernama Chadijah, dan masyarakat Pasir Pangaraian. Aisyah Umar menjadi guru di sekolahnya. Selain itu, ia juga memberikan kursus dasar bisa baca tulis kepada perempuan-perempuan muda yang telah berumah tangga. Kursus ini disebut “sekolah menyesal”, yang dimaksudkan adalah menyesal kalau tidak sekolah. Istilah ini sama dengan yang dipakai sebelumnya oleh Rahmah el-Yunusiyah tatkala memberi pengajaran baca tulis kepada kaum perempuan muda yang telah berumah tangga di Padang Panjang. Sebagaimana umumnya alumni Diniyah Putri Padang Panjang, Aisyah Umar juga mahir bertabligh untuk

menyampaikan ajaran agama yang terkait dengan kaum perempuan sekaligus memperkenalkan sekolahnya. Perjuangan dan pengaruh Aisyah Umar tersebut tidak umum di Pasir Pangaraian karena perempuan bersekolah tinggi seperti dirinya juga sangat sedikit.

Akan tetapi, aktivitas dan perjuangan Aisyah Umar, terutama dalam kepandaianya berpidato, keaktifannya di organisasi, dan semangatnya dalam memberikan pendidikan kepada kaumnya telah menginspirasi sejumlah anak gadis di Pasir Pangaraian untuk bersekolah lebih tinggi ke Diniyah Putri Padang Panjang. Pada tahun 1950, ada tujuh gadis belia asal Pasir Pangaraian yang melanjutkan sekolah ke Diniyah Putri Padang Panjang. Nasib Diniyah Putri di Pasir Pangaraian pada masa Jepang (1942-1945) sama dengan nasib lembaga pendidikan rendah lainnya. Sekolah ini terhenti atau ditutup karena perang. Pada masa perang kemerdekaan (1945-1950), Diniyah Putri ini memang ditutup. Akibat agresi Belanda, banyak penduduk mengungsi, termasuk Aisyah Umar yang kemudian meninggal pada tahun 1950. Sekolah ini tidak bertahan lama, setelah penyerahan kedaulatan, antara tahun 1951 hingga 1957, diduga Diniyah Putri telah ditutup dan rumah sekolahnya digunakan untuk sekolah Muhammadiyah (Idris, 2000: 8; Puanri, 2007: 167).

## **G. Simpulan**

Dalam budaya Melayu yang sarat dengan nilai-nilai agama Islam, kedudukan kaum perempuan cukup terlindungi, bukan hanya karena mereka Muslim, tetapi juga karena mereka adalah orang Melayu. Sekalipun ada pembatasan oleh adat terhadap aktivitas kaum perempuan,

tetapi pembatasan itu bertujuan menjaga harkat, martabat, dan marwah kaum perempuan, bukan sebaliknya karena melecehkan. Dalam ungkapan adat dan tunjuk ajar Melayu ada dikatakan: *“apa tanda Melayu sejati, marwah perempuan ia hormati.”* Ada juga, *“ apa tanda Melayu pilihan, tahu memelihara marwah perempuan.”*

Perempuan dalam budaya Melayu di Riau, tepatnya pada masa kolonial, memiliki sejumlah keterbatasan dan kelebihan. Keterbatasan yang mereka alami antara lain adat berkurung dan terbatasnya kebebasan bersekolah. Kaum perempuan Melayu juga menghadapi masalah perkawinan, seperti pernikahan anak-anak, kawin lari, permaduan dan perceraian. Tindakan-tindakan memprihatinkan tersebut sebenarnya menimpa kaum perempuan di berbagai tempat di Indonesia pada awal abad ke-20. Sementara itu, pada saat yang sama perempuan Melayu juga dikenal memiliki sejumlah aspek positif atau kelebihan karena pengaruh adat, yaitu kepandaian bertenun, bersyair dan berdah, memiliki posisi tertentu bahkan di dalam kekuasaan kerajaan, dan lain-lain. Berbagai kelebihan perempuan Melayu Riau tersebut dikisahkan di dalam berbagai sumber, dari hikayat, tutur lisan, hingga karya sejarah. Kedudukan yang tinggi untuk kaum perempuan Melayu karena adat telah bertemu dengan agama Islam. Islamlah yang menempatkan harkat dan kedudukan kaum perempuan pada tempat yang tinggi melampaui apa yang diberikan adat.

Umumnya perempuan Melayu Riau pada awal abad ke-20 melek huruf Arab Melayu. Sekalipun anak gadis Melayu mengalami pingitan atau berkurung, tetapi mereka sebelum akil balig telah menerima pendidikan agama Islam yang

diselenggarakan di rumah mereka atau di rumah seorang guru. Pendidikan tradisional juga diberikan dalam bentuk pembacaan hikayat atau dengan cara bersenandung dan bersyair. Setelah menginjak remaja, perempuan Melayu menerima pendidikan keterampilan tangan, seperti menjahit, menyulam atau menenun.

Pendidikan modern yang diperkenalkan Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak mudah diterima oleh masyarakat Melayu. Mereka bukannya tidak setuju dengan pendidikan modern, tetapi mereka tidak suka dengan penjajah. Berbagai ekses sosial budaya, agama dan kebangsaan yang dirasakan oleh masyarakat karena anak-anak bumiputera bersekolah di sekolah pemerintah telah menyebabkan mereka mendirikan lembaga pendidikan modern. Khusus untuk pendidikan perempuan, mereka mendirikan sekolah tersendiri dengan kurikulum yang terkait dengan peran jender kaum perempuan pada waktu itu.

Sejak Kartini membuka sekolah khusus perempuan, pendidikan jalan tengah ini lebih bertujuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan melalui pendidikan. Kartini diikuti oleh Dewi Sartika, Rohana Kudus dan Rahmah el-Yunusiyah mendirikan sekolah yang memberikan pendidikan dasar baca tulis dan pendidikan keterampilan anak gadis. Di Kerajaan Siak, Sultanah Latifah School juga mengajarkan keterampilan anak negeri seperti tenun. Melalui keterampilan ini, sekalipun kaum perempuan Siak berada di ranah domestik tetapi mereka produktif. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sultanah Latifah School berperan dalam diseminasi kerajinan tenun Siak.

Sebaliknya keberadaan Madrasah Annisa lebih merupakan pelengkap dari kekurangan Sultanah Latifah School dalam pendidikan agama Islam. Berdasarkan pertimbangan sosial, politik dan ekonomi, Sultan Syarif Kasim II, menganggap pendidikan untuk perempuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman adalah pendidikan kerumahtanggaan dan pendidikan agama Islam. Keberadaan Madrasah Annisa juga terkait dengan keberadaan Diniyah Putri Padang Panjang. Hal yang sama juga dengan keberadaan Diniyah Putri Pasir Pangaraian. Pendirinya adalah alumni Diniyah Putri Padang Panjang dan ia menyelenggarakan pendidikan yang hampir sama dengan yang gurunya, Rahmah el-Yunusiyah lakukan di Padang Panjang. Sepak terjang Aisyah Umar telah menanamkan kesadaran sejumlah kaum perempuan Pasir Pangaraian pada masa berikutnya untuk meneruskan langkahnya untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi dengan cara memasuki sekolah khusus perempuan berasrama seperti Diniyah Putri Padang Panjang.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1997. "Pahlawan Dalam Perspektif Sejarah", dalam Suwardi, dkk. *Sultan Syarif Kasim II Sultan Siak Sri Indrapura (1915-1945)*.Bengkalis: Pemda Tingkat II Bengkalis
- Ahmad, Kassim. 1994. *Hikayat Hang Tuah*. Cetakan Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia

- Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch Indie over 1914*. Eerste Deel Tekst. Batavia: Landsdrukkerij. 1916. KITLV
- Ali, A. Mukti. 1971. *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia. Bagian Lampiran Rencana Pelajaran Pekerjaan Tangan/Pertanian pada Madrasah Wajib Belajar 8 Tahun*. Jogjakarta: Nida
- Al-Azhar et al. 2008. *Atlas Kebudayaan Melayu Riau*. Pekanbaru: Unri.
- Van Anrooij, H.A Hijmans. 1885. "Nota Omtrent het Rijk van Siak", *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde* (TBG). Deel XXX
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos
- \_\_\_\_\_. 2000. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos
- \_\_\_\_\_ et al. 2007. "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia", dalam Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman. *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton and Oxford: Princeton University Press
- Barnard, Timothy P. 2006. *Pusat Kekuasaan Ganda: Masyarakat dan Alam Siak dan Sumatra Timur 1674-1827*. Terjemahan Sita Rohana. Pekanbaru: Unri Press
- Bintang Hindia* tahun 1920, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931.
- Brugmans, I.J. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij
- \_\_\_\_\_. 1987. "Politik Pengajaran", dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*.



- Terjemahan Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Van der Chijs, J.A. 1977. "Report of 1831 in Indigenous Education", dalam Chr. L.M. Penders. *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*. Queensland: University of Queensland Press
- Creutzberg, K.F. en Hardeman, J. 1916. *Het Onderwijs in Nederlandsch Indië*. Drukkerij Korthuis: 'sGravenhage
- Dekker, Deuwes. 1913. "Assosiatie Politiek", *Koloniaal Tijdschrift*. Tweede Jaargang. Eerste Halfjaar
- Effendi, Tennes. 1972. *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Riau
- Gramberg, J.S.S, 1864. "Reis naar Siak", *TBG*. Dell XIII
- Hamidi, U.U. 2002. *Riau Doeloe, Kini, dan Bayangan Masa Depan*. Pekanbaru: Pusat Kajian Melayu UIR
- Hamka. 1982. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Cetakan Keempat. Jakarta: Umminda
- \_\_\_\_\_. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Harahap, Abdul Manan (79 tahun). Pernah menjadi guru di Madrasah Taufikiyah dan Madrasah al-Nisa. Wawancara. Siak Sri Indrapura, 1 November 2009
- Harahap, Parada. 1926. *Dari Pantai ke Pantai*. Batavia: Bintang Hindia
- Hasibuan, Soeman. 1931. *Kasih Tak Terlarai*, Tjetakan Kedua. Batavia Centrum: Balai Poestaka
- \_\_\_\_\_. 1932. *Mencari Pencuri Anak Perawan*. Tjetakan Kedua. Batavia: Balai Poestaka

- Hasnah, Encik (1971). Tokoh Perempuan Riau yang melestarikan Tenun Siak. *Wawancara*. Pekanbaru, 30 Juni 2009. Ia belajar menenun dari ibunya, ibunya belajar menenun dari Hajah Aminah yang belajar menenun dari Tengku Agung dan sering dipanggil sultan untuk bekerja di istana.
- Hurgronje, C. Snouck. 1973. *Islam di Hindia Belanda*. Terjemahan. S. Gunawan. Kata Pengantar Taufik Abdullah. Jakarta: Bhratara
- \_\_\_\_\_. 1977. "The Ideal of Association 1911", dalam Penders. Chr. L.M. (ed. & Transl.). *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*. Queensland: University of Queensland
- Jamil, O.K. Nizami. 2005. *Pakaian Tradisional Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
- \_\_\_\_\_. 2008. *Autobiografi O.K. Nizami Jamil: Negeri Siak Tanah Kelahirannya Anak Kampung Dalam*. Pekanbaru: LAM Riau
- \_\_\_\_\_. 73 tahun. Ketua LAM Siak dan Pengurus LAM Riau. *Wawancara*. Pekanbaru. 30 Oktober 2009. Ia bercerita berdasarkan kisah dari kedua orang tuanya, ibunya adalah anak angkat Tengku Maharatu, sementara ayahnya adalah sekretaris pribadi Sultan Syarif Kasim II
- Kartini, R.A. 2006. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Terjemahan Armijn Pane. Cetakan Keduapuluh tiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Kasiri. 1993. "Soeman Hs: Guru yang Berjiwa Guru", dalam Majalah *Tempo: Memoar Senarai Kiprah Sejarah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. No. 262/93

- Lekkerkerker, C. 1914. "Meisjesonderwijs, Coeducatie, en Meisjesscholen voor de Inlandsche Bevolking in Nederlandsch-Indie", *Kolonial Tijdschrift*. Van den 3en jaargaang tweede halfjaar
- Lubis, Nina H. 2006. *9 Pahlawan Nasional Asal Jawa Barat*. Bandung: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Universitas Padjadjaran
- Lutfi, Muchtar et al. (eds.). 1999. *Sejarah Riau*. Reproduksi. Pekanbaru: Biro Bina Setwilda Tingkat I Riau
- Luthfi, Amir. 1991. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Siak 1901-1942*. Pekanbaru: Susqa Press
- Memorie van Overgave* (MvO). 1917. Gouverneur der Oostkust van Sumatra, Van der Plas (Juli 1917). NA
- \_\_\_\_\_. 1931. Controleur Siak, J. J.J. van Kempe Valk (6 Mei 1931). NA
- \_\_\_\_\_. 1934. Controleur van Siak, G.R. Seinstra. NA
- \_\_\_\_\_. 1937. Controleur Siak, J. Dijk (19 Juli 1935-7 Agustus 1937). NA
- \_\_\_\_\_. 1938. Assistent Resident van Bengkalis, Meyenfeldt, Dr. H.D. von. 6 Maart 1937-27 October 1938 (*Vervolg Memorie van Overgave*). NA
- Mestoko, Sumarsono et al. 1985. *Pendidikan di Indonesia: Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka
- Muthalib, Rugayyah binti Lebai Abdul (84 tahun)  
Murid Madrasah al-Nisa. *Wawancara*. Siak Sri Indrapura, 1 November 2009. Ia masih dapat menceritakan pengalaman hidupnya secara garis besar
- Nasution, S. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Edisi Kedua. Bandung: Jemmars

- Netscher, E. 1862. "Togjes in het Gebied van Riouw en onderhoorigheden". *TBG*. Deel XII. Leiden; KITLV
- Van Niel, Robert. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Zahara Deliar Noer. Cetakan Kedua. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Padang Panjang, Diniyah-Putri. 1939. *Peringatan 15 Tahun Perguruan Diniyah Putri*
- Pewartu Deli. Maret- Mei 1924
- Pijper, G.F. 1987. "Politik Islam Pemerintah Belanda", dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans (peny.). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terj. Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pringgodigdo, A.K. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Dian Rakyat
- Puanri, Pusdatin. 2007. *Mutiara Yang Terjaring*. Edisi Revisi. Pekanbaru: Pusdatin Puanri
- Sinar, Tengku Luckman. 2007. "Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Timur", dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra et al. (ed.). *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu
- Stibbe, D.G. (red.) 1919. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. Tweede Druk. Deerde Dee. N-Soema.'s Gravenhage: Martinus Nijhoff
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES
- Tjaja Sumatra*. 1918, 1919, 1920, 1924.
- Vreede de-Stuers, Cora. 1992. "The Life of Rangkeyo Rahmah El-Yunusiya: The Facts and the Image", dalam Elsbeth Locher Scholten and Anke Nichof. *Indonesian Women in*

- Focus: Past and Present Nation*. Verhandeligen van het KITLV 127. Second Printing. Leiden: KITLV
- \_\_\_\_\_. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Terjemahan Elvira Rosa (Mouton & Co's Gravenhage, 1960). Jakarta: Komunitas Bambu
- Yunus, Mahmud. 1960. *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah
- Yusuf, Ahmad *et al.* 1992. *Sultan Syarif Kasim II: Raja Terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura: Pemerintahan, Perjuangan, Warisan*, Pekanbaru: Pemprow. Riau

**III**

**KESETARAAN GENDER  
DALAM BUDAYA MELAYU RIAU**

***Riswani***



# KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA MELAYU RIAU

*Riswani*

## A. Pendahuluan

Penulis dan pencerita Melayu menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang indah, tinggi, dan mulia kedudukannya. Perempuan dilambangkan bagaikan “*bulan purnama*” dengan keindahan yang gemilang, berkelau bagaikan “*bintang kejora*” disanjung bagaikan “*dewi kayangan*”.

Selain di dalam penulisan dan cerita-cerita, penggambaran perempuan sebagai makhluk yang indah, tinggi dan mulia kedudukannya bahkan kedudukannya setara dengan kedudukan laki-laki juga ditemukan di dalam ungkapan-ungkapan Melayu. Ungkapan merupakan perkataan yang menyatakan suatu makna atau maksud tertentu dengan bahasa kias yang mengandung nilai-nilai luhur, moral dan etika, dan nilai-nilai pendidikan yang selalu berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan adat istiadat secara turun temurun dan dituturkan dengan kata-kata yang singkat namun mudah dipahami atau dimengerti. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam sebuah ungkapan Melayu yang berbunyi:



*“elok langit karena berbulan, elok bumi berkayu kayan, elok laut karena berikan, elok bangsa karena perempuan.”*

Pada ungkapan yang lain ditemukan pula kesetaraan antara laki-laki dan perempuan:

*“tanda Melayu memegang adat, laki-laki perempuan setimbang sesukat, adat hidup sama sedusun laki-laki perempuan tuntun menuntun.”*

Ungkapan-ungkapan tersebut sebuah perlambangan yang mencerminkan nilai budaya Melayu menghormati, memuliakan, dan mengutamakan kaum perempuan dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Dalam tataran teori, perempuan merupakan makhluk yang patut dihormati dan dihargai, kedudukannya setara dengan kedudukan laki-laki, namun dalam realitas budaya tidak demikian. Studi yang dilakukan oleh Sudirman M. Johan dan Husni Thamrin menemukan perempuan yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja pabrik di Kabupaten Palalawan. Begitu juga di Kabupaten Kuantan Sengingi, mereka menemukan perempuan yang harus bangun separuh malam untuk mempersiapkan segala sesuatu di rumah seperti memasak dan mencuci sebelum mereka mencari nafkah seperti berdagang dengan cara mengumpulkan hasil-hasil perkebunan di sekitarnya dan kemudian dijual kepasar. Penelitian mereka juga menemukan tingkat pendidikan perempuan jauh lebih rendah dari pendidikan laki-laki, begitu juga dalam hal

---

<sup>1</sup>Tennas Efendi, *Jender Dalam Adat dan Budaya Melayu*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan Daerah Rencana aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pekanbaru, 2001.

partisipasi politik, perempuan jauh tertinggal dibanding laki-laki.<sup>2</sup>

Ketidaksetaraan tersebut seperti diperkuat oleh tradisi dan ketentuan adat yang dikenal dengan istilah “*pantang larang*” yang ada dalam tradisi Melayu. Pantang larang merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang yang diturunkan secara lisan turun kemurun. Pantang larang bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah budaya yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Melayu yang menyebabkan termarginalisasi dan tersubordinasi kaum perempuan Melayu? atau karena keterbatasan masyarakat itu sendiri dalam menafsirkan tradisi dan adat yang penuh dengan simbol-simbol? Selanjutnya, tulisan ini juga ingin melihat konsep kesetaraan yang bagaimana sebenarnya yang ada dalam budaya Melayu.

## **B. Pengertian Gender dan Budaya Melayu**

### **1. Gender**

Pada hakikatnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Walaupun memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, itu semua agar

---

<sup>2</sup>Sudirman.M.Johan dan Husni Thamrin, *Gender dalam Kultur Agraris*, Pekanbaru: Suska Press, 2009, hal 165

keduanya saling melengkapi. Namun, dalam perjalanannya, banyak terjadi perubahan peran dan status antara keduanya, terutama dalam masyarakat. Proses tersebut lama kelamaan menjadi kebiasaan dan membudaya serta berdampak pada perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin yang memunculkan istilah gender. Istilah ini mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses perubahan peran status tadi secara sosial dan budaya.

Ada perbedaan pendapat mengenai asal kata gender. Ada yang mengatakan gender berasal dari bahasa Latin "*genus*" yang berarti jenis atau tipe. Ada pula yang berpendapat bahwa gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam perkembangan selanjutnya, kata gender mengalami perluasan makna yang pada hakekatnya tetap mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi fungsi, atau perlakuan, yang diberikan oleh masyarakat umum secara turun temurun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gender adalah sifat atau perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya.

Istilah gender untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Ann Oakley, seorang sosiolog yang berasal dari Inggris. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara istilah gender dengan istilah seks. Seks (jenis kelamin) adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fakta biologis. Perempuan melahirkan dan menyusui anak, sementara laki-laki memproduksi sperma. Laki-laki dan perempuan memiliki tubuh, hormon dan kromosom yang berbeda. Fakta biologis tersebut adalah sama di setiap budaya

di dunia ini. Sedangkan gender, menjelaskan semua atribut, peran dan kegiatan yang terkait dengan "menjadi perempuan" atau "menjadi laki-laki". Gender berkaitan dengan bagaimana kita pahami dan diharapkan untuk berfikir dan bertindak sebagai perempuan atau laki-laki, karena begitulah cara masyarakat memandangnya. Gender juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana seseorang menjalankan keharusan-keharusan, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana menjadi laki laki, berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya.<sup>3</sup>

Istilah gender dimunculkan ke dalam kamus *Concise Oxford Dictionary of Current English*, edisi ke-8, 1990 yang merupakan penggolongan gramatikal terhadap kata benda dan kata lain yang berkaitan dengannya yang secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan.

Dalam kamus *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Kamus *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Lely Zeilani, *Jender Sebagai Analisa*, Makalah ini Disampaikan Dalam Seminar Sehari Jender Dalam Perspektif Budaya dan Agama. Pekanbaru, 2000.

<sup>4</sup>Nasruddin Umar, 1999, *Agama dan Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, hal 294

Gender dan jenis kelamin biologis harus dibedakan secara mendasar. Seseorang dilahirkan sebagai perempuan dan laki-laki merupakan pemberian yang mutlak, kemudian interpretasi biologis oleh kultur memberikan jalan yang menjadikan seseorang maskulin atau feminin. Sedangkan gender diumpamakan kostum dan topeng di teater yang menggambarkan kepada orang lain tentang diri seseorang feminin atau maskulin. Hal inilah yang membentuk peran gender yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam aturan rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga dan sebagainya.

Menurut Nasruddin Umar, untuk memahami konsep gender, maka perlu dibedakan antara kata gender seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki mempunyai penis, memproduksi sperma dan memiliki jakun, sementara perempuan mengalami menstruasi, memiliki alat reproduksi, bisa mengandung, melahirkan, menyusui serta menopause. Hal-hal biologis ini tidak dapat diperukarkan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini merupakan ketentuan ketentuan Tuhan (kodrat) yang tidak mungkin diganggu gugat.<sup>5</sup>

Selanjutnya, konsep gender yakni suatu sifat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki

---

<sup>5</sup>*Ibid.* 299

dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang tidak dapat dipertukarkan. Artinya, bisa saja ada laki-laki yang lemah, lembut atau keibuan, sebaliknya, mungkin saja ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Ciri ini dilekatkan akibat konstruksi sosial masyarakat, sehingga akhirnya dipandang seolah-olah sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat laki-laki dan perempuan. Maka gender bukanlah perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi biologis, melainkan perbedaan yang terbentuk dari sebuah konstruksi sosial. Konstruksi sososial ini kemudian melekatkan bahwa laki-laki itu memiliki streotipe maskulin sementara perempuan memiliki stereotipe feminin.

Banyak stereotipe bersifat umum sehingga menjadi ambigu, misalnya ketegori maskulin dan feminin. Memberi cap stereotipe sebagai maskulin atau feminin pada individu dapat menimbulkan konsekwensi signifikan. Mencap laki-laki sebagai maskulin dan perempuan sebagai feminin dapat menimbulkan pembatasan peran, status, dan tanggung jawab dalam kelompok sosial. Sebaliknya, menetapkan laki-laki sebagai feminin dan perempuan sebagai maskulin dapat menghilangkan status sosial dan penerimaan mereka dalam kelompok. Maka, sebenarnya peleketan semacam ini seharusnya tidak dilanggengkan.

Adanya pelekatan-pelekatan tertentu pada jenis kelamin menimbulkan ketidakadilan gender. Fakih<sup>6</sup> merinci manifestasi ketidakadilan gender wujud dalam bentuk

---

<sup>6</sup>Mansour Faqih, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal 57

marjinalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), stereotipe, kekerasan (*violence*) dan beban kerja yang berlebihan (*double burden*).

Marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Misalnya, anggapan bahwa fungsi perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan sehingga ketika mereka bekerja di sektor publik gaji dan jaminan kesejahteraan lainnya berbeda dari laki-laki selaku pencari nafkah utama. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya. Misalnya, perempuan selalu dianggap orang yang bertanggung jawab dalam hal urusan domestik atau reproduksi, laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Di sisi lain penghargaan terhadap peran tersebut berbeda sama sekali. Beban ganda (*double burden*) merupakan beban kerja yang diterima oleh suatu jenis kelamin lebih banyak dibanding jenis kelamin lainnya. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah dan kadangkala ikut mencari nafkah bahkan ada yang sebagai pencari nafkah utama.

Ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat mendorong munculnya gerakan-gerakan untuk menuntut kesetaraan. Secara sosiologi perjuangan tersebut dibagi atas dua kelompok besar, yaitu konsep *nurture* (konstruksi budaya) dan *nature* (alamiah). Selain kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromitis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*). Paham ini menekankan pada

konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Menurut teori, *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang fokus memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau *fifty-fifty* yang kemudian dikenal dengan istilah persamaan kuantitas (*perfect equality*), perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun bangsa. Karena itu, aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proposional dalam segala aktifitas masyarakat seperti ditingkat manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang-bidang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat program khusus (*affirmative action*) guna memberi peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut.

Menurut teori *nature*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat dirubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu juga



dalam kehidupan berkeluarga, karena tidak mungkin sebuah kapal dikomandoi oleh dua nahkoda. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak di dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan-kesepakatan (komitmen) antara suami istri dalam keluarga, atau antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat aliran kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.

## **2. Budaya Melayu**

Banyak definisi yang telah diberikan oleh pakar mengenai kebudayaan. Suparlan misalnya, sebagaimana

yang dikutip oleh Sindu Galba dkk (2000)<sup>7</sup> mendefinisikan kebudayaan sebagai seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dipunyai oleh masyarakat tertentu yang digunakan sebagai *blue print* (pedoman) bagi kehidupan masyarakat bersangkutan. Sebagai contoh pedoman, maka kebudayaan digunakan sebagai acuan untuk interpretasi lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong serta menghasilkan terwujudnya tindakan-tindakan yang bermakna dalam menghadapi lingkungan tersebut untuk dapat memanfaatkannya.

Setiap kebudayaan terdiri atas sistem-sistem ketegore-sasi, yaitu untuk mengkategorisasikan dirinya dalam lingkungan-lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tersebut yang sistem-sistem pengkategorisa-siannya menghasilkan konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan. Konsep-konsep tersebut bukan hanya penge-tahuan, tetapi juga teori dan metode-metode untuk peng-kategorisasikan, merangkai konsep-konsep yang terseleksi. Konsep-konsep yang dirangkai akan menjadi sebuah konsep baru dan atau teori serta metode baru yang relevan kegunaannya dengan permasalahan yang ada dalam ling-kungan yang dihadapi. Operasionalisasi dari suatu kebu-dayaan di dalam kehidupan masyarakat adalah melalui pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat tersebut. Pranata yang merupakan sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan pranata itu terwujud karena digunakan

---

<sup>7</sup>Galba, Sindu, dkk. *Upacara Tradisional di Daek Lingga*, Tanjung Pinang: Bapeda Kabupaten Kepulauan Riau dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanggung Pinang

untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut.

Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai ide, gagasan, dan perilaku serta benda sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu, Koentjaraningrat (1980) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>8</sup>

Proses belajar adalah kata kunci dalam kebudayaan, kerana kebudayaan tidak lepas dari proses belajar. Kebudayaan harus dipelajari bukan datang dengan sendiri, sehingga dikenal istilah internalisasi dan sosialisasi, dua buah konsep yang berbeda tetapi seringkali disamakan dalam penggunaannya. Berbeda, karena internalisasi adalah penanaman nilai-nilai budaya, sedangkan sosialisasi adalah proses permasyarakatan agar dikemudian hari seseorang dapat berperan sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakatnya.

Dari berbagai definisi kebudayaan sebagaimana disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya dalam arti luas yang diperoleh dengan cara belajar.

Tidak hanya dalam mendefinisikan kebudayaan, dalam menetapkan unsur-unsur kebudayaan para pakar juga

---

<sup>8</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Akasara Baru, 1986

berbeda. Ernest Cassirer misalnya membagi kebudayaan ke dalam lima unsur yaitu kepercayaan, bahasa, kesenian, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Koentjaraningrat membaginya ke dalam tujuh unsur yang sifatnya universal, yaitu, bahasa, sistem teknologi, sistem matapencarian, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan dan sistem religi, sistem kesenian. Bahkan berdasarkan analisa baru para pakar terhadap ketujuh unsur menurut Koentjaraningrat yang dinilai tumpang tindih satu sama lain, para pakar mengatakan bahwa unsur kebudayaan pada setiap suku bangsa terdiri dari sepuluh unsur, yakni sistem kepercayaan, sistem komunikasi, sistem kesenian, sistem ekonomi, sistem politik, sistem kekerabatan, sistem kesehatan, sistem transportasi, sistem tempat tinggal dan sistem pendidikan. Terlepas dari masalah perbedaan jumlah unsur dalam kebudayaan, yang pasti keduanya menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur tersebut adalah sebagai dasar mereka untuk menanggapi lingkungannya, baik berupa lingkungan alam dan juga lingkungan sosial.

Sebagai sebuah perwujudan dari daya cipta dapat bentuk benda dan wujud dari daya rasa adalah aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Karya kesenian termasuk pada kelompok yang kedua ini. Adapun wujud dari daya karsa manusia adalah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Dalam kenyataannya, masih banyak orang yang keliru dalam mengartikan kata budaya atau kebudayaan. Kata budaya disamakan dengan kata kesenian. Sehingga orang menganggap budaya Melayu adalah kesenian Melayu.

Sebenarnya jika merujuk pada pengertian kata sebagaimana yang telah diterangkan diatas, dapat diartikan kebudayaan Melayu adalah semua aspek yang merupakan perwujudan daya cipta, karsa dan rasa orang Melayu. Apakah itu tatanan ekonomi, tatanan sosiologi, arsitektur, sistem kekerabatan, pertanian dan sebagainya.<sup>9</sup> Termasuk didalamnya pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

### 3. Melayu Riau

Menurut Hasan Yunus, seorang peneliti naskah Melayu Riau, ada tiga kemungkinan asal nama Riau. Pertama, kata Riau berasal dari bahasa Portugis “*rio*” yang artinya sungai. Kedua, berasal dari ucapan Sinbad al-Bahar dalam kitab *Alfu Laila Walaila* yang menyebut “*riahi*” untuk nama suatu tempat di pulau Bintan. Ketiga, kata *riau* berasal dari penuturan orang Melayu sendiri, diangkat dari kata “*rioh*” atau “*riuh*” yang artinya hiruk pikuk, ramai orang bekerja.<sup>10</sup> Kemungkinan ketiga ini lebih mendekati kebenarannya apabila dihubungkan dengan letak geografis daerah Riau yang selalu ramai karena terletak ditengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Dunia Barat dan Dunia Timur.

Menurut sumber sejarah yang dikutip oleh Puji Astuti dalam UU Hamidy, bahwa setelah Riau menjadi negeri, maka diangkatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sebagai

---

<sup>9</sup>Sudarmo Mahyudin, *Pelestarian dan Pengembangan Budaya Berfikir Melayu*, makalah Kumpulan Seminar Budaya Melayu Sedunia 2003, Pekanbaru, 2003, hal 207.

<sup>10</sup>UU. Hamidy, *Riau Doelul Kini dan Bayangan Masa Depan*, Pekanbaru, UIR Press, 2002, hal

Sultan Riau yang pertama pada tanggal 4 Oktober 1722. Setelah itu nama Riau dipakai untuk menunjukkan satu diantara empat daerah utama kerajaan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Kemudian setelah perjanjian London 1842 yang membela dua kerajaan tersebut menjadi dua bagian, maka nama Riau digabung dengan Lingga. Sehingga terkenal pula dengan kerajaan Riau Lingga. Dalam masa pemerintahan Belanda nama ini dipergunakan untuk daerah kepulauan Riau sekarang di tambah dengan Pesisir Timur Sumatera. Begitu juga dalam zaman Jepang. Dalam zaman kemerdekaan, mula-mula nama Riau dipergunakan untuk nama sebuah kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Setelah Propinsi Riau terbentuk tahun 1957, maka nama itu disamping dipergunakan untuk sebuah kabupaten, dipergunakan pula untuk nama sebuah provinsi yaitu Provinsi Riau.<sup>11</sup> Kemudian ketika terjadi otonomi daerah, Provinsi Riau dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Riau yang ibu kotanya Tanjung Pinang dan Provinsi Riau dengan ibu kotanya Pekanbaru.

Seperti halnya asal kata Riau, asal kata Melayu juga memiliki banyak variasi. Ada yang berpendapat bahwa kata Melayu berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) dan *yu* (yang berarti negeri). Pengertian itu dinisbahkan kepada kata Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Dalam bahasa India Tamil dikenal pula kata Melayu yang artinya tanah tinggi atau bukit, disamping kata *malay* yang artinya hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang Melayu pada

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 8

awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam sejarah Melayu, Bukit Seguntang Mahameru.

Negeri ini dikenal sebagai negeri yang banyak mendapat hujan, karena terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Selanjutnya dalam bahasa Jawa, kata *Melayu* berarti lari atau berjalan cepat. Di Johor dan Bengkulu dikenal pula sungai yang bernama Melayu. Semua istilah tersebut akhirnya dapat dirangkum hingga menjadi suatu pengertian bahwa Melayu adalah suatu negeri yang mula-mula didiami, dan dilalui oleh sungai yang diberi nama sungai Melayu. Mereka membuat negeri di atas bukit, karena ada pencarian es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau rendah jadi terendam oleh air. Untuk menghindari banjir, mereka berlarian mencari tempat tinggi (bukit), lalu di situlah mereka membuat negeri. Akhirnya, pada tahun 644 Masehi, melalui tulisan Cina yang berbunyi *Mo-lo-yue* mengirim utusan ke China dengan membawa hasil bumi sebagai persembahan kepada kaisar, dikenalkan Melayu sebagai sebuah kerajaan. Kebanyakan pendapat mengatakan bahwa kerajaan itu berada di Jambi sekarang ini.<sup>12</sup>

Orang Melayu dapat dibedakan menjadi Melayu Tua (proto Melayu) yang merupakan gelombang perantau Melayu pertama yang datang ke kepulauan Melayu. Diperkirakan kedatangan mereka sekitar tahun 3000-2500 sebelum masehi. Adapun yang tergolong kedalam keturunan ini antara lain orang Talang Mamak, Orang Sakai dan Suku Laut. Mereka pada awalnya amat tertutup dengan budaya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 10

dari luar dan lebih suka hidup di daerah pedalaman.<sup>13</sup> Yang kedua adalah Melayu Muda (Deutro Melayu). Gelombang kedatangan nenek moyang mereka diperkirakan tiba antara 300-250 tahun sebelum Masehi. Melayu ini lebih suka hidup di daerah pinggiran pantai dan sungai, sehingga mereka amat terbuka dengan budaya dari luar.<sup>14</sup>

Pada awalnya, agak sukar untuk menentukan jati diri orang Melayu, karena secara ras, orang Melayu telah mendiami daerah Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Pesisir Timur Sumatra, Riau Jambi dan pesisir Palembang.<sup>15</sup> Dengan diislamkannya kerajaan Melayu di Malaka pada tahun 1400 M dan Kerajaan Pasai, Melayu Muda lebih suka menganut agama Islam dan akhirnya terbentuklah wadah baru bagi orang Islam yang disebarkan dari Melaka ke segenap penjuru Nusantara. Wadah ini juga membentuk “Budaya Melayu” semenjak itu terbentuklah konsep Melayu yang baru, yakni tidak dikaitkan dengan geologis, tetapi oleh kesamaan kultural, agama Islam, bahasa dan adat istiadat Melayu.<sup>16</sup> Dengan demikian, unsur-unsur Islam terintegrasi di dalam budaya Melayu, sehingga dikatakan budaya Melayu identik dengan Islam. Di kalangan orang Melayu beredar slogan “masuk Melayu berarti masuk Islam”.

Setelah terpecahnya imperium Melayu oleh perjanjian London sebagaimana yang telah diterangkan di atas, lahirlah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>15</sup> Tengku Lukman Sinar, *Jati Diri Melayu*, Medan: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Melayu, 1994, hal. 2

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 8



kesultanan Melayu Lingga yang meliputi kerajaan Melayu Riau, Siak, Indragiri, Pelalawan dan kerajaan-kerajaan kecil di Riau.<sup>17</sup> Dengan demikian, dari semenjak zaman dahulu masyarakat Melayu telah berbagi kepada puak-puak, yakni pecahan (bagian) suku bangsa atau etnis seperti puak Melayu Riau, puak Melayu Kampar dan Puak Melayu Indragiri.<sup>18</sup>

UU Hamidy membagi puak Melayu Riau kepada:

1. Puak Melayu Riau-Lingga, mendiami bekas kerajaan Riau-Lingga yakni sebagian besar daerah kepulauan Riau yang sekarang telah menjadi Provinsi Riau, begitu juga dengan Natuna. Mereka sebagian telah nikah-kawin dengan perantau Bugis dalam abad ke-18.
2. Puak Melayu Siak, mendiami bekas kerajaan Siak dan sekitarnya, yang sebagian besar merupakan daerah aliran sungai Siak. Mereka sebagian nikah-kawin dengan keturunan Arab, sehingga sebagian dari sultan Siak keturunan dari Arab
3. Puak Melayu Kampar, mendiami aliran Batang Kampar, mereka ada yang nikah-kawin dengan perantau Minangkabau, dan ada pula dengan orang Jawa yang menjadi romusha Jepang.
4. Puak Melayu Indaragiri, mendiami daerah aliran sungai Indragiri. Mereka ada yang nikah-kawin dengan perantau Banjar dan keturunan Arab.

---

<sup>17</sup>Yusuf Ahmad, *Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau Ke Kesultanan Melayu Lingga-Riau*, Pekanbaru, Pemda TK I Riau, 1993, hal 116.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.11

5. Puak Melayu Rantau Kuantan, mendiami daerah aliran Batang Kuantan yang telah masuk ke dalam Kabupaten Kuantan Sengingi.
6. Puak Melayu Patalangan, mendiami daerah belantara yang dilalui beberapa cabang (anak) sungai di daerah Pangakalan Kuras.<sup>19</sup>

### C. Gender dalam Budaya Melayu

Sebelum membicarakan gender dalam budaya Melayu, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu sistem nilai yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Melayu.

*Pertama*, sistem nilai yang diberikan oleh agama Islam yang merupakan sistem nilai yang dipandang dan diakui sebagai sumber nilai yang paling terpercaya dan benar oleh masyarakat. Sistem nilai agama ini merupakan seperangkat nilai yang berasal dari wahyu Illahi yang bersifat vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu berhubungan manusia dengan Tuhan, hubungan makhluk dengan khalik, sedangkan horizontal adalah hubungan antara sesama manusia. Budayawan Riau, UU. Hamidy, menyayangkan peranan sistem nilai ini sering dipandang sebagai sistem nilai yang vertikal saja, hanya hubungan manusia dengan Tuhan.

*Kedua*, sistem nilai adat yang memberikan ukuran dan ketentuan-ketentuan terhadap bagaimana manusia harus berbuat dan bertingkah laku, serta dengan serangkaian sangsi yang cukup tegas. Sistem ini sifatnya horizontal. Perangkat sistem nilai adat ini diberikan oleh adat melalui

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 12

ungkapan adat yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari pemuka adat (datuk-datuk) terdahulu tentang bagaimana sebaiknya kehidupan dapat diatur, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan damai dan bahagia serta harmonis (Hamidy, 1982: 9). Tujuannya adalah ketertiban dan keselarasan antara orang perseorangan dengan orang lain dan antara rakyat dengan penguasa. Pada daerah kepulauan dan beberapa daerah pesisir timur pantai Pulau Sumatera di daerah Riau, tidak merupakan sistem yang dianut, kecuali dalam bentuk adat kebiasaan yang tidak berada dalam suatu kaedah yang berkadar hukum, sehingga lebih condong kepada tradisi saja. Nilai adat di buat dan dirumuskan pada tingkat kemampuan pkiran manusia yang dianggap arif dan bijaksana.

*Ketiga* adalah sistem nilai tradisi yaitu perangkat sistem nilai yang berdasarkan mitos. Tujuan perangkat nilai ini adalah untuk membuat keharmonisan antara manusia dengan alam. Alam dipandang sejajar dengan manusia, tetapi bisa pula dipandang lebih tinggi dari manusia.

Sistem nilai ini tidak memberikan serangkaian sanksi dalam pelaksanaan dari norma-norma yang diberikannya. Sistem nilai inilah yang paling banyak mewarnai tingkah laku kehidupan sosial masyarakat Melayu, khususnya di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karena nilai-nilai tradisi lebih mudah dan lebih dahulu dicernakan oleh anggota masyarakat karena nilai-nilai inilah yang lebih awal diperkenalkan dalam perkembangan hidup bermasyarakat. Perangkat nilai ini selalu bersentuhan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena posisinya yang demikian, maka sejumlah tingkah laku yang bersandar pada tradisi

kadangkala telah mendesak nilai-nilai agama.<sup>20</sup> Dalam tulisan ini, budaya yang dimaksud oleh penulis adalah budaya yang bersumber pada sistem nilai yang ketiga ini.

Ketiga perangkat sistem nilai tersebut di atas, dapat dibedakan menurut landasannya. Sistem nilai agama landasannya adalah wahyu Illahi, sistem nilai adat landasannya ungkapan adat, dan sistem nilai tradisi landasannya mitos-mitos. Tingkat kualitas ketiga perangkat sistem nilai itu berbeda-beda. Sistem nilai agama merupakan sistem nilai paling tinggi, di bawahnya sistem nilai adat dan terakhir sistem nilai tradisi. Sistem nilai tradisi adalah nilai-nilai yang paling banyak mewarnai kehidupan sosial masyarakat Riau.

Apabila diperhatikan dari bawah, kehidupan masyarakat Melayu Riau sering berawal dengan nilai tradisi yang hidup dalam masyarakatnya, kemudian nilai adat yang dianggap sebagai jembatan untuk menyelaras hidup dengan masyarakat. Selanjutnya sampai pada nilai agama sebagai nilai yang paling ideal atau nilai yang suci. Ketiga perangkat sistem nilai itu merupakan perwujudan nilai manusiawi sebagai nilai religius, nilai kebenaran, nilai etis, dan nilai estetis.

Sistem nilai masyarakat yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, hampir seluruhnya dituangkan ke dalam ungkapan yang beraneka ragam yang mengandung makna dan pengertian yang dalam. Salah satu warisan budaya Melayu Riau yang amat tinggi nilainya adalah

---

<sup>20</sup>Tengku Lukman Sinar, *Jati Diri Melayu*, Medan, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Melayu, 1994, hal. 2

ungkapan tradisionalnya. Ungkapan itu menyingkap filsafat, pandangan hidup, dan cara hidup orang Melayu Riau, sebagai refleksi nilai-nilai manusiawi yang berpijak dari sistem nilai agama, sistem nilai adat, dan sistem nilai tradisi yang mereka warisi turun temurun.

Seperti halnya masyarakat tradisional lainnya yang ada di Indonesia, pembagian peran yang menempatkan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik juga terjadi didalam kehidupan masyarakat Melayu. Pembagian peran ini seperti menyebabkan laki-laki mendapatkan status kekuasaan yang lebih dari perempuan. Sehingga para orang tua Melayu beranggapan bahwa orang akan berfikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap seorang perempuan, jika perempuan tersebut memiliki saudara laki-laki walupun laki-laki tersebut belum dewasa.

Adanya pembagian peran yang menempatkan perempuan di sektor domestik menyebabkan adanya semacam suatu tradisi bagi pasangan yang sudah berumah tangga menginginkan anak perempuan terlebih dahulu dibandingkan anak laki-laki. Keinginan tersebut berdasarkan pada pertimbangan anak perempuan dapat segera membantu ibu mengurus rumah tangga seperti: memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Selanjutnya tradisi lain yang berkembang dari pembagian peran tersebut adalah orang tua cenderung lebih suka tinggal dengan anak perempuan dari pada anak laki-laki dan biasanya rumah binaan orang tua akan ditempati oleh anak perempuan, terutama anak perempuan yang bungsu apabila anak tersebut telah berumah tangga. Dengan demikian, orang tua tidak perlu lagi pindah ketempat lain, jika mereka sakit atau

ditimpa musibah, mereka akan dirawat oleh anak perempuan yang dipandang memiliki waktu yang banyak untuk berada di rumah. Hal ini akan menjadi lain jika mereka dekat dengan anak laki-laki, dimana rumah dan menantu perempuannya bukanlah rumah dan anak sendiri.<sup>21</sup>

Sebenarnya pembagian peran tersebut bila diiringi dengan adanya saling pengertian dari kedua belah pihak, tidak akan merugikan pihak manapun, baik itu laki-laki atau perempuan. Namun apabila ditelusuri lebih mendalam, seperti halnya pengertian itu lebih banyak dituntut dari pihak perempuan bahkan pembagian peran tersebut kadang-kadang terkesan dilebih-lebihkan oleh kaum laki-laki, sehingga kaum laki-laki mendapatkan kekuasaan yang lebih jika dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh kaum perempuan. Akibatnya, peran yang dilebih-lebihkan itu melahirkan tradisi lain yaitu “laki-laki adalah raja dalam rumah tangga”. Aiblah bagi seorang laki-laki (karena dia seorang raja) mengerjakan pekerjaan domestik. Seorang perempuan apabila telah berstatus sebagai isteri, harus siap melayani rajanya (suami). Akan ditemui dalam rumah tangga orang Melayu seorang suami tidak akan memakan apa yang telah dihidangkan oleh isterinya sebelum sang isteri meletakkan air cuci tangan di hadapan sang suami. Sebaliknya, hal yang “biasa saja” apa bila seorang perempuan (karena dia seorang pelayan) mengerjakan pekerjaan laki-laki, baik yang sifatnya membantu atau mengerjakan pekerjaan tersebut sepenuhnya. Akan ditemui pada puak-puak tertentu di daerah Riau, sang isteri bekerja di sawah

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 8

sementara suaminya duduk dan minum kopi di warung. Setelah pulang dari sawah isteri harus siap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan malamnya harus “melayani suami”.

Adat dan tradisi diciptakan oleh orang-orang tua untuk mengatur hubungan sesama manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam sekalipun. Namun tidak semua ketentuan adat dan tradisi tersebut secara terang-terangan menyebutkan bagaimana pengaturan tersebut harus dilaksanakan. Ada kalanya peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang menggunakan simbol-simbol. Hal ini barangkali ada hubungannya dengan cara berfikir orang Melayu yang memiliki sifat pemalu dan ragam emosinya suka menghindar dari konflik dan pertikaian. Karena jika berkata langsung dikuatirkan akan menyinggung perasaan orang lain. Menurut orang Melayu tradisional, sesuatu yang kasar hanya layak untuk binatang, terhadap manusia cukuplah perlambangan saja.<sup>22</sup>

Pengaturan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada ungkapan Melayu berikut ini:

*“adat hidup berkampung halaman, seiya sekata laki-laki perempuan”*

*“bertuah hidup berkaum bangsa, laki-laki perempuan seiya sekata”*

*“tanda Melayu memegang adat, laki-laki perempuan setimbang sesukat”*

Dalam ungkapan lain dibunyikan:

---

<sup>22</sup> Yusuf Ahmad, *op. cit.*, hal 116.

*“adat hidup sesama sedusun, laki-laki perempuan tuntun menuntun”*

*“adat hidup sama sedesa, laki-laki perempuan rasa merasa”*

*“adat hidup sama sekampung, laki-laki perempuan tolong menolong”*

*“adat hidup sama senegeri, laki-laki perempuan beri memberi”*

*“adat hidup sama sebangsa, laki-laki perempuan rasa merasa”*

*“adat hidup sama sekaum, laki-laki perempuan sama maklum”*

*“adat hidup sama sesuku, laki-laki sehilir sehilu”<sup>23</sup>*

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan dalam kehidupan harus saling tolong menolong, isi mengisi. Azas ini memperlihatkan bahwa kaum perempuan bukanlah kaum yang dipandang rendah dan direndahkan, tetapi dianggap setara dengan kaum laki-laki.

Pengaturan hubungan yang begitu harmonisnya antara laki-laki dan perempuan oleh orang tua Melayu jelas berdasarkan ajaran agama, yaitu Islam. Nilai agama merupakan nilai yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai-nilai adat dan tradisi bagi orang Melayu. Namun dalam kenyataannya sering terjadi salah penafsiran terhadap “ajaran-ajaran agama,” terutama yang berhubungan dengan persoalan-persoalan perempuan. Masalah lain yang turut mempengaruhi pola hubungan tersebut adalah lemahnya pewaris nilai-nilai budaya oleh para orang tua pada generasi berikutnya, kehilangan acuan dan akhirnya terbatas kemampuan mereka dalam menafsirkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 11



pesan-pesan budaya yang telah disusun dengan baik oleh nenek moyang mereka.

Dilihat jauh ke belakang, realisasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah dicontohkan orang-orang tua Melayu zaman dahulu dalam kehidupan mereka, jauh sebelum menguatnya perjuangan feminisme di Indonesia. Dalam budaya Melayu, ada upacara adat untuk memberi gelar kepada kaum laki-laki yang dianggap memiliki keutamaan. Lazimnya laki-laki yang memiliki keutamaan ini akan diberi gelar “Tun”. Dalam sejarah Melayu, tercatat gelar “Tun” tersebut pernah diberikan kepada seorang perempuan yaitu kepada isteri Sultan Mahmud Syah, raja Pekantua Kampar (1562). Gelar tersebut diberikan untuk menghargai semangat juangnya dalam menentang penjajahan. Isteri Sultan tersebut dikenal dengan nama Tun Fatimah. Beliau menjadi lambang keperkasaan perempuan Melayu. Kemudian beliau juga diberi gelar “Cik Puan” dengan gelar lengkapnya “Cik Puan Sri Kampar”. Gelar cik puan ini pula yang kemudian sering dipakai sebagai tanda penghargaan kaum perempuan Melayu dalam generasi berikutnya.<sup>24</sup>

Sejarah juga mencatat bahwa perempuan pernah menjadi ratu yaitu Ratu Wan Sri Benai (1150-1158) yang merupakan ratu pertama kerajaan Melayu Riau.<sup>25</sup> Pemegang *regelia* kerajaan Riau (*regelia* merupakan alat kebesaran kerajaan yang dianggap sakral dan melambangkan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 83-86

kebesaran dan kekuasaan) adalah Engku Puteri Hamidah.<sup>26</sup> Pemegang teraju adat di rantau Kuantan pada abad ke-18 yang bergelar “Datuk Bisai” salah seorang diantaranya adalah seorang perempuan yaitu Puteri Reno Intan. Jabatan ini dipegang oleh perempuan sampai tahun 1905. Kemudian jabatan ini beralih kepada laki-laki setelah adanya permintaan dari pihak belanda.<sup>27</sup>

Yang lebih menarik, di kerajaan Bangko (sekarang kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Riau) terdapat suatu yang dipimpin oleh seorang perempuan yang telah membuat suatu keputusan yang sangat kontroversial. Pemimpin tersebut menentukan hak ulayat (dusun) jatuh pada anak perempuan. Anak laki-laki dibenarkan mengambil hasil bumi dari tanah ulayat tersebut jika terkena pembayaran denda atau hutang. Jika tidak ada anak perempuan, maka hak jatuh kepada keponakan perempuan. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada masa harta warisan difoya-foyakan atau dijual untuk pembayar denda akibat kejahatan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh anak laki-laki. Anak perempuan hampir tidak pernah melakukan hal yang demikian.<sup>28</sup>

Dalam kehidupan rakyat jelata, tradisi Melayu menunjukkan bukti adanya kesetaraan dalam menentukan calon suami. Dalam hal penentuan calon suami ini peranan perempuan sangat dominan. Dalam hubungan antara anak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 62

<sup>27</sup> UU Hamidy, *Orang Melayu di Riau*, UIR Press

<sup>28</sup> Tenas Efendi, *Jender Dalam Adat dan Budaya Melayu*, Makalah ini disampaikan dalam Pertemuan Daerah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pekanbaru, 2001

gadis dan anak bujang, pihak perempuan akan selalu didampingi oleh pihak ibunya dan saudara ibunya. Jika tidak mungkin, biasanya akan ada yang disebut “induk modu” yaitu perempuan yang sudah biasa memberikan bantuan menghubungkan pihak gadis dan bujang atau sebaliknya. Dengan demikian, secara tidak langsung keputusan yang akan diambil oleh anak gadis tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pihak ibu, saudara ibu atau induk mudo. Kalangan laki-laki baru muncul kemudian, pada waktu akan melangsungkan pertunangan atau perkawinan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial dapat pula dilihat pada organisasi tani yang disebut “tobo”. Tradisi ini masih dapat lagi dijumpai dalam keadaan terbatas di daerah Rantau Kuantan, Sengingi, dan Kampar. Anggota “tobo” adalah anak gadis dan bujang yang sebaya umurnya. Mereka dipimpin oleh seorang induk “tobo”. Pemimpinnya boleh laki-laki dan boleh pula perempuan. Dengan “tobo” ini mereka mengerjakan ladang para anggota secara bergiliran, sampai lading tersebut siap untuk ditanami. Bila semua ladang anggota sudah selesai dikerjakan, mereka dapat pula menjual jasa organisasi ini kepada orang lain yang bersedia membeli tenaga mereka. Jadi “tobo” ini akan mengerjakan pula ladang orang lain bila mendapat bayaran yang dapat digunakan untuk kepentingan organisasi itu.<sup>29</sup>

Akhir-akhir ini orang mempertanyakan arah pergerakan feminisme. Kesetaraan yang bagaimanakah yang mereka inginkan? Bahkan di Indonesia yang mayoritas penduduk perempuannya adalah muslim sepertinya masih belum jelas

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

arah kesetaraan yang mereka inginkan. Karena ketidakjelasan tersebut banyak orang yang pada awalnya menaruh simpati terhadap pergerakan feminisme pada akhirnya menjadi sinis terhadap perjuangan mereka.

Dalam suatu ungkapan orang tua-tua Melayu mengatakan:

*“walaupun hakikatnya antara laki-laki dan perempuan adalah sama, tetapi samanya bertempat-tempat, serupanya beralur-aluir”.*

Seterusnya dalam ungkapan yang lain dikatakan:

*“samanya tidak terpukul rata, bedanya tidak mencacat cela”,*  
atau dikatakan:

*“samanya rasa merasa, bedanya seiya sekata”.<sup>30</sup>*

Ungkapan-ungkapan di atas jelas sekali memberikan jawaban terhadap kesetaraan yang bagaimana yang seharusnya diikuti oleh masyarakat Melayu. Di dalam adat dan resam Melayu diakui adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, manun di sisi lain diakui pula adanya perbedaan diantara mereka. Dalam suatu ungkapan dikatakan:

*“anak jantan ditimang-timang,  
anak perempuan sayang-sayangan”*  
*“anak laki-laki cahayanya negeri,  
anak perempuan permata intan”,*

atau

*“anak laki-laki payung negeri,*

---

<sup>30</sup>Tenas Efendi dan Nahar Efendi, *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Pekanbaru, Badan Pembina Kesenian Daerah Provinsi Riau. 1972, hal. 9

*anak perempuan pelita budi*".<sup>31</sup>

Pengakuan adanya perbedaan tersebut seterusnya diwujudkan dalam bentuk "pantang larang" dan pembatas yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Misalnya pantang larang perempuan menjadi "kuli" atau "pekerja keras", menjadi hamba sahaya atau "piaraan orang". Kedua-dua pekerjaan tersebut kalau dicermati sangat mengutamakan kekuatan fisik, dalam hal ini jelas sekali kekuatan perempuan berbeda dengan kekuatan fisik laki-laki. Seterusnya pengakuan tersebut diwujudkan juga dalam tradisi yang lebih mengedepankan kaum laki-laki dalam penyelesaian masalah sosial. Hal ini berdasarkan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah sosial, sering terjadi kekerasan dan tipu daya. Dalam hal ini perempuan relatif lebih emosional jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Masalah sosial juga biasa terjadi di berbagai ruang dan waktu. Perempuan barangkali belum tentu dapat dengan leluasa menghadirinya atau menghadapi, laki-laki dipandang lebih bebas daripada perempuan.<sup>32</sup>

Ungkapan-ungkapan secara langsung mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, akan tetapi di sisi lain ianya diperlakukan berbeda. Hal ini diakui juga oleh Tawney dalam Ratna Megawani bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keragaman, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan atau kesukaan. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui

---

<sup>31</sup>Hasan Yunus, *Engku Puteri Raja Hamidah Pemegang Regelia Kerajaan Riau*, Pekanbaru, UNRI Press, 2002, hal. 47

<sup>32</sup>UU Hamidy, *Riau Doelu Kini dan Bayangan Masa Depan*, Pekanbaru, UIR Press, 2002, hal. 35

faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perorangan, atau disebut “*person-regarding equality*”.

Kesetaraan ini bukan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu yang mempunyai aspirasi dan kebutuhan yang berbeda, melainkan dengan memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu yang berbeda agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi.<sup>33</sup> Selanjutnya Mega Seliwangi menyebut kesetaraan tersebut sebagai kesetaraan kontekstual.

#### **D. Simpulan**

Adat dan budaya Melayu telah memberikan konsep yang sesuai untuk diikuti oleh masyarakat dalam hal mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya Melayu, laki-laki dan perempuan setara, namun disisi lain adat dan budaya juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan tersebut dituangkan dalam bentuk pantang larang serta tradisi yang lebih mengutamakan kaum laki-laki dalam urusan-urusan sosial. Pembatasan tersebut bukanlah bertujuan untuk merendahkan kaum perempuan tetapi adalah upaya untuk memelihara marwah perempuan itu sendiri.

Dalam ungkapan adat dikatakan:

---

<sup>33</sup>Sudarmo Mahyudin, *Pelestarian dan Pengembangan Budaya Berfikir Melayu*, makalah Kumpulan Seminar Budaya Melayu Sedunia 2003, hal. 212-213

*“apa tanda Melayu jadi,  
marwah perempuan ia hormti”,*

atau

*“apa tanda Melayu pilihan,  
tahu memelihara marwah perempuan”,*

selanjutnya

*“apa bila hidup hendak terhormat,  
terhadap perempuan berhermat cermat”,*

atau

*“apa bila hidup hendak terpuji,  
perempuan jangan di umpat keji”.*

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Galba, Sindu, dkk. tth. *Upacara Tradisional di Daek Lingga*, Tanjung Pinang: Bapeda Kabupaten Kepulauan Riau dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanggung Pinang
- Hasan Yunus. 2002. *Engku Puteri Raja Hamidah Pemegang Regelia Kerajaan Riau*, Pekanbaru, UNRI Press
- Koenjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Akasara Baru
- Lely Zeilani. 2000. *Jender Sebagai Analisa*, Makalah ini Disampaikan Dalam Seminar Sehari Jender Dalam Perspektif Budaya dan Agama. Pekanbaru

- Mansour Faqih. 1997. *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasaruddin Umar, 1999, *Agama dan Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina
- Sudarmo Mahyudin. 2003. *Pelestarian dan Pengembangan Budaya Berfikir Melayu*, makalah Kumpulan Seminar Budaya Melayu Sedunia 2003, Pekanbaru
- Sudirman M. Johan dan Husni Thamrin. 2009. *Gender dalam Kultur Agraris*, Pekanbaru: Suska Press
- Tengku Lukman Sinar. 1994. *Jati Diri Melayu*, Medan: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Melayu
- Tenas Efendi dan Nahar Efendi. 1972. *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Pekanbaru, Badan Pembina Kesenian Daerah Provinsi Riau
- Tennas Efendi. 2001. *Jender Dalam Adat dan Budaya Melayu*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan Daerah Rencana aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pekanbaru
- UU. Hamidy. 2002. *Riau Doeloe Kini dan Bayangan Masa Depan*, Pekanbaru, UIR Press
- Yusuf Ahmad. 1993. *Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau Ke Kesultanan Melayu Lingga-Riau*, Pekanbaru, Pemda TK I Riau





# **IV**

## **PEREMPUAN ISLAM DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA**

***Jumni Nelli***



# PEREMPUAN ISLAM DALAM REALITAS SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA

*Jumni Nelli*

## A. Pendahuluan

Dalam sejarah dunia, kaum perempuan sering sekali dipandang subordinat bagi kaum lelaki. Pandangan semacam ini berimbas pada penghinaan terhadap mereka baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Faktor penyebab timbulnya tindakan tersebut antara lain dipertahankannya mitos patriarkhis yang bersumber dari tradisi lokal dan kesalahpahaman terhadap teks-teks agama.

Sejak 14 abad yang lampau, al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara manusia berdasarkan jenis kelamin. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi gender, kebangsaan, kesukuan, maupun keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah SWT (QS. 49: 13)

Masalah perempuan pada dasarnya terkait dengan realitas serta persepsi tentang realitas masyarakat itu sendiri yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam keadaan tertentu dengan hak-hak dan kewajiban yang tertentu pula. Realitas tersebut sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam konteks ini, agama dengan sendirinya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan baik terhadap realitas hubungan perempuan dan laki-laki maupun cara pandang masyarakat terhadap masalah tersebut.

Dengan demikian, peran agama yang diharapkan bukan hanya sekedar ideologi hasil rekayasa sosial belaka, tetapi bagaimana sebuah sistem kebudayaan, karena masyarakat mempunyai berbagai masalah sosial, moral keagamaan yang belum terpecahkan, dan bangsa Indonesia dewasa ini sedang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kaum perempuan merupakan separoh lebih sumber daya manusia Indonesia, maka kajian mendasar terhadap kaum perempuan di Indonesia menjadi sangat penting.

Berbicara tentang kehidupan perempuan muslim Indonesia, maka yang dibicarakan di satu sisi tentang nilai-nilai ajaran Islam, khususnya yang menyangkut masalah perempuan, dan di sisi lain harus mempertahankan adat kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang membentuk tradisi dalam kehidupan perempuan di Indonesia termasuk perempuan muslimnya.

Bila diperhatikan kembali langkah-langkah yang telah dicapai dalam pembangunan nasional, maka diketahui bahwa usaha untuk mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan telah jelas tercermin dalam GBHN

(1988) yang menyatakan bahwa “perempuan, baik sebagai warga negara maupun sumber insani bagi pembangunan,” mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Ini adalah keputusan politik hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, Islam hendaknya dikaji secara tekstual dan dipahami secara kontekstual untuk memenuhi kebutuhan umat. Inilah alasan penulis mengkaji masalah-masalah perempuan dalam realitas budaya Islam di Indonesia.

## **B. Perempuan dalam Al-Qur'an**

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tidak hanya terfokus kepada persoalan individu, tetapi juga menitikberatkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Salah satu masalah yang menjadi perhatiannya adalah masalah kaum perempuan. Karena pentingnya masalah ini, Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad saw sebuah surat dalam al-Qur'an yang diberi nama “Surah al-Nisa'.” Sebagian besar ayat-ayat dalam surat al-Nisa' membicarakan segala hal yang berhubungan dengan perempuan, terutama yang berkaitan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

Prinsip-prinsip Islam tentang perempuan juga terdapat di dalam surat-surat lain seperti QS. al-Baqarah, QS. Ali Imran, QS. al-Maidah, QS. Yusuf, QS. Maryam, QS. al-A'raf, QS. al-Nur, QS. al-Ahzab, QS. al-Mujadalah, QS. al-Tahrim dan QS. al-Thalaq. Diantaranya: Islam memberikan hak

suara kepada perempuan (lihat, QS. al-Mujadilah:1) mempunyai hak yang sama dalam mengingatkan (at-Taubah:71). Mempunyai hak pilih dalam mengatur hidupnya. Mempunyai hak asuh (al-Baqarah: 233), hak digauli secara baik-baik (al-Baqarah:233), hak di beri nafkah, hak dibimbing, dan hak dilindungi (an-Nisa: 34, at-Tahrim:7) hak menentukan pilihan dalam menikah dan diberi mahar dan boleh menikah bila sudah berpisah dengan suami dan masa iddahnya telah habis (an-Nisa: 4, 21, 24, al-Baqarah:231.). Mempunyai hak waris (an-Nisa: 11, 12, 178). Begitu juga di dalam banyak hadis disebutkan pula ajaran-ajaran yang berkaitan dengan perempuan, baik yang berfungsi menguatkan maupun menjelaskan keterangan-keterangan yang terdapat di dalam al-Qur'an.

Dalam uraian yang berikut ini, penulis tidak akan mengupas semua ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan tetapi akan diangkat ayat-ayat yang dianggap lebih menjadi dilema perempuan Islam di Indonesia.

#### I. Penafsiran QS. Al-Nisa' (4): 1

Terjadi konflik ulama terdahulu dengan ulama kontemporer tentang asal kejadian perempuan antara “dijadikan dari *nafs* yang sama” atau “tulang rusuk / tidak sama antara laki-laki dan perempuan.” Untuk lebih jelas dapat dilihat kembali ayat yang menjelaskan tentang asal kejadian manusia, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang sama dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya dan dari pada keduanya, Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak.*

Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami kata ayat “*nafs*” seperti Jalaluddin asy-Suyuthi,<sup>1</sup> Ibn Katsir, al-Qurthubi, al-Biqai, Abu Su’ud,<sup>2</sup> sepakat mengartikan kata “*nafs*” dengan Adam, sehingga menjadikan *zauajha*, yang secara harfiah bermakna pasangannya, adalah isteri Adam yang populer bernama Hawa. Maka secara utuh mereka mengartikan ayat tersebut: “*Hai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari Adam, dan dari Adam dijadikan pasangannya yaitu hawa.*”

Oleh karena kata “*nafs*” diartikan Adam, maka secara langsung dapat diketahui bahwa pasangan Adam adalah Hawa yang di ciptakan dari Adam. Berdasarkan hal ini, para ahli tafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam. Pada akhirnya pendapat ini melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Bahkan lebih

---

<sup>1</sup>Al-Jalalayn, *Tafsir al- Jalalayn*, (Bandung: Makhtabah Dahlan, t.th), h. 23

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), Volume 2. h. 313



khusus mayoritas ahli tafsir terdahulu menyatakan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, sehingga mereka menyatakan perempuan itu bersifat bengkok.<sup>3</sup> Pendapat mereka diperkuat dengan hadis Rasul SAW, yang berbunyi:

*“Saling berwasiat-mewasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau membiarkannya dia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya untuk meluruskannya dia akan patah (H.R. al-Tarmizi)*

Berbeda dengan ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, al-Qasimi, Rasyid Ridaha, al-Thabathaba'i<sup>4</sup> dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa “*nafs*” berarti jenis, sehingga secara utuh mereka mengartikan ayat tersebut dengan: “*Hai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu jenis, dan dari jenis itu pula dijadikan pasangannya yaitu hawa*”

Menurut mereka ayat tersebut merupakan penegasan bahwa tidak ada perbedaan antara zat yang dipakai untuk menciptakan perempuan dan yang dipakai untuk menciptakan laki-laki, karena semuanya berasal dari jenis yang sama. Ayat ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْٓا ۚ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللّٰهِ أَتْقٰىكُمْ ۚ إِنَّ ٱللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 315

<sup>4</sup> *Ibid.*

Artinya: *Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.*

Menanggapi hadis yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama klasik, ulama kontemporer memahami dalam arti *majaz*, sebagian lain menolak dengan tegas keshahihan hadis yang menyatakan baha perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok.

Ulama yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan kaum laki-laki agar menghadapi perempuan dengan arif, bijaksana dengan penuh kelembutan, karena ada sifat, karakter, kecendrungan dan kodrat bawaan perempuan yang berbeda dengan laki-laki, jika tidak disadari akan mengantarkan laki-laki bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Kalaupun ada yang berusaha, maka akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Mannar<sup>5</sup> bahwa adanya pendapat menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam a.s. adalah pengaruh kitab perjanjian lama atau dikenal juga dengan khabar *Israiliyat*<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa: “ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Tuhan sebilah tulang rusuknya, lalu

---

<sup>5</sup> Muhammad Rasyid Ridla', *Tafsir al-Manar*, juz IV, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 330.

<sup>6</sup> Holy Bible, edisi cetakan Indonesia, h. 22

ditiupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, dibuat Tuhan seorang perempuan”.

Rasyid Ridha<sup>7</sup> mengatakan: “Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam perjanjian lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim.”

Pendapat yang mendukung adanya persamaan unsur kejadian Adam dan Hawa dan persamaan kedudukan keduanya dapat diterima, karena dari sekian banyak teks keagamaan, baik Al-Quran maupun hadits, mendukung pendapat tersebut, antara lain dapat dilihat dalam surat al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan dilautan (untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.”

Kalimat *anak-anak Adam* mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian pula penghormatan Allah SWT yang diberikan-Nya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini

---

<sup>7</sup> Muhammad Rasyid Ridla', *Tafsir al-Manar*, Ibid.

dipertegas dengan surat Ali Imran ayat 195 yang menyatakan:

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

*"Sebagian kamu diciptakan dari sebagian yang lain"*

Berarti bahwa "sebagian kamu" (laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian lain (perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tidak ada perbedaan di antara mereka dari segi asal kejadian serta kemanusiaannya.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa bila memang dikatakan Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang bengkok, maka bukan berarti bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Ini karena semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh ayat-ayat Allah SWT tersebut di atas.

Disadari bahwa lelaki lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan, begitu juga perempuan. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh perempuan dan kelemahan-lembutan perempuan didambakan oleh laki-laki. Jarum tidak harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih lembut dari jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi, dan kainpun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman.

Penegasan Allah SWT dalam surat al-Nisa' dengan perkataan *khalaqa minha zaujaha* -Allah menciptakan darinya-, yakni dari *nafs* itu pasangannya, mengandung

makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai *zawaj* yang berarti “keberpasangan” di samping “*nikah*” yang berarti penyatuan rohani dan jasmani.

Sebagaimana dinyatakan dalam pandangan sosiologis bahwa inti dari perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam suatu dunia bersama, sebagai pemenuhan akan “*desire for response and recognition*” ( hasrat untuk mendapat sambutan dan penghargaan). Dalam perkawinan itu terjadi “menyatunya yang dua” dan ‘menduanya yang satu” artinya keterlibatan kedua pihak dalam satu perbuatan bersama. Sebaliknya dalam perpaduan suami istri menjadi kesatuan, masing-masing justru tidak hidup untuk sendiri dan tidak hidup sendirian, melainkan lebih pada aktualisasi diri secara utuh sebagai makhluk yang hidup berpasangan dalam kehidupan berkeluarga untuk saling memperhitungkan; saling memperhatikan dan saling melengkapi dalam seluruh aspek kehidupan.

Ide kelahiran Hawa dari tulang rusuk Adam as tidak sepenuhnya benar. Senada dengan yang ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Mannar bahwa adanya pendapat menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam as adalah terpengaruh dengan kitab perjanjian lama atau dikenal juga dengan khabar Israiliyat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Dalam perjanjian lama dinyatakan tentang kejadian: “ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang

Thabatha'i menguatkan dalam tafsirnya bahwa perempuan (istri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan ayat tersebut sedikitpun tidak mendukung paham yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Memang tidak ada petunjuk dari al-Qur'an yang mengarah ke sana, atau bahkan mengarah kepada penciptaan pasangan Adam dari unsur lain.

2. Penafsiran terhadap QS. Al-Nisa' (4): 34

Dalam kitab-kitab tafsir klasik, kaum laki-laki digambarkan lebih superior daripada kaum perempuan. Ayat yang sering dipergunakan sebagai argumen adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 34. Meskipun demikian, penafsiran seperti itu pada dasarnya sangat berkaitan dengan situasi sosial-kultural yang sangat merendahkan kedudukan perempuan. Dalam ayat tersebut dinyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَرِيمًا

Artinya: "Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah SWT. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh, ialah yang taat kepada

---

dikeluarkan dari Adam itu dibuat Tuhan seorang perempuan. *Ibid.* lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Konsep Perempuan menurut Al-Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam*

*Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena itu, Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuzus, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mantaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Kata *Qawwamun*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pemimpin bagi kaum perempuan, “dipahami oleh mayoritas ahli tafsir sebagai justifikasi superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam ayat itu disebutkan dua alasan mengapa laki-laki (suami) itu pemimpin atas perempuan. Alasan pertama ialah karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain (perempuan).” Alasan kedua ialah “karena mereka ( laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya.” Tentang Alasan pertama, al-Qur’an tidak menjelaskan secara tegas dan jelas kelebihan laki-laki atas perempuan. Sementara itu, tentang alasan kedua al-Qur’an menyatakan secara lebih eksplisit yaitu bahwa superioritas laki-laki terhadap perempuan itu karena laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Karena itu, seorang suami memiliki aset yang lebih istimewa dibanding seorang istri. Menurut mufasssir, memberi nafkah yang dimaksud ialah pemberian mahar dan belanja kebutuhan istri dan keluarga.<sup>9</sup>

Terhadap alasan pertama para mufasssir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat bias laki-laki. An-Nawawi misalnya, menerangkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas bahwa laki-laki memiliki

---

<sup>9</sup> Mahmud Ibn ‘Umar Al-Zamakhshary, *Al-Kasysyaf* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, h. 524

kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, penilaian yang tepat dan kelebihan dalam amal dan ketaatan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, imam, wali, penegak syiar-syiar Islam, saksi dalam berbagai masalah hukum, wajib melaksanakan jihad, sholat jum'at dan lain-lain.<sup>10</sup> Muhammad Asad mengartikan “*Qawwamun*” sebagai “menjaga sepenuhnya” (to take full care) dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik.<sup>11</sup> At-Thabari mengartikannya dengan “tanggung jawab”. Hal ini berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik dan membimbing isteri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami.<sup>12</sup> Az- Zamakhsyari menekankan bahwa kata itu berarti bahwa kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.<sup>13</sup> Yusuf Ali mengartikannya “pelindung kaum perempuan”.<sup>14</sup> Demikianlah QS. 4:34 ditafsirkan oleh para mufasir yang mengandung bias kaum lelaki. Meskipun demikian apabila dihadapkan dengan realitas yang ada, maka terlihat sekarang ialah bahwa posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif dan apabila basis superioritas laki-laki atas perempuan dalam al-Qur'an dan masyarakat bersifat relatif, maka lahirlah penafsiran-

---

<sup>10</sup> Al- Nawawi, *Marah labid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I. H. 149

<sup>11</sup> Muhammad Assad, *The Message of the al-Qur'an* (Gibllartar: Dar Al-Andalus, 1980), 109

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h.57

<sup>13</sup> Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, 1:523

<sup>14</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, diterjemahkan oleh Ali Audah (Jakarta, 1993), 190



penafsiran al-Qur'an yang menawarkan nuansa baru dan mengandung nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan kaum perempuan untuk berperan di segala bidang kehidupan.

Sejumlah pemikiran muslim kontemporer, seperti Asghar Ali Engineer, berusaha menafsirkan kembali ayat tersebut. Menurutnya ungkapan “laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan” merupakan pengakuan bahwa dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa penurunan wahyu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara itu laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah. Al-Qur'an hanya mengatakan “laki-laki menjadi *qawwamun* dan tidak menyatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwamun*. Menurut Asghar Ali, ungkapan itu merupakan pernyataan konteks luas, bukan normatif.<sup>15</sup> Menurut Fazlur Rahman, ungkapan al-Qur'an “laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya” bukanlah perbedaan hakiki melainkan fungsional. Artinya, jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun karena usaha sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya

---

<sup>15</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cici Farhan Asegaf (Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1994), 701

akan berkurang, karena ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan isterinya.<sup>16</sup>

Sejalan dengan Fazlur Rahman, Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa kalimat “laki-laki *qawwamun* atas perempuan” tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, namun hal itu hanya terjadi secara fungsional, dalam arti selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur’an.<sup>17</sup>

Demikianlah di antara berbagai penafsiran lama terhadap surah an-Nisa’ (4): 39 yang tekstual dan penafsiran kontemporer yang tampak lebih sebagai gugatan dan kebutuhan saat ini. Akan tetapi penafsiran itu tidak keluar dari maksud dan hakekat ayat tersebut.

### 3. Penafsiran QS. al-A’raf: 07:20

فَوَسَّوَسَ هُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ هُمَا مَا وَرَىٰ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”

Di dalam ayat tersebut terdapat ungkapan “...maka setan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya...” yang berhubungan dengan QS. Al-Bagarah: 36, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur’an* diterjemahkan oleh Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka Bandung, 1983), 72

<sup>17</sup>Amina Wadud Muhsin, *Perempuan Dlam Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Yasir Radianti (Bandung: Pustaka Bandung, 1992), 93

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syetan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka nikmati sebelumnya.”

Ayat-ayat di atas disebutkan dalam bentuk *tatsniyyah* yang menunjukkan dua orang, laki-laki dan perempuan (Adam dan hawa), bukan dalam benruk tunggal. Apabila kata itu disebutkan dalam bentuk mufrad (tunggal), maka kata itu justru menunjukkan kepada laki-laki (Adam) sebagai pemimpin terhadap isteri, seperti QS. Thaha: 120:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّعَدُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

Artinya: “Kemudian syetan membisikkan pikiran jahat padanya (Adam) dan berkata Hai adam! Maukah saya tunjukkan kepada pohon quldi dan kerajaan yang tidak akan punah”

Ayat tersebut juga merupakan sanggahan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa perempuanlah (Hawa) yang digoda oleh syetan sehingga manusia terusir dari syurga. Sejalan dengan Lynn Wilcox, bahwa bukanlah Hawa yang bertanggung jawab atas godaan setan itu. Bagaimanapun juga mereka berdua sudah terjerumus oleh godaan sayitan.<sup>18</sup>

#### 4. Penafsiran QS. An-Nahl: 58-59

---

<sup>18</sup>Al-Aqqad, al-Mar’ah, *al-Mar’ah fi al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, t.th), h. 55 lihat juga Dr. Lynn Wilcox, *Women and the Holy Qur’an: A. Sufi Perspective*, terj. DICTIA, *Perempuan dan Al-Qur’an Dalam Perspektif Sufi*, (Bandung: Pustaka Hidayah), h.57

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥١﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ  
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۚ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan (merah padamlah) wajahnya dan dia sangat bersedih (marah), ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepada mereka itu (dia berfikir) apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau menguburkannya kedalam tanah hidup-hidup. Ketahuilah alangkah buruk apa yang ditetapkan itu."

Ayat-ayat diatas menolak pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Perempuan dalam statusnya sebagai anak, berhak mendapat nafkah, pendidikan dan pengasuhan sampai menikah. Tanpa persetujuan anak gadis, sang ayah dilarang mengawinkan dengan paksa.<sup>19</sup>

Demikian beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan, sehingga dapat dipahami ada dua pendapat tentang perempuan. Pendapat pertama dipelopori oleh ulama terdahulu, yang memahami ayat-ayat secara tekstual yang berimplikasi terhadap pendapat mereka yang menempatkan perempuan pada posisi kedua. Pendapat

---

<sup>19</sup>Hal ini juga dikuatkan oleh Hadis Nabi SAW. yang berbunyi: Dari *Abi Hurairah r.a.*: Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga dimintai perintahnya dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah bagaimana izinnya. Mereka bertanya: Diamnya. (Muttafaqun 'alaih). Al-Shanna'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Makhtabah Bandung, t.th), jilid III, h. 119

kedua, dipelopori oleh ulama kontemporer, yang memahami ayat-ayat secara kontekstual. Nota benenya pada pandangan mereka bahwa laki-laki dan perempuan adalah mempunyai kedudukan yang sama. Adanya perbedaan jenis kelamin bukan berarti kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Namun keduanya adalah pasangan yang saling membutuhkan karena semua lelaki dan perempuan lahir dari pasangan perempuan dan lelaki. Dengan perbedaan pendapat para mufasir tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dan sangat mewarnai pandangan gender di bumi Indonesia.

### **C. Konsep Kesetaraan dalam al-Qur'an**

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*dlamir mutsanna*), seperti kata *huma*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas sorga (QS, al-Baqarah/2:35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (QS, al-A'rif/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi, "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka" (QS, al-Baqarah/2:187).

Secara ontologis, masalah-masalah substansial manusia tidak diuraikan panjang lebar di dalam al-Qur'an. Seperti mengenai roh, tidak dijelaskan karena hal itu dianggap

“urusan Tuhan” (QS, al-Isr’a’/17:85). Yang ditekankan ialah eksistensi manusia sebagai hamba/*abid* (QS, al-Dzariyat/51:56) dan sebagai wakil Tuhan di bumi/*khalifah fi al-ardl* (QS, al-An’am/6:165). Manusia adalah satu-satunya makhluk eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik (*ahsan taqwim*/QS. al-Thin/95:4) tetapi tidak mustahil akan turun ke derajat “paling rendah” (*asfala safilin*/QS. al-Tin/95:5), bahkan bisa lebih rendah dari pada binatang (QS. al-A’raf/7:179).

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (QS. al-Hujurat/49:13). Al-Qur’an tidak menganut paham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau the first ethnic, yang mengistimewakan suku tertentu. Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi ‘*abid* dan *khalifah* (QS. al-Nisa’/4:124 dan al-Nahl/16:97).

Sosok ideal perempuan muslimah (*syakhshiyah al-ma’rah*) digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah* (QS. al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan “superpower” (*arsyun ‘azhimi*) (QS. al-Naml/27:23); memiliki kemandirian ekonomi/*al-istiqlal al-iqtishadi* (QS. al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mengelola peternakan (QS. al-Qashash/28:23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi/*al-istiqlal al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah kawin (QS. al-

Tahrim/66:11) atau menentang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum kawin (QS. al-Tahrim/66:12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (QS. al-Taubah/9:71). Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (QS. al-Nisa'/4:75).

Gambaran yang sedemikian ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab suci lain. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi s.a.w. ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi besar sebagaimana layaknya kaum laki-laki.

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad s.a.w. telah melakukan proses awal dalam membebaskan manusia, khususnya kaum perempuan, dari cengkeraman teologi, mitos, dan budaya jahiliyah. Al-Qur'an dan hadits yang berbicara tentang beberapa kasus tertentu, hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang mengarah kepada suatu tujuan umum (*maqashid al-syari'ah*). Al-Qur'an mempunyai seni tersendiri dalam memperkenalkan dan menyampaikan ide-idenya, misalnya dengan: a) disampaikan secara bertahap (*al-tadrij fi al-tasyri*), b) berangsur (*taqlil al-taklif*), dan c) tanpa memberatkan (*a'dam al-haraj*). Sebagai contoh, upaya menghapuskan minuman yang memabukkan (*iskar*), diperlukan empat ayat turun secara bertahap. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan persoalan perbudakan, kewarisan, dan poligami, runtut turunnya ayat-ayat tersebut mengarah

kepada suatu tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dan menegakkan amanah dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam melihat hak azasi perempuan dalam Islam, kiranya perhatian tidak hanya dipusatkan kepada peraturan-peraturan yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Mestinya juga dilihat dan dibandingkan bagaimana status dan kedudukan perempuan sebelum Islam. Misalnya dalam soal warisan; anak perempuan mendapat separoh bagian dari yang didapat anak laki-laki (QS. al-Nisa'/4:11). Ketika ayat ini memberikan bagian kepada anak perempuan, meskipun itu hanya separoh, tanggapan masyarakat ketika ayat diturunkan menimbulkan kekagetan (*shock*) dalam masyarakat,<sup>21</sup> karena ketentuan baru itu dianggap menyimpang dari tradisi besar (*great tradition*) mereka. Ketentuan sebelumnya, harta warisan itu jatuh kepada anggota keluarga yang bisa mempertahankan clan atau *qabilah*, dalam hal ini menjadi tugas laki-laki. Sekalipun laki-laki tetapi belum dewasa maka dihukum sama dengan perempuan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak memperoleh harta warisan dari bapak dan neneknya karena ia masih belum dewasa.

Bagaimana jadinya seandainya pembagian warisan ketika itu ditetapkan sama rata kepada anggota keluarga

---

<sup>20</sup>Yang dimaksud ayat-ayat essensial di sini ialah ayat-ayat yang menjadi tema pokok dalam al-Qur'an, seperti melaksanakan amanah (QS. al-Nisa'/4:58), mewujudkan keadilan dan kebajikan (QS. al-Nahl/16:90), menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan (QS. Alu 'Imran/3:104), dan men-tawhid-kan Tuhan (QS. al-Ikhlash/112:1-40).

<sup>21</sup>Peristiwa ini sama dengan kagetnya masyarakat dengan turunnya ayat tentang ketentuan haid. Bahwa al-Qur'an membolehkan berinteraksi dengan perempuan haid, yang dilarang hanya tempat haid didekati. Dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/1:222



tanpa membedakan peran jenis kelamin (gender role), sementara peran sosial berdasarkan peran jenis kelamin ketika itu sangat menentukan. Mencari titik temu antara wahyu (revelation) dan budaya lokal adalah tugas para ulama. Para ulama berusaha merumuskan suatu pranata – kemudian lebih dikenal dengan Fiqh Islam– dengan melakukan sintesa antara kultur Arab dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an.

Meskipun laki-laki dalam Fiqh Islam masih terkesan dominan tetapi martabat perempuan sudah diakui, bahkan perempuan selalu di bawah perlindungan laki-laki. Kalau ia sebagai isteri dipertanggung jawabkan oleh suami, sebagai anak dipertanggung jawabkan oleh Bapak, sebagai saudara dipertanggungjawabkan oleh saudara laki-laki, meskipun ia lebih tua, dan menerima mahar dari laki-laki. Kaum laki-lakilah yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga clan dan/kabilah yang ketika itu sangat rawan.

Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para fuqaha', memang ada beberapa hal dalam kitab fiqh dinilai telah selesai memenuhi tugas historisnya. Jika kita konsisten terhadap kaidah *al-hukmu yadur ma'a al-illah* (hukum mengikuti perkembangan zamannya) maka fiqh Islam sudah semestinya diadakan berbagai penyesuaian.

Salah satu upaya al-Qur'an dalam menghilangkan ketimpangan peran tersebut ialah dengan merombak struktur masyarakat *qabilah* yang berciri patriarkhi paternalistik menjadi masyarakat ummah yang berciri bilateral-demokratis. Promosi karier kelompok masyarakat *qabilah* hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan kelompok masyarakat *ummah* ukurannya adalah prestasi

dan kualitas, tanpa membedakan jenis kelamin dan suku bangsa. Itulah sebabnya Rasulullah sejak awal mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah,<sup>22</sup> karena Yatsrib terlalu berbau etnik (syu'ubiyah), sedangkan Madinah terkesan lebih kosmopolitan.

#### **D. Perempuan Muslim dalam Budaya Indonesia**

Di dalam Islam tidak ada konsep peran yang khas untuk lelaki maupun perempuan kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang khas dan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Secara totalitas Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan. Sejumlah nash dan konsep Islam dalam al-Qur'an menganjurkan manusia untuk menghormati dan melindungi kaum perempuan dengan perasaan cinta kasih dan tanggung jawab. Ini adalah inti ajaran Islam yang melestarikan hak-hak asasi manusia, dan menghormati sesama manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi, ajaran Islam

---

<sup>22</sup>Konsep Madinah (kota) diuraikan dengan menarik oleh Nurcholish Madjid bahwa Madinah berasal dari akar kata yang sama dengan madaniyah atau tamaddun yang berarti "peradaban" (*civilization*). Secara literal madinah adalah "tempat peradaban", atau suatu lingkungan hidup yang ber-"adab" (kesopanan, "*civility*"), yakni tidak "liar". Padanannya dalam bahasa Arab ialah al-hadlarah, satu akar kata dengan hadlir (Indonesia: "hadir") yang menunjuk kepada pengertian "pola hidup menetap di suatu tempat" (*sedentary*). Pengertian tersebut erat kaitannya dengan tsaqafah (budaya/*culture*). Lawan dari kata konsep tersebut ialah badawah, badiyah, atau badw, yang mengandung makna pola kehidupan berpindah-pindah (*nomad*), terkesan primitif, seperti pola kehidupan padang pasir. Kata badawah seakar kata dengan ibtida', seperti dimaksud pada "madrasah ibtida'iyyah" (sekolah tingkat permulaan), artinya orang-orang yang berpola kehidupan berpindah-pindah (bedouin). Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Paramadma, 1992), h. 312-313.

telah menempatkan perempuan dalam posisi terhormat, patut dicintai dan di perlakukan dengan baik.

Kalau berbicara tentang perempuan Islam di Indonesia maka terlihat kondisi perempuan yang dilematis. Di satu pihak, dapat disaksikan kemajuan dan perkembangan berkaitan dengan peran mereka di Indonesia, misalnya menjadi hakim agama dan anggota DPR. Di sisi lain, ada kecendrungan normatif yang ingin membatasi gerak mereka di arena publik.

Berdasarkan penelitian tentang kondisi perempuan Madura yang dilakukan oleh orang Arab Saudi dinyatakan bahwa masyarakat Madura dikenal sangat relegius. Namun dia heran "mengapa perempuan-perempuan itu mandi di kali (sungai) hanya mengenakan kain yang melilit di tubuh dengan membuka bagian dada atasnya?"<sup>23</sup> mandi bersama, sambil mencuci pakaian di sungai adalah bagian dari budaya perempuan Indonesia. Oleh sebab itu pemukiman sepanjang sungai di Jawa, Banjarmasin, Palembang, Sumatera, Riau misalnya, banyak terlihat perempuan-perempuan mandi di alam terbuka. Di situ pula mereka mencuci baju, peralatan dapur, bahkan buang hajat besar dan kecil. Itulah salah satu contoh adanya ambiguitas gambaran perempuan muslimah Indonesia.

Ambiguitas lain yang terjadi adalah bahwa di satu sisi perempuan berpandangan bahwa Islam mengajarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, namun di sisi lain kaum perempuan tidak merasa rendah dari laki-laki,

---

<sup>23</sup>Ungkapan Dawan Raharjo dalam acara Dialog Islam dan Martabat Perempuan, 30 Januari 1995, dikutip Faiqah, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, (Jogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 267

sekalipun susunan dan sistem masyarakat Indonesia yang sebenarnya cenderung bercorak patriarki. Masyarakat menghormati kaum ibu. Kedudukan itu dijunjung tinggi. Hadis yang selalu dikutip adalah "Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu." Karena itu, istri juga merupakan kedudukan yang dihormati, tetapi sering pula disebut peran "domestik" yang menjadikan adanya subordinasi pada peran "publik" walaupun diakui bahwa peran "domestik" sangat berpengaruh terhadap peran perempuan dalam pekerjaan dan profesi.

Ambiguitas yang terjadi di kalangan perempuan muslim Indonesia disebabkan budaya yang berlaku di Indonesia. Budaya yang menempatkan posisi sosial perempuan sebagai perempuan yang mengandalkan kehalusan, kelembutan dan lain-lain sehingga kaum perempuan perlu diajarkan menjadi perempuan. Mulai dari cara berjalan, berbicara, cara duduk, cara makan sampai pada jenis-jenis permainan yang dibolehkan.

Dalam teori belajar sosial perkembangan identitas gender perempuan dalam setiap lingkungan budaya disebabkan adanya perilaku yang diberi pujian karena ia berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya selalu ada juga perilaku yang tidak diberi pujian, malahan diberi hukuman karena perilakunya tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan lingkungan terhadap dirinya sebagai anak perempuan. Dalam proses pengembangan identitas diri sebagai perempuan perlu disadari bersama bahwa orang tua dan kemudian juga orang-orang lain di dalam masyarakat, seperti guru, tokoh agama dan sebagainya, memang cenderung untuk membedakan antara anak perempuan dan

anak laki-laki dalam memberikan hukuman dan pujian terhadap perilaku tertentu. Sebagai orang-orang dewasa yang merupakan agen penerus nilai-nilai ada juga kecenderungan untuk menguatkan nilai-nilai yang berbeda dalam diri anak perempuan dan laki-laki, misalnya, hingga sekarang orang tua cenderung menguatkan dalam diri anak perempuan sifat dan sikap memenuhi kebutuhan orang lain adalah baik dan penting, sedangkan dalam diri anak laki-laki ditanamkan sifat dan perilaku yang menjunjung tinggi keberanian dan kemandirian.

Dalam teori belajar sosial, apa yang dikembangkan melalui mekanisme penguatan langsung kemudian masih diperkuat dengan berperannya proses meniru dan belajar melalui pengamatan. Kekhususan dari belajar melalui mengamati ialah anak akan mengamati apa yang dilakukan orang lain termasuk apa yang ia baca dan lihat dalam film, tanpa ia sadari secara langsung ia sendiri melakukan hal yang sama. Anak perempuan mengamati apa saja yang akan ia lakukan kalau mengisi peran sebagai ibu. Artinya si anak mempunyai sejumlah gambaran tentang peran-peran sosial yang hanya disimpan dan akan dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu di kemudian hari bila ia memerlukannya.

Konsep meniru dalam belajar perilaku sesuai gender berimplikasi bahwa anak perempuan belajar peran gendernya dengan cara meniru dan mengamati perilaku orang lain. Sedangkan studi-studi tentang cara anak belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, yaitu dengan memilih model, telah menghasilkan informasi bahwa anak tidak secara sistematis membatasi diri pada salah satu gender. Ditemukan bahwa yang dipilih anak

adalah perilaku yang dominan pada salah satu gender dan bukan terutama karena modelnya adalah sesama gender.

Berlangsungnya proses pengembangan identitas gender juga mengembangkan dalam diri seorang anak pengertiannya tentang apa yang digolongkan sebagai maskulin dan feminim, tentang adanya peran-peran sosial yang diisi oleh masing-masing gender, tentang adanya peran domestik dan peran publik. Sehingga bagi anak perempuan, ia kemudian juga akan belajar bahwa sebagai perempuan ada berbagai pembatasan dalam pilihannya didasarkan kenyataan bahwa ia berjenis kelamin perempuan. Pada saat anak perempuan mengetahui ia adalah anak perempuan dan tidak akan berubah menjadi anak laki-laki, maka identitas gender menjadi bagian penting dari konsep dirinya. Karena identitas gender, ialah identitas sebagai perempuan, mempengaruhi persepsi orang lain dalam menentukan penilaian tentang apakah sebagai perempuan ia 'baik' atau 'tidak baik'. Motivasi memilih peran gender adalah kuat, karena merupakan usaha dari seorang anak untuk memahami realitas disekitarnya, dan untuk dapat mengembangkan konsep diri yang stabil.

Mengingat bahwa perilaku banyak dipengaruhi oleh aspek belajar, maka selain lingkungan keluarga, adalah lingkungan sekolah yang banyak berpengaruh pada pemantapan identitas gender. Studi-studi tentang pengembangan perilaku sesuai gender telah menemukan bahwa lingkungan sekolah dan pranata formal lainnya dalam masyarakat justru cenderung untuk membakukan stereotip dan mitos yang ada, mulai bahan ajaran maupun sikap guru. Sehingga meskipun secara ideal-formal memang ada aspirasi untuk mengem-

bangkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung berlangsungnya perubahan nilai sosial namun sebagai pranata sosial yang penting terbukti bahwa sekolah hanya mampu menyesuaikan secara lamban mengikuti perubahan sosial yang terjadi.

Bagi murid perempuan khususnya, ada temuan bahwa pujian terhadap perilaku *'feminin'* justru dapat melemahkan aspirasinya untuk berprestasi optimal di kemudian hari. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa perilaku non-konform terhadap peran feminin berkaitan dengan adanya IQ yang tinggi. Juga bahwa pada usia antara 6-10 tahun anak perempuan yang cerdas justru mempunyai sifat kompetitif, mandiri dan dominan. Sehingga bila lingkungan masyarakat menggolongkan sifat-sifat kepribadian seperti kemandirian, perilaku assertif, kompetitif sebagai ciri-ciri maskulin, sedangkan sifat-sifat konform, tergantung, pasif, *'nurturant'* dan sensitif sebagai ciri-ciri feminin, maka kondisi lingkungan yang demikian sebenarnya dapat digolongkan sebagai bersikap seksis. Apalagi karena biasanya yang disebut *'maskulin'* dinilai lebih tinggi dari pada sifat-sifat yang digolongkan sebagai *'feminin'*. Sehingga implikasinya adalah bahwa pengembangan identitas diri dan jati diri perempuan jadi dilematis, khususnya kalau ciri-ciri khas feminin dirasakan sebagai membatasi pengembangan potensi dirinya, mengurangi konsep diri yang positif, dan juga membatasi kebutuhannya untuk dapat mengembangkan jati diri yang positif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Suparinah Sadli, *Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan*, dalam *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 225

Seorang anak perempuan akan mengalami dilema bila sistem dan nilai sosial dalam masyarakat, atau mitos dan stereotip tentang perempuan yang berlaku menempatkan perempuan sebagai inferior terhadap laki-laki. Jika perempuan menghadapi kenyataan bahwa sebagai perempuan ia dihadapkan pada pembatasan-pembatasan dalam memilih peran sosialnya dibanding laki-laki. Kenyataan ini dapat menimbulkan berbagai konflik di dalam diri perempuan maupun orang-orang sekitarnya, khususnya karena sebagai anak perempuan ia sebenarnya telah belajar untuk menilai tinggi berbagai sifat dan perilaku perempuan. Tetapi kemudian ia mengalami bahwa lingkungan budayanya justru menginformasikan bahwa peran sosial perempuan tidak dinilai setinggi peran sosial laki-laki. Sebagai contoh adalah bila nilai-nilai yang dibakukan dalam suatu lingkungan hidup bahwa perempuan dewasa merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak-anaknya, dan bahwa sebagai perempuan ia sebaik selalu lebih mendahulukan kebutuhan orang lain dari pada kebutuhannya sendiri.

Keadaan ini berarti bahwa kualitas feminin tersebut paling nyata dapat dimunculkan dalam lingkungan domestik. Bila keadaan ini kemudian masih dilengkapi dengan adanya nilai-nilai bahwa laki-laki tidak ingin dan tidak perlu berkompetisi dengan perempuan dalam bidang domestik tersebut, maka nilai-nilai sosial tersebut dapat berdampak negatif pada pengembangan optimal dari potensi yang dimiliki perempuan. Karena dampak dari nilai-nilai sosial ini adalah bahwa sebagai perempuan ia akan mengalami diskriminalisasi dalam mengikuti pendidikan, pembatasan dalam memilih jurusan dan juga dalam kerja. Ia



juga akan mengalami bahwa aspirasi untuk mengkom-binasikan karier dan tuntutan keluarga tidak akan berlangsung secara mulus. Karena adanya internalisasi melalui proses belajar dari nilai sosial yang lebih memen-tingkan peran domestik, bahwa meskipun sekarang makin banyak perempuan yang memilih untuk bekerja dan berprestasi di lingkup publik dan bertumpu pada kehidupan keluarga, tetapi pilihannya justru dapat menimbulkan rasa bersalah dan cemas.

Kondisi ini akan paling banyak dialami perempuan bekerja yang terpengaruh oleh dibuatnya polarisasi antara peran laki-laki dan peran perempuan, sebagai peran publik dan peran domestik.

Jelas kiranya bahwa nilai-nilai sosial seperti di atas tidak mendukung ajakan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Sehingga keadaan ini selain mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pengembangan jati diri perempuan, juga berpengaruh negatif terhadap citra dari perempuan yang bekerja.

Keadaan perempuan muslim di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari realitas hubungan gender. Menurut data sensus penduduk 1990, sebanyak 52,4 persen dari total penduduk Indonesia, 88 persen di antaranya beragama Islam. Secara historis empiris, perempuan Indonesia tersosialisasi untuk menampilkan sikap keperempuanannya yang menunjuk pada posisi “siapa melayani siapa” dan “siapa melindungi siapa”.

Realitas perempuan berada di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Hal ini, di samping pemahaman agama

yang tekstual,<sup>25</sup> juga dipicu oleh dongeng-dongeng fiktif yang kemudian dikembangkan menjadi opini masyarakat. Dongeng-dongeng, seperti Cinderella, Putri di Puncak Menara, Tujuh Bidadari dari Kayangan, akhirnya menghasilkan membenaran sifat ketergantungan, kepasrahan dan kepatuhan, pemaaf dan mempesona kaum laki-laki.<sup>26</sup>

Pada gilirannya, perlu pengembangan jati diri perempuan, pengembangan identitas diri yang positif, yaitu memilih nilai-nilai positif dari feminitas dan maskulinitas. Pengembangan ini perlu dilakukan oleh semua pihak karena pengembangan diri merupakan hasil dari proses belajar, maka lingkungan formal maupun informal harus berperan aktif dalam mengembangkan dan mewujudkannya.

### **E. Kebudayaan dan Agama**

Bagi pengamat sosiologi, terjadinya berbagai konflik agama dalam banyak hal tidak berakar pada faktor teologis, tetapi pada konteks sosial. Namun salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan dalam memahami teks-teks agama. Seringkali

---

<sup>25</sup>M. Sastra Pratedja Sj. *Agama Pementas Bangsa*, (Jakarta:P3M, 1991) h. 5

<sup>26</sup>Di sisi lain, untuk kondisi kekinian, posisi perempuan di Indonesia sudah tidak mendapatkan hambatan untuk sama dengan laki-laki. Di bidang pendidikan contohnya, perempuan di Indonesia mayoritas saat ini mendapatkan kesempatan pendidikan. Bahkan, banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang berkualitas seperti Mutia Hatta, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Siti Fadhlilah Supari, Menteri Kesehatan, lebih jauh lagi Mega Wati Soekarno Putri, menjadi orang nomor satu di Indonesia. Artinya, kedudukan dan peran perempuan Islam di Indonesia sudah mulai dipertimbangkan.

agama hanya dipahami dari satu aspek saja yaitu aspek transendental atau aspek idealnya, padahal agama merupakan kenyataan sosial yang berkaitan dengan berbagai kepentingan fisik dan non fisik.

Agama sebagai sebuah sistem kebudayaan bukan berarti agama budaya, akan tetapi agama berperan dalam membentuk dan mewarnai tingkah laku manusia dan masyarakat. Bagi Clifford Geertz, agama adalah sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan, dan membungkus konsep-konsep ini dengan semacam faktualitas, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak lebih realistis.<sup>27</sup>

Secara substansial, setiap agama mengemban misi pembebas. Semangat pembebas tersebut salah satunya tercermin dalam teks kitab suci dan teraktualisasi dalam kehidupan nyata oleh para pemeluknya. Namun demikian, sering kali terjadi kesenjangan yang luar biasa antara teks dalam kitab suci dengan teks penafsiran atas kitab suci. Umat beragama menempatkan penafsiran kitab suci setara pula dengan kitab suci itu sendiri, sama-sama sebuah kebenaran mutlak. Sikap seperti inilah sebetulnya yang kemudian melahirkan hegemoni, stagnasi, kejumudan, dan kebekuan, sekaligus bagi yang lain sebagai tantangan yang harus dilawan.

---

<sup>27</sup> M. Sastra Pratedja Sj, *loc.cit.*,h.8

Dalam Islam, persoalan gender, merupakan contoh nyata betapa antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan. Hingga saat ini, keadilan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan, di masyarakat muslim masih beragam. Keberagaman ini penting untuk dikritisi, karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci al-Qur`an.

Islam sebagai sebuah agama – dalam *intellectual discourse* – dapat didekati dari tiga persepektif, yaitu: *Islam Normative*, *Islam Interpretatif* dan *Islam Practice*. *Islam Normative* adalah Islam yang didiskripsikan dalam teks al-Qur`an dan Al-Sunnah. *Islam Interpretatif* adalah gambaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh ulama melalui interpretasi mereka terhadap al-qur`an dan al-Sunnah. Sementara *Islam Practice* adalah gambaran Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ummat Islam. Harus diakui, bahwa Islam dalam pemahaman masyarakat yang terartikulasi dalam praktek keseharian sering kali berbeda bahkan bertolak belakang dengan Islam dalam wujud *normative*. Banyak hal mempengaruhi terjadinya perbedaan antara *Islam Practice* dengan *Islam Normative*, yang antara lain adalah disebabkan oleh konstruksi budaya yang terwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kaum egalitis percaya pada kekuatan budaya dalam membentuk sifat manusia. Sehingga kesetaraan gender 50/50 yang memakai standar ukuran maskulin (materi, status dan *power*) hanya dapat dicapai dengan mengubah institusi budaya ‘*nature*’ perempuan. Sifat yang selama ini dikaitkan dengan figur perempuan memang tidak cocok

untuk meraih 50/50, karena sifat ini bertolak belakang dengan apa yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan berdasarkan standar maskulin. Keberhasilan standar maskulin membutuhkan sifat-sifat independen, otonom, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, dan berorientasi *linear progresif* (perjalanan hidup seperti garis lurus, tidak kembali ke titik asal). Sedangkan sifat-sifat feminin, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, adalah segala sifat kebalikannya, keterikatan, dependen, berkorban, pengasuh, tidak mampu mengontrol keadaan, dan orientasinya sirkular (perjalanan hidup melingkar, yaitu kembali ke asal semula).

Berangkat dari pandangan bahwa pemahaman agama amat dipengaruhi oleh konstruksi budaya di mana masyarakat tersebut hidup, maka salah satu aspek krusial di Indonesia mendapatkan imbas langsung dari warisan budaya tentang perbedaan antara *Islam Normative* dengan *Islam Practice* adalah berkaitan dengan "dunia kaum perempuan".

Di Indonesia, banyak ditemukan cerita-cerita tentang peran dan posisi perempuan, baik dalam konteks sebagai isteri, ibu rumah tangga, maupun peran sosial yang boleh dan tidak boleh mereka terlibat aktif di dalamnya. Selain dalam bentuk cerita rakyat, tuntunan bermuatan nasehat dan suri tauladan untuk anak perempuan dan remaja juga menjadi bahagian keseharian kehidupan masyarakat. Sayangnya, pandangan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai "sebuah keyakinan agama" tanpa melalui proses penyeleksian, tanpa mempertanyakan kebenaran, dengan kata lain, diterima sebagai sesuatu yang benar dan difahami sebagai anjuran dan bimbingan agama Islam.

Ironisnya, masyarakat pada umumnya banyak yang menganggap budaya sebagai agama, sehingga praktek adat istiadat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi budaya patriarkhi yang sangat mengakar dalam masyarakat Islam di semua sektor kehidupan, yaitu politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan moral.

Dalam bidang ekonomi, pada masyarakat dengan budaya patriarkhis, perempuan adalah *subordinat* dari laki-laki. Laki-lakilah yang menguasai semua anggota keluarga, menguasai sumber-sumber ekonomi. Perempuan dalam sistem ini tidak mempunyai akses ekonomi, sehingga tidak dapat mandiri secara ekonomi, dan pada gilirannya sangat tergantung secara psikologis pada suami.

Di kalangan masyarakat patriarkhis, budaya yang menempatkan posisi perempuan sebagai pengikut laki-laki begitu kuatnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk *subordinatif*, perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin masyarakat. Tradisi ini masih dianut bahkan setelah datangnya Islam, karena mereka tidak begitu saja lepas dari struktur budaya yang patriarkhis. Hal ini menyebabkan termarginalkannya peran politik perempuan. Misalnya dalam budaya Jawa, perempuan dinggap tidak patut tampil memimpin, karena mereka menganggap tidak mungkin ada perempuan yang hatinya lurus dalam hal kepandaian dan kekuatan. Perempuan hanyalah seperdelapan dinding laki-laki.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>St. Sundari Maharto, "Perempuan dalam Budaya Jawa", dalam Hj. Binar, *Wacana Perempuan Ke-Indonesiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: CIDES), hlm. 194

Selama ini, pencitraan laki-laki dalam Islam sebagai sosok pemimpin atau kepala keluarga di kalangan masyarakat Indonesia masih terbius dengan acuan akar budaya paternalis-maskulinitas yang diisi dengan muatan-muatan hierarkis dalam nuansa hubungan laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan yang didominasi, pelindung dan yang dilindungi serta serentetan hierarkis lainnya yang menempatkan perempuan dalam posisi ketidak-setaraan. Bahkan pencitraan ini didukung oleh ayat-ayat al-Qur`an yang diinterpretasikan sedemikian rupa dan diyakini sebagai legitimasi teologis oleh masyarakat muslim Indonesia.

Sebagai pemimpin, tugas laki-laki ada di ranah publik. Masyarakat muslim mengkondisikan bahwa dunia domestik diperuntukkan bagi kaum perempuan. Dari sini berkembang anggapan bahwa tugas perempuan hanyalah mengurus rumah tangga dan bukan bekerja di luar rumah.<sup>29</sup> Anggapan tersebut berimplikasi kurangnya dorongan bagi keluarga untuk membekali pendidikan anak gadisnya, dengan alasan bahwa perempuan bagaimanapun tinggi pendidikannya pasti akan kembali ke dapur.<sup>30</sup> Asumsi ini kemudian dikukuhkan oleh masyarakat. Alasan ini pun dijadikan legitimasi bagi masyarakat muslim menengah ke bawah yang merasa kesulitan dalam bidang ekonomi untuk memprioritaskan anak laki-laki dalam pendidikan.

---

<sup>29</sup>Baroroh Baried, "Konsep Perempuan dalam Islam", dalam *Perempuan Islam Indonesia Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 41

<sup>30</sup> *Ibid.*

## F. Identifikasi Agenda Masalah Agama yang Strategis

Terdapat persoalan-persoalan gender dalam permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian. *Pertama*, yang menyangkut persoalan *subordinasi* kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang *subordinatif* terhadap kaum laki-laki. Padahal, pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu *subordinasi* kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan, seperti ayat Tuhan dalam al-Qur'an, surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal."

Masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang mendukung pandangan bahwa kaum perempuan tidak subordinasi dari laki-laki, seperti surat al-Taubah ayat 71; al-Nisa` ayat 123; surat Ali Imran ayat 195 dan surat al-Nahl ayat 97.

*Kedua*, pemahaman yang bias gender selain meneguhkan *subordinasi* kaum perempuan, juga membawa akibat



pada persoalan waris dan kesaksian, di mana nilai kaum perempuan dianggap separoh dari kaum laki-laki. Untuk membahas ini perlu dilakukan analisis konteks sosial terhadap struktur sosio-kultural pada saat ayat tersebut diturunkan, sehingga pemahaman masalah waris dan kesaksian tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang disampaikan dalam ayat-ayat di atas. Umumnya mereka yang menekuni masalah keadilan gender tidak melihat angka pembagiannya, melainkan semangat keadilannya. Sehingga demi mencapai keadilan, merubah angka yang sesuai dengan sistem dan struktur sosial dewasa ini pun perlu dilakukan.

*Ketiga*, segenap ayat yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak memproduksi maupun reproduksi, yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka. Oleh karena itu, usaha untuk menafsirkan kembali agar terjadi keadilan gender dalam hak-hak reproduksi perlu mendapat perhatian. Di antara agenda mengenai penafsiran hak-hak reproduksi ini meliputi: Hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkenaan dengan pilihan-pilihan untuk menjalankan dan menggunakan atau menolak penggunaan organ reproduksinya. Mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Hak untuk memilih pasangan. Dalam kenyataan masih banyak beredar keyakinan di masyarakat Islam bahwa orang tua (dalam hal ini ayah) memiliki hak menentukan jodoh (*ijbarl*) bagi anak gadisnya. Kajian tentang hak-hak perempuan untuk menentukan nasib jodohnya ini juga perlu

diagendakan. Hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual.

Dalam pandangan Islam yang bias gender, kaum perempuan secara seksual dimiliki dan dikontrol oleh kaum laki-laki dan tugas utama isteri adalah melayani. Meskipun tidak jelas dari mana pandangan ini datangnya, namun hubungan seksual bagi kaum perempuan lebih dikonstruksikan sebagai kewajiban belaka. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi terhadap tafsir dan ajaran fikih yang menolak segenap jenis ketidakadilan gender dalam bentuk pelecehan seksual (*sexual harassment*), pemerkosaan terhadap isteri (*marital rape*) yang masih menjadi masalah kontroversial tersebut.

Dapat dinyatakan bahwa tafsiran agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melanggengkan ketidakadilan gender maupun sebaliknya, yaitu dalam usaha menegakkan keadilan gender. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identitas akar permasalahan dan strategi pemecahannya.

Suatu strategi advokasi bisa dipinjam untuk melakukan proses penyadaran dan penafsiran ulang dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: apabila persoalannya terletak dalam pengertian ayat al-Qur'an atau bunyi hadis, maka yang perlu dilakukan adalah penafsiran ulang terhadap ayat tersebut dengan perspektif gender, penelitian terhadap autensitas hadis tersebut, untuk menemukan hadis yang lebih sahih. Ini berarti memerlukan usaha yang melibatkan

antara ulama dengan berbagai orang dan dengan bermacam-macam disiplin ilmu yang mempunyai perspektif gender.

Namun, jika persoalannya terletak pada penafsirnya, yakni dalam pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsiran, maka perlu diadakan pendekatan dan pendidikan atau lokakarya guna membahas analisis gender bagi kalangan otoritas ilmu keagamaan tersebut. Kegiatan ini berarti melibatkan mereka yang dianggap memiliki otoritas ilmu keagamaan dalam memahami dan mendesiminasikan wacana keadilan gender dalam Islam. Akan tetapi jika persoalannya terletak pada kultur masyarakat agama yang melanggar ketidakadilan gender, yang diperlukan adalah suatu usaha kampanye dan pendidikan massa tentang masalah gender yang dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap masalah keadilan, termasuk melibatkan para ulama.

Untuk itu, sudah saatnya lembaga keagamaan dan pendidikan serta lembaga kajian keagamaan memiliki bagian “pengkajian perempuan” sebagai wadah yang memberi ruang untuk mengkaji persoalan kedudukan perempuan dalam agama. Dalam masyarakat Islam misalnya, perlunya kajian perempuan di pesantren maupun dilembaga pendidikan tinggi Islam. Melalui lembaga kajian seperti ini kemungkinan lahirnya tafsir maupun fikih perempuan yang berperspektif keadilan gender terbuka lebar.

## **G. Simpulan**

Membicarakan perempuan Islam di Indonesia secara realitas budaya yang ada, terdapat dualisme kultural. Kultur yang pertama dirasakan masih membedakan laki-laki dan

perempuan secara biologis dan gender. Lelaki lebih superior dari perempuan. Kultur yang kedua bahwa mereka mengakui adanya jaminan terhadap hak-hak perempuan dan perempuan diakui merupakan sumberdaya manusia yang patut diperhitungkan.

Pendapat pertama didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara tekstual, dan juga budaya yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat yang mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah. Pendapat kedua juga didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara kontekstual dan konprehensif. Untuk dapat mengembalikan pemikiran semua masyarakat dalam memahami bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu gender, maka perlu dicanangkan:

*Pertama*, diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama.

*Kedua*, pemahaman yang mendasar oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum laki-laki dan membudayakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga baik lelaki maupun perempuan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang.

Pertu disadari memperjuangkan posisi perempuan dalam realitas budaya Islam di Indonesia bukan berarti gerakan laki-laki melawan perempuan atau membalas dendam kepada kaum laki-laki, melainkan gerakan menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil sesuai dengan prinsipil dan normatif Islam yang menghormati dan bahkan memberdayakan kaum perempuan.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yusuf Ali. 1993. *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, diterjemahkan oleh Ali Audah, Jakarta
- Amina Wadud Muhsin. 1992. *Perempuan Dlam Al-Qur'an*, Terj. Yasir Radianti, Bandung: pustaka Bandung
- Al-Aqqad, al-Mar'ah. tth. *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Nahdhah
- Asghar Ali Engineer, 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi dan Cici Farhan Asegaf Yogyakarta: Bintang Pelajar
- Baroroh Baried. 1993. "Konsep Perempuan dalam Islam", dalam *Perempuan Islam Indonesia Kjian Tekstual dan Kontekstual* Jakarta: INIS
- Fazlur Rahman. 1993. *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyudin Bandung: Pustaka Bandung
- Fakih, Mansour, 1996; *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Holy Bible, edisi cetakan Indonesia
- Al- Jalalayn, tth. *Tafsir al- Jalalayn*, Bandung: Makhtabah Dahlan
- Lynn Wilcox, *Women and the Holy Qur'an: A Sufi Perspective*, terj. DICTIA, *Perempuan dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Mahmud Ibn 'Umar Al-Zamakhshary. tth. *Al-Kasysyaf*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid I

- Muchtar, Yati, 2001; “Gerakan Perempuan Indonesia Dan Politik Gender Orde Baru”, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesenjangan*, No. 14.
- Muhammad Rasyid Ridla'. 1367 H. *Tafsir al-Manar*, juz IV, Kairo: Dar al-Manar
- Muhammad Quraish Shihab, *Konsep Perempuan menurut Al-Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam*
- Muhammad Assad. 1980. *The Message of the al-Qur'an* (Giblatar: Dar Al-Andalus, Dikutip dari Nasaruddin Umar.
- Muhammad Ibn Jarir al-Thabari. 1988. *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* Beirut: Dar al-Fikr
- M. Sastra Pratedja Sj. 1991. *Agama Pementas Bangsa*, Jakarta: P3M
- Al-Nawawi, tth. *Marah Labid*, Beirut: Dar al-Fikr
- Nurcholish Madjid, 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadma, 1992
- Quraish Shihab. 2000. *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Volume 2.
- Al-Shanna'ani, tth. *Subul al-Salam*, Bandung: Makhtabah Bandung, jilid III
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Perempuan Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyatiwiratmo, 1989. *Anak Dan Perempuan Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta

- Suparinah Sadli. 2001. *Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan*, dalam *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press
- St. Sundari Maharto, "Perempuan dalam Budaya Jawa", dalam Hj. Bainar, *Wacana Perempuan Ke-Indonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta: CIDES
- Undang-Undang Dasar, 1945*; Apollo, Surabaya.
- Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 dan P P No. 9 Tahun 1975*, Surabaya: Karya Anda
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan, Jakarta, 1993.

# INDEKS

## A

adat, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,  
60, 62, 64, 65, 66, 67, 68,  
69, 72, 74, 80, 81, 92, 105,  
106, 107, 121, 123, 125, 126,  
128, 129, 130, 131, 133, 135,  
142, 175, 185  
aktualisasi diri, 7, 8, 9, 11, 20,  
28, 39, 150, 185  
*amar ma'ruf nahi al-munkar*,  
26, 42, 185

## B

berkurung, 50, 51, 52, 53, 54,  
56, 67, 69, 80, 92, 93, 185  
budaya Melayu, 49, 58, 60,  
65, 92, 106, 107, 117, 121,  
123, 125, 130, 135, 185  
budaya patriarkhi, 12, 175, 185  
burung Hud-hud, 31, 32, 33

## D

domestik, 3, 43, 78, 81, 86, 94,  
112, 126, 127, 154, 165, 167,  
169, 170, 176

## E

etos kerja, 23, 24, 25, 44

## H

Hatshepsut, 12  
hukum Islam, 181, 190

## I

*ihsan*, 24, 25, 44

## J

jati diri, 121, 168, 170, 171

## K

kebebasan perempuan, 52, 54  
kemandirian ekonomi, 41,  
159  
kemandirian politik, 41, 159  
Kerajaan Siak, 51, 56, 59, 62,  
65, 68, 69, 83, 94, 96, 101,  
133, 137, 193  
kesetaraan gender, 10, 42, 173

## M

Madrasah Annisa, 86, 87, 88,  
89, 94  
maskulin, 27, 110, 111, 167,  
168, 173  
mengaji, 67, 71



## N

Nabi Sulaiman, 29, 30, 31, 32,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  
Negeri Saba', 26, 43

## P

pantang larang, 67, 107, 134,  
135  
penafsiran, 20, 129, 151, 153,  
155, 172, 173, 177, 178, 179,  
180, 181  
pendidikan modern, 50, 70,  
74, 76, 77, 82, 83, 93  
pendidikan perempuan, 53,  
74, 82, 83, 93, 106  
pendidikan tradisional, 70,  
71  
pengendalian diri, 23, 25  
politik formal, 4, 5, 11  
potensi diri, 20, 25, 43  
publik, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 26, 27,  
39, 41, 43, 44, 52, 53, 54, 80,  
112, 126, 164, 165, 167, 170,  
176

## R

Ratu Balqis, 6, 26, 28, 29, 30,  
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
40, 42, 43, 159  
Ratu Theodora, 12  
Ratu Wu Zetian, 13, 14  
realitas budaya, 106, 143, 180,  
181  
ruang publik, 3  
rusuk, 144, 146, 147, 148, 149,  
150

## S

sistem nilai, 123, 124, 125, 126  
strategi, 13, 20, 27, 28, 45, 179

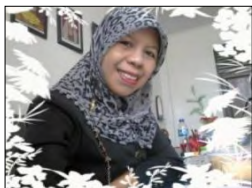
## T

teologi, 160  
tradisi, 54, 66, 107, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 131, 134,  
135, 141, 142, 161, 178  
tudung lingkup, 54, 55, 56  
tulang rusuk, 150

## U

ulama, 37, 42, 144, 145, 146,  
147, 157, 162, 173, 179, 180  
ungkapan Melayu, 105, 128

## TENTANG PENULIS



**Dra. Sofia Hardani, M.Ag.** lahir di Sipisang, Kab. Agam, Sumatra Barat pada tanggal 30 Mei 1963. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di tempat kelahirannya, melanjutkan pendidikan ke Diniyyah Putri Padang Panjang Sumatra Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Susqa Pekanbaru (1990), dan S2 pada perguruan tinggi yang sama dalam bidang Hukum Islam (2002). Saat ini, ibu dari Iqbal Prima Bratasena (14th), dan Dwi Olivia Katnanda (12th) ini tengah menekuni program Doctor di bidang Hukum Islam. Dosen Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum UIN Suska Riau ini, disamping mengajar konsentrasi mata kuliah Ilmu Falak, ia juga aktif di Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau sejak tahun 2004, dan diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau untuk dua periode (2008-2015).

Di bidang kemasyarakatan, ia aktif pada organisasi sosial seperti DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Riau sebagai ketua Biro Ubudiyah (2006-2008), Wakil Ketua III (2008-2010), Sekretaris Umum (2010-2015); anggota Pokja Perempuan pada Komisi Pencegahan/Penanggulangan HIV/AIDs (KPAD) Provinsi Riau (2006-2008); Anggota Devisi Hukum dan HAM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Madani Riau (2006-2009), konsultan bidang hukum Islam LK3Madani (2009-sekarang). Melalui organisasi yang ditekuninya, anak bungsu dari lima bersaudara pasangan Hj. Djuriah (alm.) dan Samin (alm.), ini kerap mengisi acara penyuluhan & konsultasi keluarga di Radio Rabbani FM Pekanbaru dan Riau Televisi (2008-2010)

Penelitian yang pernah dilakukan a.l.: *Eksistensi Lembaga Hisab & Rukyat PTA Pekanbaru* (2005), *Perum Pegadaian sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Ekonomi Masyarakat Pekanbaru* (2001), *Analisis terhadap Konsep Nahdhatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah* (2005), *KDRT terhadap Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian pada Masyarakat Pekanbaru* (2007), *Studi Analisis dan Identifikasi Akar Masalah KDRT serta Alternatif Penanggulangannya di Prov. Riau* (2007), *Peran Dosen dalam Meningkatkan Mutu Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum* (2008), *Efektifitas UU No. 23 th 2004 tentang PKDRT dalam Mengeliminir KDRT di Pekanbaru* (2008), *Pemetaan Naskah Klasik di Riau* (2009),

*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengadaan Air Bersih di Kec. Sabah Auh Kab.Siak (2009), Strategi Perempuan dalam Mengaktualisasikan Diri pada Lembaga Politik Formal di Riau (2010), Pemberdayaan Petani Sawit Desa Sialang Indah yang Termarjinalkan oleh Sistem Industrialisasi Sektor Perkebunan (2010), Keterlibatan Pria Muslim dalam Kesehatan Reproduksi (2011), Akurasi Arah Kiblat Masjid di Kota Pekanbaru (2012).*

Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku a.l.: *Nikah Mut'ah dan Keadilan Jender* (Jurnal Marwah, 2003), *Teologi Feminisme di Era Post-Modern* (Jurnal Hukum Islam, 2003), *Ibadah Haji: Sekitar Istitha'ah dan Bekal Harta Haram* (Jurnal Hukum Islam, 2004), *KDRT terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam* (Jurnal Marwah, 2004), *Pri Keadilan dalam Fikih Indonesia (Kritik terhadap beberapa Aspek Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam)* (Jurnal Hukum Islam, 2004), *Hukum Islam dan HAM* (Jurnal Hukum dan HAM, 2005), *Kode Etik Hakim dalam Islam* (Jurnal Hukum dan HAM, 2005), *Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Fenomena Lebaran Kembar di Indonesia* (Jurnal Hukum Islam, 2006), *Peran Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah* (Jurnal Hukum Islam, 2006), *Apresiasi Iqbal terhadap Perempuan* (Jurnal Marwah, 2006), *Metode Qiyas (Analogi) dalam Penetapan Hukum Islam* (Jurnal Hukum Islam, 2007), *Sistem Ekologi dalam Syari'at Islam* (Jurnal Hukum Islam, 2008), *KDRT terhadap Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian Masyarakat Pekanbaru* (Jurnal Marwah, 2008), *Gender dalam Perspektif Islam* dalam buku *Perempuan Riau Bicara* (Pusdatin Puanri, 2008), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jurnal Menara Riau, 2008), *Buku Dasar-Dasar Ilmu Falak* (2009), *Mengambil Aspek Masalah diantara Pro-Kontra Nikah Sirri* (Jurnal Hukum dan HAM, 2009), *Perkawinan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Islam* (Jurnal Hukum dan HAM, 2009), *Pekerja Sosial dalam Perspektif Islam* (Jurnal Sosial Budaya, 2009), *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam* (Jurnal Hukum dan HAM, 2010), *Buku Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (PSW, 2010), *Buku Air Bersih untuk Sabak Auh* (PSW, 2011), *Gender dalam Perspektif Islam* (Jurnal JGI, 2012).



**Dr. Wilaela, M.Ag.** dosen tetap di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, lahir di Alas, Sumbawa, 2 Agustus 1968. Ibu dua anak ini menamatkan SD dan SMP-nya di Alas-Sumbawa-NTB serta menyelesaikan Madrasah 'Aliyah di Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1985. Gelar

S-1 ia peroleh setelah menamatkan studinya di Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993) dan merampungkan S-2 di IAIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan yang sama (1997). Tahun 2012 ia berhasil meraih gelar doktor dalam bidang

Ilmu Sejarah di *Universitas Padjadjaran* Bandung dengan predikat *Cumlaude*.

Putri pertama pasangan H. Umar Imran Rekes (Alm) dan Hj. Umie Salamah ini mengawali akademisnya dengan menjadi pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau (1998-sekarang). Selain itu, ia aktif di bidang penelitian melalui kegiatannya di Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Suska Riau (2001 s/d sekarang) dan menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau (2007–2008). Ia juga turut membidani kelahiran jurusan baru dengan menjadi Sekretaris Jurusan Administrasi Negera (2000-2003). Di samping sibuk mengajar, peserta *Sandwich Program* di *Universiteit Leiden*, Netherlands (2010) ini, juga aktif dalam sejumlah organisasi sosial dan profesi, antara lain menjadi Wakil Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Propinsi Riau (2007-sekarang), Pengurus Bidang Sejarah dan Budaya “Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) (2004-sekarang), Koordinator Bidang Kerjasama *Madrasah Development Center* (MDC) Depag Provinsi Riau (2005-2009) dan Koordinator *Learning Assistance Program for Islamic Schools* di Riau (2004-2008).

Berbagai kegiatan yang ditekuni terkait erat dengan studi tentang sejarah dan isu-isu perempuan dan gender. Beberapa penelitian penting pernah dilakukannya, baik yang bersifat pribadi maupun bersama tim antara lain *Trafficking in Women* (Bappeda Riau, 2003); *Trafficking in Children* (Bappeda Riau, 2003); *Pemetaan Madrasah Pendidikan Dasar di Riau* (LAPIS AusAID, 2004); *Pemetaan Kebutuhan dan Potensi Madrasah di Pekanbaru dan Kampar* (LAPIS AusAid, 2005); *Kajian Anak Usia Sekolah Putus/Tidak Sekolah di Provinsi Riau* (Pusdatin Puanri, 2006); *Perempuan dan Pendidikan: Profil Diniyah Putri Pekanbaru* (UIN Suska Riau, 2007); *Prosopografi Dekan Perempuan UIN Suska Riau* (UIN Suska Riau, 2008); *Tengku Agung dan Tengku Maharatu* (2009); *Diniyah Putri Pasir Pangaraian* (2011).

Selain meneliti, ia juga aktif menulis sejumlah karya, dalam bentuk buku, artikel jurnal *Marwah*, *Annida*, *Khutub Khana* dan koran Riau Pos. Beberapa di antaranya: *Pedoman Panduan Pendidikan Agama untuk MTs Provinsi Riau* (Riau, Depag Provinsi Riau, 2005 & 2006); “Pendahuluan” *Menjaring Mutiara* (BPPM Provinsi Riau, 2006); “Encik Hasnah: Menekat Budaya” dalam *Mutiara Yang Terjaring* (Pusdatin Puanri, 2007); “Hamka Sebagai Sejarawan Indonesia” (*Jurnal*, LPP UIN Suska Riau, 2008); “Biografi Dekan Perempuan UIN Suska Riau,” Bunga Rampai dalam *Dinamika Sosial Pendidikan di Riau* (LPP UIN Suska Riau, 2008); “Pengantar” dalam *Direktori Perempuan Riau* (Pusdatin Puanri, 2008); “Perempuan dan Sejarah” dalam *Perempuan Riau Bicara* (BKMT Riau, 2009); *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (PSW UIN Suska Riau, 2010); *Perempuan dan Air Bersih* (PSW UIN Suska Riau, 2011).

Artikel-artikel antara lain “Chadiyah Ali Tokoh Pendidikan Perempuan Riau (2009); “SSK II dan Pendidikan di Kerajaan Siak” (2010); “Perempuan dalam Budaya Melayu” (2010); “Pendidikan Perempuan Masa Lalu”(2011); “Tengku Agung Kartini Riau” (2011); Pendidikan Perempuan Riau dari Masa ke Masa” (2011).

Sejumlah makalah yang dipresentasikan di tingkat lokal, nasional dan internasional antara lain “Sultanah Latifah School di Kerajaan Siak” Abstrak untuk *Academic Writinng Skills Workshop, UI* (Jakarta, 2009); “Sekitar Metode Sejarah,” *Makalah Presentasi Seminar Pendahuluan Penulisan Buku Perempuan Pejuang Riau* (Pekanbaru, 2010); “Sultanah Latifah School di Kerajaan Siak” *Presenting a paper on International Conference on “History, Culture, and Identity in Colonial and Post Colonial Indonesia” at the Fakulteit Social en Wetenschappen, Leiden University* (Netherlands, 2010); “Pendidikan Perempuan di Riau: Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru,” *Makalah Presentasi Konferensi Nasional Sejarawan IX* (Jakarta, 2011); “Wacana Jender,” *Makalah Presentasi Sosialisasi Jender bagi Dosen Perguruan Tinggi di Pekanbaru* (Pekanbaru, 2011); “Pendidikan Perempuan di Riau” *Presentasi Seminar Nasional Sandwich Like Program* (Padang, 2011); “Sejarah Pendidikan Perempuan di Riau: Dari Latifah School hingga Diniyah Putri Pekanbaru,” *Makalah Presentasi Mengenal Sejarah Lokal Memperkuat Karakter Bangsa*” (Pekanbaru, 2011); “Generasi Muda dan Pembangunan Karakter Bangsa” dalam *Seminar Nasional 4 Pilar-MPR RI* (Pekanbaru, 2011).



**Dra. Riswani M.Ed.** lahir tanggal 5 Oktober 1966 di Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini adalah alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru. Gelar Master Pendidikan dalam bidang Guidance

and Counseling diperolehnya dari International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur pada tahun 1998. Ia memulai karier mengajar di UIN Suska Riau semenjak tahun 1992 ketika universitas tersebut masih dalam bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Disamping mengajar, ibu dari empat anak ini juga aktif di beberapa organisasi, antara lain di Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau sebagai pengurus dan pengelola Jurnal Marwah (2001 s/d sekarang); ketua Biro Pendidikan DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Riau (2006-2010), wakil ketua VII yang membidangi Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri DPD Al-Hidayah (2010-2015), pengurus Korps Perempuan Majelis Dakwah Indonesia Prov. Riau (KPMIDI) (2008-2011). Disamping itu, aktif di Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri), organisasi

yang bergerak dalam pengumpulan data yang terkait dengan perempuan (2009 s/d sekarang).

Diantara karya tulis yang terkait dengan perempuan adalah buku "*Perempuan Pejuang Riau*" (2011) yang merupakan kumpulan tulisan tentang perempuan-perempuan Riau yang telah berjuang sebelum Indonesia merdeka baik dalam bentuk perjuangan fisik maupun non fisik seperti melalui kegiatan sosial dan pendidikan; "*Ketika Negara Memberi Amanah*" (2012) buku yang menghimpun biografi Menteri dan mantan Menteri-Menteri Pemberdayaan Perempuan; "*Ketika Perempuan Berbicara*" kumpulan tulisan perempuan dalam berbagai perspektif (2010), "*Konseling Berwawasan Gender*", "*Konseling bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan*", "*Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*" (Jurnal Marwah), dan lain-lain.



**Jumni Nelli, M.Ag.** lahir di Duri, Bengkalis, pada tanggal 28 Juni 1972. Menempuh pendidikan dasar di SDN Duri (1985), pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Simpang Padang Duri (1988), kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasir di Bukittinggi (1993). Pendidikan Tinggi (S1) diperolehnya di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Muamalah Jinayah (1997), dan Pasca Sarjana (S2) di

IAIN Imam Bonjol Padang dengan Konsentrasi Syari'ah (2000). Sekarang sedang mengikuti Program Doktor di UIN Suska Riau jurusan Hukum Islam.

Ibu dari Mhd. Sayyid Aqiel al-Raziq (11 tahun) dan Mhd. Berry Alfa Thoriq (9 tahun) ini saat ini tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Mantan aktifis HMI ini juga aktif di PSW sebagai sekretaris (2008 sampai sekarang) juga aktif di organisasi masyarakat seperti DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Riau sebagai Ketua Biro Ubudiyah (2009-sekarang).

Selain mengajar, ia juga aktif menulis di berbagai jurnal. Diantara tulisan yang diterbitkan antara lain *Kedudukan Kalalah Dalam Kewarisan (Analisis Tafsir, Hadis dan Fikih)* (Jurnal Hukum Islam, 2005), *Mahram Mushaharah Akibat Sodom* (*Analisis terhadap Fiqh Hanabilah*) (Jurnal Hukum Islam, 2006), *Hukum Islam dan Kekerasan Suami Terhadap Isteri* (Jurnal Marwah, 2007), *Perempuan Dalam Realitas Sosial Budaya Islam Indonesia* (Jurnal Marwah, 2008), *Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia (Analisis Terhadap KHI Pasal tentang Sahnya dan Pencatatan Perkawinan)*, (Jurnal Marwah, 2008). *Ihdad Wanita Karier: Pertimbangan Normatik dan Etik Moral* (Jurnal Marwah), *Perkembangan Hukum Islam pada Masa Turki Usmani* (Jurnal Hukum Islam, 2007), *Paradigma Al-Mashlahah dalam Era Global (Analisis Kreteria, Tingkatan dan Pembagiannya)* (Jurnal Hukum

Islam, 2007), *Perempuan dan Iklan: Kritik Terhadap Ideologi Gender di Era Ekonomi Kapital* (Jurnal Marwah, 2009), *Tawaf Ifadhah bagi Wanita Haid Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Hukum Islam, 2007), *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam pada Masa Sahabat* (Munculnya aliran-aliran dalam Islam) (Jurnal Hukum dan HAM, 2008), *Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak., Upaya Melahirkan Manusia Berkualitas: (Acuan Dasar Memasuki Kehidupan Perkawinan* (Jurnal Sosial Budaya, 2008), *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional* (Jurnal Hukum Islam, 2008), *Evaluasi Materi Pendidikan Islam Perspektif Gender (Evaluasi Terhadap Materi Buku Ajar Agama Islam)*, (Jurnal Annida, 2009), *Pulau Penyengat: Pusat Naskah Sastra Kerajaan Riau-Lingga.* (Jurnal, Annida, 2010), *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam: Perspektif Analisis Gender.* (Jurnal Hukum dan HAM, 2009), *Menguak Misteri Nafs Al-Wahidah dalam Alqur'an* (Jurnal Marwah, 2010), *Agama dan Gender: Telaah Perempuan dalam Struktur Sosial* (Pusdatin, 2010), *Perkembangan Alasan Perceraian dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Belanda* (Jurnal Hukum Islam, 2011), *Perempuan Riau dan Politik (Problematisasi Aktualisasi Perempuan dalam Ormas* (Jurnal Hukum dan HAM, 2011), *Hukum Syara' dan Pembagiannya* (Jurnal Hukum dan HAM, 2012), menulis *Buku Pengantar Sosiologi Keluarga* (2009), *Fiqh Munakahat 1*, (2010), *Fenomena Nikah Sirri Kampar* (2011).

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: *Kinerja Pegawai di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum* (2007), *Perilaku Keagamaan Masyarakat Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh*, (2008), *Efektifitas UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Dalam Mengeliminir Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pekanbaru*, *Problematisasi Publikasi Perempuan Riau dalam Ormas* (2009), *Pemetaan Naskah-Naskah Klasik Nusantara di Riau*, (2009), *Analisis Yuridis Nikah Sirri Berdasarkan Ketentuan yang Belaku tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pekanbaru)*, (2010), *Pemberdayaan Petani Sawit Desa Sialang Indah yang Termarginalkan oleh Sistem Industrialisasi Sektor Perkebunan* (2010), *Fenomena Nikah Sirri di Pinggir Kab. Kampar* (2011), *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Nasab Anak Diluar Nikah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (2012).